

Meneguhkan Ilmu-Ilmu Sosial Keindonesian

Editor : Pandhu Yuanjaya

 **FAKULTAS ILMU SOSIAL**
Universitas Negeri Yogyakarta



Meneguhkan Ilmu-Ilmu Sosial Keindonesian

Editor : Pandhu Yuanjaya



Jl. Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Telp. 0274 - 586168 psw 247, 248, 249
0274 - 548202. Fax. 0274 - 548201
Website: <http://www.fis.uny.ac.id>
email: fis@uny.ac.id



Meneguhkan Ilmu-Ilmu Sosial Keindonesiaan

Penulis:

**Ajat Sudrajat, Nasiwan, Ravik Karsidi, Pawito,
Warsono, Cahyo Pamungkas, Hastuti, Eny Kusdarini,
Suranto Aw, Danu Eko Agustinova, Benni Setiawan**

Editor:

Pandhu Yuanjaya

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Meneguhkan Ilmu-Ilmu Sosial Keindonesiaan

Penulis

Ajat Sudrajat, Nasiwan, Ravik Karsidi, Pawito, Warsono, Cahyo
Pamungkas, Hastuti, Eny Kusdarini, Suranto Aw
Danu Eko Agustinova, Benni Setiawan

Editor:

Pandhu Yuanjaya

ISBN: 978-602-60578-2-2

Penerbit:

Jl. Colombo, No. 1

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Telepon: 0274-586168, 0274-548202, Fax: 0274-548201

<http://fis.uny.ac.id>, email: fis@uny.ac.id

Cetakan Pertama, September 2017

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberi kemudahan terbitnya buku “Meneguhkan Ilmu-ilmu Sosial Keindonesiaan”. Buku ini berisi refleksi para akademisi yang mendedikasikan hidupnya untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial keindonesiaan.

Hadirnya buku ini selaras dengan Visi Fakultas Ilmu Sosial yang mana pada tahun 2025 menjadi Fakultas yang unggul di Asia Tenggara dalam menghasilkan paradigma alternatif ilmu-ilmu sosial keindonesiaan, ilmuwan sosial, dan pendidik yang berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. FIS sebagai institusi perguruan tinggi dan tempat tinggal berbagai ilmuwan sosial tanpa kenal lelah melakukan refleksi, kajian, sampai pada langkah nyata gerakan membangun ilmu sosial Indonesia melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian.

Usaha mengembangkan paradigma alternatif juga dilakukan dengan mendirikan Forum Ilmu-Ilmu Sosial Transformatif (FISTRANS) pada tahun 2012. Lembaga tersebut demi menjawab kegelisahan atas dinamika ilmu sosial dan sumber-sumber ilmu keindonesiaan. Lembaga tersebut menjadi sarana dalam upaya membangun paradigma ilmu sosial Indonesia dari hasil pemikiran berbagai sudut pandang ilmu sosial melalui berbagai macam perspektif ilmu sosial yang dimiliki FIS saat ini di bidang Hukum dan Politik, Sosiologi, Sejarah, Geografi, Administrasi Negara dan Komunikasi. Untuk melanjutkan proses yang telah dilakukan sebelumnya, indegenisasi ilmu sosial semakin mengerucut pada upaya membangun ilmu sosial ke Indonesiaan di Fakultas Ilmu Sosial dengan dibentuknya Majelis Ilmu-Ilmu Sosial Keindonesiaan (MASISKA). Harapannya proses yang terus berlanjut secara kontinyu dan dinamis ini akan mampu

memberikan pencerahan terhadap peneguhan paradigma ilmu sosial keindonesiaan.

Pimpinan FIS menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para penulis yang telah mencurahkan gagasannya dan berkontribusi mengembangkan ilmu sosial keindonesiaan. Ucapan terimakasih kepada tim editor yang telah mengupayakan untuk tertibnya buku ini. Teriring doa dan harapan menjadi bacaan yang bermanfaat bagi para dosen, mahasiswa, pencinta ilmu yang memiliki perhatian pada tema pendidikan, komitmen keindonesiaan, serta peran pendidikan rekayasa dan transformasi sosial di Indonesia. Buku ini diharapkan mendorong terciptanya iklim akademik yang kondusif dalam mengembangkan ilmu-ilmu sosial keindonesiaan.

Akhirnya, kepada para pembaca disampaikan selamat menikmati, semoga mendapatkan seteguk air pelepas dahaga keilmuan dan inspirasi untuk menuju kejayaan indonesia yang dicita-citakan, Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Indonesia yang berdaulat dalam pengembangan ilmu, termasuk ilmu-ilmu sosial.

Yogyakarta, September 2017

Prof. Dr. Ajat Sudrajat

DAFTAR ISI

Cover	<i>i</i>
Kata Pengantar	<i>ii</i>
Daftar Isi	<i>iii</i>
1 Tapak-Tapak Kecil Indigenisasi Ilmu-Ilmu Sosial: Pengalaman Membangun Diskursus Alternatif di Fakultas Ilmu Sosial UNY <i>Ajat Sudrajat dan Nasiwan</i>	<i>1</i>
2 Globalisasi Ilmu Pengetahuan: Bagaimana dengan Ilmu-Ilmu Sosial dan Identitas Nasional? <i>Ravik Karsidi dan Pawito</i>	<i>39</i>
3 Pembelajaran Ilmu-Ilmu Sosial yang Bercorak Keindonesiaan <i>Warsono</i>	<i>52</i>
4 Peta Teori Ilmu Sosial dan Posisi Ilmu Sosial Keindonesiaan <i>Cahyo Pamungkas</i>	<i>65</i>
5 Merajut Ilmu Sosial Keindonesiaan melalui Penelitian Kearifan Lokal <i>Hastuti</i>	<i>105</i>
6 Penemuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara melalui <i>Local Wisdom</i> Masyarakat Jawa <i>Eny Kusdarini</i>	<i>121</i>
7 Pemanfaatan Kearifan Lokal untuk Revitalisasi Teori Komunikasi Berperspektif Keindonesiaan <i>Suranto Aw</i>	<i>140</i>
8 Indegeneousisasi Ilmu Sejarah <i>Danu Eko Agustinova</i>	<i>149</i>
9 Merdeka dari Ilmu Sosial Barat <i>Benni Setiawan</i>	<i>165</i>
10 Konstruksi Sosial dalam Administrasi Publik di Indonesia <i>Pandhu Yuanjaya</i>	<i>182</i>

1

Tapak-Tapak Kecil Indigenisasi Ilmu- Ilmu Sosial: Pengalaman Membangun Diskursus Alternatif di Fakultas Ilmu Sosial UNY¹

Ajat Sudrajat² dan Nasiwan³

Dalam sebuah acara Seminar Nasional di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) setahun yang lalu, tahun 2016, ada sebuah pertanyaan yang diajukan dari seorang peserta pada forum seminar tersebut kepada pembicara⁴ terkait dengan pilihan paradigma yang direkomendasikan untuk dapat dipakai di kampus-kampus Indonesia. Apakah mau menempuh *route (road map)* sebagaimana telah ditempuh oleh peradaban Barat atau menempuh *road map* perjalanan keilmuan Islam? atau mau menempuh jalan alternatif?

¹ Makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Tanggal 4 Mei 2017, Meneguhkan Ilmu -Ilmu sosial KeIndonesiaan.

² Dekan dan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

³ Dosen pada Jurusan Pendidikan IPS dan Dewan Pakar MASISJKA (Majleis Studi Ilmu Ilmu Sosial keIndonesiaan), Fakultas Ilmu Sosial Univfersitas Negeri Yogyakarta

⁴ Prof. Sri Edi Ahimsa dan Dr. Nasiwan

Sampai akhir seminar jawaban atas pertanyaan tersebut nampaknya belum ada jawaban dan penjelasan akademik yang memuaskan. Jawaban yang diberikan dan tanggapan peserta seminar masih didominasi pada aras normatif dan lebih mencari jalan tengah. Konsistensi untuk memilih suatu pandangan tertentu misalnya untuk membangun suatu diskursus alternatif, masih harus diuji oleh perjalanan waktu.

Tulisan ini hadir berikhtiar untuk meneruskan diskusi tersebut serta berusaha untuk memberikan jawaban yang lebih memadai. Mengikuti perspetif di atas, paling tidak tersedia tiga route perjalanan yang dapat ditempuh; pertama menempuh route perjalanan keilmuan sebagaimana telah diperlihatkan oleh perjalanan ilmu dalam peradaban Barat, yang telah terbukti mengantarkan kemajuan yang dicapai oleh peradaban manusia modern dengan segala plus-minusnya. Kedua Mengikuti *route* perjalanan keilmuan Islam dengan segala kontribusi dan keterbatasannya. Atau pilihan ketiga menempuh route baru diluar dua route yang disebut dengan diskursus alternatif.⁵

Dengan berbagai pertimbangan yang memungkinkan Fakultas Ilmu Sosial UNY telah mengambil keputusan untuk menempuh *route* alternatif yang telah dimulai jejak langkahnya sejak tahun 2012. Terkiat momentum untuk memilih route alternatif antara lain diilhami oleh sebuah buku yang ditulis oleh Prof. Farid Al Atas terkait tema besar Diskursus Alternatif diterbitkan oleh Mizan. Pada tahun 2012 juga didesain suatu seminar Nasional dengan mengangkat tema indigenisasi Ilmu-

⁵ Hasan Hanafi dan Muhaamad 'Abid Al Jabiri, 2015, *Dialaog Timur & Barat*, Yogyakarta, IRCIsod. Lihat juga Adian Husaini, 2015, *Wajah Peradaban Barat dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*, Jakarta, Gema Insani.

Ilmu sosial di Indonesia, dengan menghadirkan Prof. Farid al Atas, dari National University of Singapura.

Ada argumen yang dapat dikemukakan berkaitan dengan perlunya dihadirkan diskursus alternatif dalam pengembangan Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia. Point-point penting dari argumen tersebut dapat dikemukakan di bawah ini;

1. Ketegantungan akedemik
2. Ketergantungan dana
3. Ketergantungan metodologi
4. Ketergantungan publikasi
5. Ketergantungan teori
6. Ketergantungan perspektif, topik-topik, isu-isu penelitian.⁶

Kondisi ketergantungan akademis tersebut diiikuti juga oleh kondisi mental kebanyakan cendekiawan –kaum terpelajar di negara- negara berkembang yang masih mengidap semacam sindrom *Captive mind*. Yakni suatu kondisi mentalitas yang merasa tidak berdaya, terbelenggu, merasa dan berfikir tidak mungkin melahirkan ide-ide pemikiran, teori, konsepsi yang mengguli peradaban Barat. Fenomena ini oleh intelektual terkemuka Indonesia Dawam Rahardjo, disebutnya sebagai Fenomena Kemiskinan Pemikiran.⁷

Menghadapi kondisi kehidupan keilmuan yang diwarnai *captive mind* dan kemiskinan pemikiran, jalan keluar apa yang

⁶ Lihat, Parid Al Atas, *Diskursus Alternatif Ilmu-Ilmu sosial*, Jakarta, Mizan.

⁷ M Dawam Rahardjo, *Kemiskinan Pemikiran dalam Kajian Islam di Indonesia* Pengantar dalam Syarifuddin jurdi, 2017, *Sosiologi Profetik Paradigma Islam untuk Studi Sosial Kemanusiaan*, Yogyakarta. Gramasurya,

bisa diusulkan untuk mengatasinya? Menurut hemat penulis paling tidak ada 4 langkah yang ditempuh yaitu;

Pertama, melakukan kegiatan *review* menyeluruh teori-teori untuk menemukan substansi teori-teori sosial Barat, membaca secara cermat letak keunggulan dan kelemahan perspektif teori Sosial Barat. *Kedua*, melakukan *review* menyeluruh pada khasanah teori sosial dan pemikiran dari Timur (Islam) untuk memahami substansi pemikiran sosial Timur, mengetahui dengan detail letak keunggulan dan keteratasannya. *Ketiga*, melakukan studi komparatif antara pemikiran sosial Barat dan Timur untuk mendapatkan benang merah, point-point penting pemikiran sosial yang lebih inovatif yang memiliki potensi besar untuk dipakai memecahkan berbagai persoalan sosial. *Keempat*, merumuskan problema substansial-akar-akar persoalan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Kelima Melakukan studi dan penelitian yang serius berjangka panjang untuk menemukan Teori-teori Sosial Alternatif dengan meneruskan serta memadukan langkah ketiga studi komparatif dengan mengkontekstkan dengan problema *real* yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.⁸

Tapak-Tapak Diskurus Alternatif

Uraian berikut diketengahkan tentang langkah-langkah secara konsepsional untuk menempuh route jalur alternatif. Jalur alternatif itu dimulai dengan napak tilas Ilmu Sosial Profetik (ISP), dengan memperkuat basis nilai-nilai

⁸ Lihat Al Faruqi, *Islamisasi Ilmu*. Bandung, Mizan. Al Faruqi menawarkan langkah-langkah yang lebih rinci dalam proyek besar Islamisasi Ilmu pengetahuan. Ada 12 langkah yang diusulkan untuk Islamisasi Ilmu Pengetahuan.

keindonesiaan. Konteks kelahiran ISP jika dikaitkan dengan diskursus perkembangan ilmu-ilmu sosial adalah berhubungan dengan suatu kondisi yang sering dilukiskan adanya semacam fenomena stagnasi, kemandegan ilmu-ilmu sosial, situasi terpinggirnnya peran ilmu-ilmu sosial minus ilmu ekonomi dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak tahun 1970-an hingga sekarang. Ilmuwan sosial di Indonesia tidak berhasil memproduksi konsep-konsep, teori atau perspektif yang mampu memberikan kontribusi bagi pemecahan-pemecahan problema yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan seperti konflik horizontal, konflik vertikal, krisis kepemimpinan, fragmentasi sosial, krisis tercerabutnya akar budaya dan nilai-nilai keindonesian, menurunnya ikatan nasionalisme, menguatnya semangat ethnonasionalisme dan ethnosentrisme. Pendek kata ilmuwan sosial dan ilmu-ilmu sosial dianggap telah gagal dan terpinggirkan dari proses besar pembangunan bangsa Indonesia. Kalaupun masih ada peran yang tersisa adalah peran-peran yang lebih berfungsi untuk memberikan legitimasi kebijakan yang telah diambil oleh rezim yang sedang berkuasa. Dalam waktu yang panjang peran ilmuwan dan ilmu-ilmu sosial telah digantikan oleh dominasi rezim yang berkuasa.

Hal lain yang melatarbelakangi kelahiran Ilmu Sosial Profetik ialah adanya dominasi pemikiran Ilmu Sosial Akademis yang berasal dari Amerika Serikat. Yakni melalui apa yang disebut dengan Fungsionalisme. Paham ini bersumber pada adanya optimisme pada sistem Amerika Serikat. Pada perkembangan selanjutnya Fungsionalisme dianggap sebagai satu-satunya Ilmu Sosial yang akademis dan objektif dan empiris, dengan tokohnya Talcott Parsons. Fungsionalisme sangat menekankan pada sistem, ekuilibrium, adaptasi, maintenance,

dan latency sehingga ia nampak konservatif. Kondisi tersebut akhirnya menimbulkan kritik pada aliran fungsionalisme dalam ilmu sosial karena aliran ini tidak menekankan pada perubahan dan transformasi. Bersamaan dengan itu juga kebutuhan dari kalangan ilmuwan sosial suatu ilmu sosial yang lebih tanggap terhadap kebutuhan objek penelitian. Hal tersebut dikarenakan fungsionalisme dipandang terlalu murni dan abstrak, sehingga analisis-analisisnya sosialnya mempunyai kaitan yang sangat rendah dengan masyarakat. Disamping itu juga mulai muncul keraguan pada netralitas ilmu sosial empiris (Kuntowijoyo, 2012).

Ilmu Sosial Profetik konteks kelahirannya juga terkait dengan munculnya kritik-kritik terhadap ilmu sosial akademis yang (*value-free*, empiris, analitis, atau liberal) yang kurang memperhatikan nilai, pemisahan antara wahyu-agama dengan ekonomi, agama dengan politik serta agama dengan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan berikutnya aliran yang memisahkan agama dengan ilmu pengetahuan (sekularisme) mendapatkan kritikan dari para pendukung post modernisme yang antara lain menganut prinsip de-differentiation. Post Modernisme tidak menyetujui adanya pandangan yang memisahkan agama dengan ilmu pengetahuan.

Ilmu Sosial Profetik juga memiliki peluang sebagai paradigma baru menggantikan paradigma Marxisme. Ilmu Sosial Profetik memiliki pandangan bahwa kesadaran (*superstructure*) menentukan *structure* dengan rumusan lain kesadaran nilai menentukan struktur ekonomi. Pandangan Ilmu Sosial Profetik ini merupakan kritik pada paradigma Marxisme yang mengikuti perspektif bahwa *structure* (materilah) ekonomi yang menentukan kesadaran nilai. Dengan demikian Ilmu Sosial

Profetik secara kelimuan syah adanya sebagaimana juga ilmu Sosial kritis, yang telah melakukan kritik pada aliran Funfgsionalisme.

Menghadapi krisis ilmu-ilmu sosial di Indonesia, para ilmuwan-beberapa ilmuwan terkemuka seperti Sudjatmoko, Selo Sumardjan, Kuntowijoyo, Dawam Rahardjo- telah mencoba untuk memberikan pandangan dan jalan keluar dari situasi krisis ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Melalui berbagai cara misalnya melalui serangkain seminar, tulisan, buku, jurnal juga organisasi kelimuan sudah berusaha untuk keluar dari kondisi krisis, usaha tersebut ada yang bersifat peraorangan dan ada juga yang melalui organisasi keilmuan. Dalam kaitan ini paling tidak ada dua karya monumental yang telah dihasilkan oleh para ilmuwan Indonesia sebagaimana tercermin dalam dua buku prosiding yakni kemiskinan stuktural dan membangun martabat manusia Indonesia.

Senapas dengan usaha para ilmuwan Indonesia untuk ikut mencarti penjelasan dan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di satu sisi dan kemandegan ilmu-ilmu sosial disisi yang lain, ada seorang intelektual ternama, Prof. Dr. Kuntowijoyo dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, melantarkan gagasan yang kemudian diberi nama Ilmu Sosial Profetik (ISP). ISP hadir untuk memberikan inspirasi dan solusi dari berbagai persoalan kompleks yang dihdapi oleh Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia, suatu kondisi yang oleh Naquib al Atas disebut sebagai *captive mind* (keterbelengguan pemikiran). Dengan kata lain ISP kiranya dapat dinyatakan sebagai anti tesis dari perspekti ilmu-ilmu sosial yang diimport dari Barat tetapi tidak anti Barat.

Konstruksi Ilmu Sosial Profetik (ISP) Berbasis Keindonesiaan

Pengembangan Model Ilmu Sosial Profetik berbasis keindonesiaan dilihat dari sisi level-level indigeneousasi secara sistematis dapat mengikuti langkah-langkah sebagaimana tercermin pada bagan tingkat-tingkat pemribumian ilmu-ilmu Sosial, sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat-Tingkat Pemribumian Ilmu-Ilmu Sosial

No	TINGKAT	KETERANGAN
1	Meta-teoretis <i>(Meta-theoretical)</i>	Pemribumian merujuk pada pengungkapan dan analisis pandangan dunia (<i>worldviews</i>), ideologi, dan asumsi-asumsi filosofis yang memayungi ilmu-ilmu sosial dan produk-produknya.
2	Teoretis <i>(Theoretical)</i>	Pemribumian mengacu pada teori atau konsep yang dibangun dari pengalaman historis masyarakat pribumi yang telah dipraktikkan.
3	Empiris <i>(Empirical)</i>	Pemribumian fokus untuk mengkaji masalah masalah aktual yang dihadapi komunitas lokal yang sebelumnya kurang mendapat perhatian, misalnya topik-topik mengenai korupsi, imperialisme budaya, dan lain-lain.
4	Aplikasi (<i>Applied</i>)	Pemribumian termanifestasi pada langkah spesifikasi kebijakan, program, dan kegiatan, serta sosialisasi impementasi.

Memperhatikan level-level pembumian ilmu-ilmu sosial, sebagaimana digambarkan dalam bagan di atas kiranya dapat dinyatakan bahwa Pengembangan Model Ilmu Sosial Profetik berbasis Indigeneousasi Ilmu-ilmu Sosial yang dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, adalah meliputi keempat level yakni baik pada level meta teoritis, teoritis, empiris dan aplikasi. Mengapa demikian karena dari hasil pencermatan yang dilakukan di FIS tidak sekedar sosialisasi (aplikasi) dari gagasan tentang Ilmu Sosial Profetik dan gagasan

tentang indigeneousasi, tetapi lebih dari itu juga terkait dengan penelusuran landasan filosofis (ontologi, epistemologi dan aksiologi) dari Pengembangan Model Ilmu Sosial Profetik yang dirancang di FIS. Dalam konteks ini juga dikembangkan pedoman penyusunan Syllabus, penyusunan *draft syllabus* dalam dua model yakni *syllabus* yang mandiri (substantif) dan Syllabus Ilmu Sosial Profetik terintegrasi (reflektif), juga dikembangkan Rencana Program Pembelajaran (RPP).

Penelitian ini mengikuti perspektif Ilmu Sosial Profetik (ISP) yang dikembangkan oleh Kunto Wijoyo -cendekiawan dari Fakultas Ilmu Sosial Budaya UGM Yogyakarta. Secara esensial gagasan Kuntowijoyo tentang ISP dapat diringkaskan dalam bagan sebagai berikut:

Tabel 2. Pemikiran Kuntowijoyo: Ilmu Sosial Profetik

No	Aspek	Pemikiran
1.	Konteks umum pemikirannya	Krisis Ilmu Sosial Indonesia dan Krisis Pemikiran Ilmu Sosial dalam Islam
2.	Fokus kajian dalam ilmu sosial	Mengembangkan kajian Paradigma Islam dan Ilmu Sosial Profetik (ISP)
3.	Keterkaitan dengan ilmu sosial sebelumnya	ISP ini sebagai kritik atas ilmu sosial yang telah ada; kritik atas teologi transformatif; dan Kritik atas “teologi pembebasan”
4.	Pandangan tentang hubungan ilmu dan ideologi (Pancasila)	1. Pancasila merupakan objektivikasi Islam 2. Pancasila dapat dijadikan landasan bagi <i>humanisasi, liberasi, dan transendensi</i> ilmu
5.	Fokus kajian ilmu sosial	Ilmu sejarah
6.	Konsep kunci yang ditawarkan dalam pengembangan Ilmu Sosial di Indonesia	Ilmu Sosial Profetik (ISP)
7.	Landasan metafisik terutama masalah hakikat Masyarakat (sosialitas)	Berangkat dari konsep manusia terbaik, adalah: 1. menyuruh kepada yang ma’ruf (<i>humanisasi</i>), 2. mencegah yang munkar (<i>liberasi</i>), dan 3. beriman kepada Tuhan (<i>transendensi</i>)
8.	Landasan epistemologis	Mengakui adanya wahyu sebagai sumber pengetahuan. Agenda riset : 1. humanisasi, 2. liberasi, dan 3. transendensi
9.	Landasan aksiologis	1. Mengakui pertautan antara ilmu dan nilai 2. Islam adalah sumber nilai bagi ilmuwan sosial Indonesia. Pancasila merupakan objektivikasi dari pemikiran Islam di Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan nilai keislaman. 3. Teleologis : humanisasi, liberasi, dan transendensi

Sumber: Heri Santoso, 2011, “Reinterpretasi dan Revitalisasi Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pengembangan Ilmu Sosial di Indonesia: Studi kasus pemikiran Notonagoro, Mubyarto, dan Kuntowidjoyo”, *Makalah Kongres III Pancasila*, Surabaya.

Gagasan Kuntowijoyo tentang Ilmu Sosial Profetik dikerangkai oleh empat konsep utama yakni konsep transendensi, liberasi, humanisasi dan emansipasi. Point-point elaborasi gagasan Kuntowijoyo tentang Ilmu Sosial profetik terkait dengan Sistem Sosial, Sistem Ilmu Pengetahuan, sistem ekonomi dan Sistem Politik.

Tabel 3. Pilar dan Indikator ISP Berbasis Keindonesiaan
(Diadaptasi dari M. Roqib, Berdasarkan Karya Ahmad Tohari)

PILAR	INDIKATOR	KETERANGAN
Humani- sasi	<ol style="list-style-type: none">1. Menjaga persaudaraan meskipun berbedaa agama, status sosial, dan tradisi;2. Memandang sebagai satu kesatuan yang utuh;3. Menghindari berbagai bentuk kekerasan; dan4. Membuang jauh prasangka dan rasabenci kepada pihak lain.	Dalam konteks sosiologis, humanisasi lebih didahulukan daripada liberasi dan transendensi.
Liberasi	<ol style="list-style-type: none">1. Memihak kepada kaum tertindas;2. Menegakkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan3. Memberantas kebodohan dan keterbelakangan.	Kebodohan pangkal kesengsaraan manusia. Tanpa ilmu tidak akan mampu membebaskan diri dari kebodohan dan kemiskinan.
Transend- ensi	<ol style="list-style-type: none">1. Mengakui adanya Tuhan;2. Mendekatkan diri dan ramah dengan lingkungan hidup yang dimaknai sebagai ciptaan Tuhan;3. Selalu berusaha untuk memperoleh kebaikan Tuhan;4. Memahami segala kejadian dengan pendekatan ketuhanan;5. Mengaitkan segala kejadian dengan ajaran agama;6. Melakukan sesuatu disertai harapan untuk kebaikan akhirat; dan7. Menerima ketentuan Tuhan dengan penuh ridla.	Keyakinan terhadap Tuhan tetap akan ada. Kegiatan dan perilaku manusia dalam berbagai kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya harus mendasarkan diri pada perubahan yang berketuhanan.

Dari penziarahan bagasan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, dimulai sejak tahun 2012 hingga medio tahun 2017, telah melakukan sejumlah langkah-langkah. Pertama, merintis sebuah komunitas *Fistrans Institute*, melalui kegiatan serial diskusi dengan topik-topik yang sistematis (baik pada aras ontologi, epistemologi, aksiologi). Kedua, mendokumenkan hasil dari serial diskusi dalam bentuk buku (sampai tahun ini sudah lahir 5 buku) dan prosiding, antara lain buku gugatan aras penjajahan akademik, teori sosial Indoensia, Delima antara pilihan Ikut Golabalisasi dan Kearafian Lokal. Ketiga, meenginisiasi lahirnya mata kuliah fakultas di FIS untuk mendukung gagasan diskuruss alternatif (Matra kuliah filsafat Ilmu Sosial, Teori-Teori Sosial, Metodologi Penelitian Sosial, Dasar-Dasar Ilmu Sosial Indonesia). Keempat, Menyempurnakan Visi FIS (Renstra) yang melibatkan pemangku kepentingan yang sejalan dengan gagasan Diskursus alternatif, dalam rangka menghasilkan nParadigma Ilmu Sosial Alernatif. Kelima, implementasi gagasan Ilmu sosial Profetik Keindonesiaan dalam melaluin kegaitan penelitain di FIS, Melalui kegiatan pembelajaran secara terbatas.

Inspirasi Berbagai Narasi baru

Indigenous knowledge, demikian istilah yang dipakai oleh CBNRM (Community-Based Natural Resource Management Program) didefinisikan sebagai pengetahuan yang dibangun oleh sekelompok orang sepanjang generasi dalam hubungannya dengan alam. Pada umumnya pengetahuan yang demikian berkembang pada lingkungan lokal dan secara khusus sesuai dengan kepentingan dan keadaan penduduk lokal. Pengetahuan ini berkembang sepanjang waktu dan terus berkembang.

Pengetahuan ini berkembang bersandarkan pada penga-laman, berlaku terus-menerus bahkan berabad-abad, sesuai dengan kebudayaan lokal, dan selalu mengalami dinamika dan perubahan.⁹

Indigenous knowledge kadang-kadang dipertentangkan dengan “pengetahuan ilmiah, pengetahuan Barat, dan pengetahuan internasional” atau “pengetahuan modern” -- pengetahuan yang dikembangkan oleh universitas dan lembaga-lembaga riset dengan menggunakan pende-katan-pendekatan formal ilmiah. Namun demikian, menurut Agrawal, terdapat tumpang tindih antara pengetahuan indigenis dan pengetahuan Barat, dan sangat sulit untuk membedakan diantara keduanya. Apalagi dalam kenyataannya, pengetahuan indigenis selalu berkembang, dan kaang-kadang sulit untuk menentukan apakah pengetahuan atau tekno-logi itu benar-benar indigenis atau mengadopsi dari luar.¹⁰

Sejalan dengan penggunaan istilah *indigenous knowledge* di atas, istilah *indigenization* dipakai dalam kerangka yang hampir senada meskipun dalam perspektif yang lain. Secara etimologis, indigenisasi sepadan dengan istilah pribumisasi atau pempribumian. Terminologi indigenisasi memiliki bermacam-macam makna. Apabila ditinjau dari aspek sosiologis pengetahuan, indigenisasi memiliki makna berbeda-beda di negara yang satu dengan yang lain. Istilah indigenisasi muncul dan berkembang terutama di bekas negara jajahan Barat. Di Filipina misalnya, indigenisasi memiliki dua maka, yakni, pertama, perlunya membangun teori dan metodologi yang lebih

⁹ Steve Langill dan Sam Landon, *Indigenous Knowledge*, Canada: IDRC-Lib, 1998, hlm. 7.

¹⁰ *Ibid.*

cepat untuk memahami masyarakat Filipina dan untuk memecahkan masalah sosial yang dianggap khusus bagi masyarakat; kedua, dimaknai sebagai pembentukan teori dan ‘metode pribumi’ atau metodologi ilmu sosial khas Filipina.¹¹ Dengan demikian, indigenisasi tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga pada tataran metodologis.¹²

Di Malaysia, indigenisasi menemukan bentuknya dalam gerakan ‘domestikasi’ yang dimaksudkan sebagai ‘penjinakan’ terhadap ilmu-ilmu sosial, terutama antropologi dan sosiologi. Penjinakan dilakukan dengan mengorganisasikan ke dalam studi lapangan atau studi antropologis yang bermotif etnis. Kasus indigenisasi yang menjadi domestikasi di Malaysia menunjukkan besarnya intervensi politik dalam kebijakan pengembangan ilmu sosial. Sementara itu, indigenisasi di dunia Islam atau dalam pemikiran Islam sering diidentikkan dengan pengertian Islamisasi ilmu-pengetahuan, yang sekaligus sebagai reaksi atas sekularisasi dan westernisasi ilmu, dengan tokoh utamanya Ismail Raji al-Faruqi.¹³ Terkait dengan Islam di Indonesia, Abdurrahman Wahid, juga pernah melontarkan gagasan ‘domestikasi’ Islam (pribumisasi Islam) dalam menghadapi budaya Indonesia.¹⁴

¹¹ M. Cynthia R Banzon Bautista, “Filipina: Refleksi tentang Perkembangan Ilmu Sosial”, dalam Nico Schutle N dan Leontine Visser, *Ilmu Sosial Di Asia Tenggara: Dari Partikularisme ke Universalisme*, Jakarta: LP3ES, 1997, hlm. 137-139.

¹² Hari Santoso dan Listiyono Santoso, *Filsafat Ilmu Sosial: Ikhtiar Awal Pribumisasi Ilmu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta, Gama Media, 2003, hlm. 54-55.

¹³ Ismail Raji al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, Bandung: Pustaka, 1995.

¹⁴ M. Din Syamsudin, “Tanggapan Ilmuwan Sosial Muslim terhaap Modernisasi Indonesia”, dalam Nico Schutle N dan Leontine Visser, *Ilmu Sosial Di Asia Tenggara: Dari Partikularisme ke Universalisme*, Jakarta: LP3ES, 1997, hlm. 99.

Ignes Kleden, seperti dinyatakan oleh Hari dan Listiyono, pengertian pribumisasi ilmu sosial di Indonesia, dipandang sebagai gerakan partikularisme. Dalam pengertian ini terkandung kecenderungan untuk mengecualikan ilmu-ilmu sosial dari komunitas ilmu sosial internasional. Kecenderungan tersebut disebabkan alasan politis bahwa masalah-masalah sosial suatu bangsa atau negeri tidak dapat dipecahkan oleh komunitas akademis internasional, melainkan harus dipecahkan oleh sarana-sarana lain yang lebih sesuai dengan kekhususan historis kultural dan lokalitas sosio-geografisnya.¹⁵

Indigenisasi: Kegelisahan Intelektual

Dalam rubrik DIALOG, *Prisma* nomor 9 tahun 1984, yang diberi judul “Ilmu Sosial dan Realitas Indonesia”, Taufik Abdullah (Ketua HIPIS Pertama, selama dua periode kepengurusan dari 1974-1979) memberikan ulasan atas permasalahan yang membelit bangsa dan kualitas manusia Indonesia dikaitkan dengan peran yang dimainkan oleh Ilmu-Ilmu Sosial. Menurutnya, teori-teori yang ada sekarang ini, lahir dan berkembang dari kegelisahan dan keprihatinan intelektual yang terjadi di dunia Barat. Teori-teori tersebut lahir dan berkembang di saat Barat sedang berada dalam suatu tahap peralihan dari masyarakat agraris menuju masyarakat kapitalis industri. Ketika negara menempatkan orang dari suasana *primordial* yang akrab ke dalam suasana yang makin *impersonal*, dan juga, di saat optimisme akan kemampuan akal mengalahkan alam belum mereda. Lebih jauh dinyatakannya, dari sudut pandang yang semacam inilah bisa dimengerti bahwa sejak kira-kira sepuluh tahun terakhir ini (1970an) di Asia Tenggara, bahkan di kawasan

¹⁵ Hari Santoso dan Listiyono Santoso, *Filsafat Ilmu ...*, hlm. 55.

Pasifik, hasrat untuk mengadakan *indigenization* atau pribumian konsep dan teori-teori ilmu-ilmu sosial sangat dirasakan.¹⁶

Apa yang dinyatakan Taufik Abdullah di atas sesungguhnya sejalan dengan perbincangan yang muncul pada saat dilakukannya simposium UNESCO dan UN Asia Development Institute pada tahun 1980an yang menyatakan mengenai pentingnya mencari dan memperkuat identitas ilmu sosial Asia; bahaya kolonialisme akademis; perlunya pembebasan pikiran dari penjara yang dibuat untuk Dunia Ketiga; dan pentingnya usaha untuk berdikari dalam ilmu sosial.¹⁷ Sampai-sampai Soedjatmoko dengan tegas mengemukakan, betapa masih terbatasnya pengetahuan kita mengenai keanekaragaman wajah kemiskinan serta ketidaktahuan kita mengenai struktur sosial dan kebudayaan kemiskinan di negeri kita.¹⁸

Gugatan yang senada muncul dari Darodjatun Kuntjoro-Jakti, seraya menyatakan, adalah suatu hal yang ironis tapi merupakan fakta yang terlihat jelas, betapa kalangan cendekiawan Dunia Ketiga, praktis bersikap pasif di hadapan semua persoalan yang melilit dan sedang dihadapi bangsanya. Kalangan yang terdidik ini ternyata praktis tidak ikut serta dalam usaha penyelesaian masalah-masalah besar dari bangsanya, kalau pun mereka terlibat, belum dalam posisi yang

¹⁶ Taufik Adullah, "Ilmu Sosial dan Realitas Indonesia", dalam *Prisma*, Nomor 9, Tahun 1984, Jakarta: LP3ES, 1984, hlm.58-59.

¹⁷ Farchan Bulkin, "Ilmu Sosial dan Dimensi Manusia", dalam *Prisma*, Nomor 9, Tahun 1984, Jakarta: LP3ES, 1984, hlm. 33.

¹⁸ Soedjatmoko, "Dimensi-Dimensi Struktural Kemiskinan", dalam Alfian dkk. (ed.), *Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1980, hlm. 50.

orisinal yang benar-benar mewakili kepentingan Dunia Ketiga – sumbangan pikiran yang berupa alternatif pemikiran yang sifatnya merdeka. Kaum cendekiawan “dunia ketiga” belum melahirkan pemikiran-pemikiran alternatif yang merupakan tandingan dari pemikiran Barat.¹⁹

Lebih lanjut dinyatakan Darodjatun, bahkan yang lebih ironis, ilmuwan “dunia ketiga” mengoper secara lengkap keseluruhan rincian sistem dan praktiknya, sementara para cendekiawan Barat memper-tanyakan ‘relevansinya’ dari pikiran mereka yang terdahulu, dan mereka pun bahkan sudah meninggalkannya. Kenyataan yang demikian menimbulkan kesan bahwa seolah-olah para cendekiawan Dunia Ketiga tersebut bukan hanya ‘statis’ tetapi juga ‘enggann berubah’, bahkan tidak ingin repot berpikir dua atau tiga kali untuk menyesuaikan ilmu ‘kulakan’nya dengan konteks negaranya. Padahal, hanya dengan mempertimbangkan sasaran, konteks, dan memberikan alteratif, kesan bahwa cendekiawan “dunia ketiga” seperti sekumpulan “orang Barat” di “dunia timur” mestinya dapat dihindari.²⁰

Setelah sekian lama atau setelah 30 tahun berlalu sejak keresahan, kegelisahan, kerisauan, dan sekaligus kesadaran intelektual itu muncul, maka pertanyaan yang mengemuka sekarang adalah, sudah sejauh mana para ilmuwan sosial Indonesia memperkuat identitas keindonesiaan dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu sosial? Sudahkah para ilmuwan sosial mampu melepaskan diri dari penjara pola kolonialisme

¹⁹ Darodjatun Kuntjoro-Jakti, “Cendekiawan Dunia Ketiga: Orang “Barat” di Dunia “Timur”, dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (Peny.), *Cendekiawan dan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1984, hlm. 220.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 235.

akademik? Adakah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa para ilmuwan sosial telah memiliki ilmu sosial yang mandiri? Jawaban yang jujur dan terbuka dari pertanyaan-pertanyaan di atas tentu sangat ditunggu.

Kegelisahan itulah yang tampaknya dirasakan juga oleh Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia (MWA UI), KH Said Aqil Siradj. Pada saat terpilih sebagai Ketua MWA UI yang baru, Selasa, 15 Mei 2012, Said Aqil Siradj mengatakan, bahwa “pribumisasi ilmu pengetahuan di Indonesia sudah saatnya dilakukan”. Ilmu pengetahuan yang diperoleh dari luar hendaknya digali secara epistemologi, sehingga bisa dilakukan pembaruan bahkan penemuan baru. Jangan hanya menerima, dan membiarkan bahasa Indonesia menjadi kacau karena kebanjiran istilah asing, ujarinya lebih lanjut. Langkah pribumisasi mesti dilanjutkan untuk menemukan teori-teori baru, baik di bidang sosial, humaniora, maupun eksakta, sehingga, ilmu pengetahuan yang dikembangkan ilmuwan Indonesia bisa melahirkan teknologi yang maju dan setara dengan penemuan bangsa lain.

Lebih lanjut dinyatakannya, bahwa tugas tradisional untuk memajukan perkembangan ilmu pengetahuan dan mendorong perubahan sosial belum bisa dituntaskan oleh perguruan tinggi di negeri ini. Dalam situasi pancaroba semuanya berubah, sementara masyarakat tidak siap menghadapi perubahan tersebut. Situasi seperti ini mengharuskan perguruan tinggi melakukan langkah aksiologis, keluar dari kampus untuk mengkaji solusi berbagai persoalan yang terjadi.

Said Aqil Siradj menantang UI untuk melakukan penggalian epistemologi, melakukan inovasi, dan invensi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Sebagai barometer bagi perguruan tinggi lain di Indonesia, UI diharapkan mampu melakukan pribumisasi ilmu pengetahuan yang diperoleh dari luar. Hilangkan sikap konsumtif dalam bidang teori dan pemikiran. Sudah saatnya akademisi muncul sebagai penggagas ide baru, demikian ditegaskan Said Aqil Siradj.²¹ Kritik terhadap ilmuwan sosial Indonesia selama ini adalah karena mereka terlalu mengagung-agungkan teori Barat dan belum dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada teori Barat tersebut. Padahal, teori Barat tersebut dilahirkan dalam konteks sosio-historis dan sosio-kultural yang berbeda dengan kondisi di Indonesia. Kecenderungan ilmuwan tersebut dapat dipahami jika dikaitkan dengan sejarah pendidikan para ilmuwan sosial Indonesia generasi pertama. Kebanyakan ilmuwan sosial Indonesia adalah hasil pendidikan Barat, terutama Belanda dan Amerika.²² Kondisi ilmuwan sosial Indonesia, seperti disinyalir oleh Ignas Kleden mirip dengan *ilmuwan bazar*, sebagaimana pedagang bazar dalam tindakan ekonomi. Salah satu cirinya antara lain cenderung menjadi pedagang pengecer dan bukan pedagang grosir, ilmuwan sosial juga cenderung mengecer ilmunya sehingga tidaklah terbentuk suatu *body of social science knowledge* yang handal.²³

²¹ *Republika*, "Saatnya Pribumisasi Ilmu Pengetahuan Dilakukan", <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/05/16/m43diu-saatnya-pribumisasi-ilmupengetahuan-dilakukan>, Rabu, 16 Mei 2012.

²² Hanneman Samuel, *Geneologi Kekuasaan Ilmu Sosial Indonesia: Dari Kolonialisme Belanda hingga Modernisme Amerika*, Jakarta: Kepik Ungu, 2010.

²³ Hari Santoso, *Filsafat Ilmu Sosial Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Rasmedia, 2007, hlm. 26.

Kritik yang lebih komprehensif muncul dalam sebuah buku yang ditulis oleh Syed Farid Alatas dengan judul *Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia*, yang diterbitkan Mizan Publika tahun 2010.²⁴ Spirit dari buku tersebut menegaskan bahwa penjajahan akademis adalah fenomena yang setara dengan penjajahan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan itu. Dunia akademik yang terjajah adalah ketika bangsa penjajah berupaya melakukan kontrol atas ilmu pengetahuan di daerah jajahannya. Mereka menciptakan struktur kebergantungan akademis dan berusaha memonopoli penyebaran ide-ide ilmu pengetahuan yang tentu saja bias kepentingan penjajah.²⁵ Bacaan Yanu Endar Prasetyo terhadap buku yang ditulis Syed Farid Alatas menegaskan bahwa Alatas berhasil mendiagnosis dan mengidentifikasi setidaknya delapan persoalan utama yang membelenggu ilmu sosial Asia untuk tumbuh dan berkembang secara universal:

Pertama, adanya bias *Eurosentris*, sehingga ide, model, pilihan masalah, metodologi dan bahkan prioritas riset cenderung semata-mata “membebek” pada karya Amerika, Inggris, Prancis dan Jerman. *Eurosentrisme* adalah sebuah teori sejarah dunia yang menempatkan Eropa sebagai sesuatu yang unik dan superior. Oleh karenanya, terbangun konstruksi yang melegitimasi bangsa Eropa untuk melakukan ekspansi ke seluruh dunia, termasuk melalui ide-ide rasionalisme, kapitalisme hingga pembangunanisme yang justru merintang

²⁴ Syed Farid Alatas, *Diskursus Alternatif Dalam Ilmu Sosial Asia: Terhadap Terhadap Eurosentrisme*, Jakarta: Mizan Publika, 2010.

²⁵ Yanu Endar Prasetyo, “Keluar dari Penjajahan Akademik”, peresensi buku Syed Farid Alatas yang berjudul *Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia*, pada *Harian Republika*.

kemajuan ekonomi, politik dan akademis bagi negara-negara koloninya di Asia. *Kedua*, adanya kecenderungan pengabaian pada filsafat dan sastra lokal. Dalam konteks ini, filsafat khas Timur hanya dijadikan bahan atau objek kajian saja, tetapi tidak pernah berhasil diangkat menjadi sumber untuk konsep-konsep ilmu sosial. *Ketiga*, ilmuwan sosial Asia gagal keluar dari jebakan teori dan metode yang berbau Euro-Amerika. Akibatnya, ilmu sosial Asia sangat kekurangan ide-ide orisinal dalam menumbuhkan perspektif, aliran, konsep atau inovasi dalam metode penelitiannya. *Keempat*, adanya penyakit *mimesis* yang akut, yakni peniruan atau pengadopsian yang tidak kritis terhadap model ilmu sosial Barat. Hal ini menandakan keberhasilan internalisasi gagasan-gagasan Orientalisme dari Barat yang disebarluaskan dan dikonsumsi oleh wilayah yang menjadi objek konstruksi Orientalis. *Kelima*, lahirnya diskursus yang secara esensial memposisikan masyarakat non-Barat itu memiliki ciri yang merupakan kebalikan dari masyarakat Barat, yaitu barbar, terbelakang, dan irasional. *Keenam*, hilangnya sudut pandang minoritas, baik secara etnis maupun kelompok yang terpinggirkan lainnya, dalam catatan-catatan akademis ilmuwan Asia pada umumnya. Ilmu sosial selama ini telah nyata-nyata terdominasi oleh perspektif yang elitis, sehingga tidak berhasil menyuarakan pandangan-pandangan minoritas di Asia sendiri. *Ketujuh*, persekutuan antara akademisi dengan negara. Hal ini tampak dalam peran-peran yang dimainkan disiplin geografi dan antropologi pada masa kolonial yang digunakan oleh negara untuk mempromosikan persatuan, kontrol atas kebijakan, dan penciptaan sebuah kebudayaan nasional. *Kedelapan*, dominasi intelektual Dunia Ketiga oleh kekuatan-kekuatan ilmu sosial Dunia Pertama (AS, Inggris, Prancis). Hal ini dilanggengkan dalam bentuk kebergantungan ide, teori dan

konsep, media gagasan, teknologi pendidikan, bantuan dana, dan investasi pendidikan.

Ilmuwan di Asia tampaknya keasyikan mempelajari masyarakatnya sendiri, tetapi riset-riset tersebut kebanyakan berupa riset empiris yang terkait kebijakan, sehingga sangat minim sumbangannya terhadap pengembangan teori. Dalam situasi demikian, buku yang ditulis Farid Alatas, berusaha untuk menyerukan kembali pentingnya diskursus alternatif dalam tradisi ilmu sosial di Asia. Kebergantungan akademis yang dilanggengkan melalui pelatihan dan kucuran dana riset dari Amerika dan Eropa harus dikurangi. Prioritas tinggi haruslah diberikan guna mengembangkan publikasi lokal seperti jurnal, kertas kerja, dan monograf yang perlahan akan melepaskan kalangan akademisi dari keterikatan tema-tema riset yang didikte oleh muatan publikasi Amerika dan Eropa. Jepang telah memberi contoh yang baik tentang bagaimana melakukan transformasi itu. Jepang tidak melakukan diskriminasi penilaian terhadap terbitan-terbitan di dalam negerinya.

Meskipun buku yang ditulis Farid Alatas sudah sangat sistematis dan disajikan dengan bahasa sesederhana mungkin, tetap saja buku tersebut lebih cocok dibaca oleh mereka yang telah cukup dalam bergelut dengan ilmu-ilmu sosial. Banyaknya contoh kasus yang dikemukakan secara sekilas membuat mereka yang awam akan sedikit kesulitan merangkai contoh-contoh yang disajikan menjadi sebuah gambaran utuh. Meskipun begitu, kehadiran buku tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi kalangan ilmuwan sosial yang siap keluar dari zona

'kemampuan akademik' yang selama ini ternyata berisi peniruan-peniruan belaka yang minim koreksi (*captive mind*).²⁶

Sejalan dengan gagasan Farid Alatas di atas, seruan Said Aqil Siradj yang juga menyuarakan kegelisahan, sudah semestinya diapresiasi, karena studi-studi sosial terhadap Dunia Ketiga cenderung tidak dilakukan secara objektif tetapi mengandung muatan asumsi inferioritas terhadap objek yang mereka teliti sehingga perumusan teori juga akan sangat dipengaruhi oleh posisi negara penjajah dan terjajah. Sebagai contoh gejala *Eurosentrimse* dalam studi sosial, adalah penelitian yang dilakukan oleh ilmuan Belanda terhadap masalah kemiskinan yang merajalela di pedesaan-pedesaan di daerah Jawa akhir abad ke-19. J.H. Boeke, ahli sosiologi dan antropologi ekonomi di Universitas Leiden, sebagai universitas yang paling maju dalam kajian *indologi*, memimpin penelitian tersebut. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kemiskinan masyarakat pedesaan di Jawa disebabkan kekalahan mereka dalam persaingan ekonomi akibat dari mentalitas yang rendah dalam aktivitas ekonomi, yaitu sifat malas.²⁷ Sementara itu, fakta-fakta sosial lainnya seperti pemerasan dan eksploitasi kaum penjajah, dan pemiskinan secara terstruktur seperti rendahnya dukungan pendidikan bagi masyarakat tidak dijadikan indikator dan fokus studinya dalam merumuskan faktor penyebab kemiskinan tersebut, demikian penilaian Yudi Ahmad Faisal.²⁸

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Heri Santoso, *Filsafat ...*, hlm. 13.

²⁸ Yudi Ahmad Faisal, "Ilmu Sosial dan Hegemoni Barat", <http://sosbud.kompasiana.com/2011/01/23/ilmu-sosial-dan-hegemoni-barat/23> January 2011.

Ilmu Sosial Transformatif (Model Purwo Santoso)

Sebagai lembaga pengembangan ilmu, dalam pandangan Purwo Santoso, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin komunitas keilmuannya memiliki kapasitas tinggi dalam menyerap dan mengembangkan ilmu. Namun, pada kenyataannya, ada sejumlah orang yang mengatakan bahwa ilmu di negeri ini mengalami *kemandegan*, dan ada juga yang menilai terlilit krisis. Gejalanya antara lain tampak pada minimnya kontribusi para ilmuwan sosial Indonesia dalam pengembangan ilmu, baik di tataran teoritik maupun metodologis. Ilmuwan sosial di negeri ini masih terkesan dan terhipnotis oleh para teoritikus asing. Ketika berdebat tentang kondisi keindonesiaan, pada umumnya, rujukan mereka adalah hasil pemikiran para *Indiolog* atau *Indonesianis non-Indonesia*, semisal teori *dual society* yang dirumuskan Booke, teori politik aliran yang ditawarkan Herbert Feith dan Lance Castle, dan ada teori tentang kekuasaan dalam masyarakat Jawa yang ditawarkan oleh Benedict Anderson,²⁹ demikian pula dengan konsep Geertz tentang abangan, santri, dan priyayi dalam masyarakat Jawa³⁰

Hal pertama yang disasar oleh Purwo Santoso dan dianggap menjadi penyebab lemahnya daya kritis para sarjana perguruan tinggi, baik S1, S2, dan S3, antara lain terkait dengan model pembelajaran yang dilakukan perguruan tinggi selama ini. Untuk menjelaskan kenyataan ini, Purwo merujuk pada studi Carlile tentang sistem informasi yang dilakukan dalam hubungan antar bangsa, yaitu adanya tiga derajat *learning organization*: (1)

²⁹ Purwo Santoso, *Ilmu Sosial Transformatif*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, pada tanggal 19 April 2011, hlm. 3.

³⁰ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.

sintaktis, (2) semantik, dan (3) transformatif.³¹ Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam derajat pembelajaran model *sintaktis*, perhatian utama adalah ketepatan menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran. Mereka hanya mentransfer ilmu dan memproses informasi secara apa adanya. Komunitas yang terlibat tidak hirau akan persoalan metodologis. Belajar pada dasarnya adalah hanya untuk *meniru dan meniru*. Obsesi mereka adalah penguasaan ontologis dalam bidang ilmunya. Tataran kedua adalah pembelajaran model *semantik*. Pada tataran ini terjadi proses penafsiran terhadap fenomena atau teori-teori dari pada sekedar hanya menerima. Ada keberanian untuk melakukan penafsiran atau memahami makna yang tersirat di balik fenomena. Proses menafsir memang berisiko terjadinya kesalahan, tetapi pada saat yang sama juga berpotensi menghasilkan pengetahuan baru berkat kecanggihan atau kepiawaian metodologi keilmuan.

Sedangkan pembelajaran model *transformatif* ditandai oleh kemampuan mengambil manfaat berdasarkan kebutuhan yang jelas dan pada saat yang sama paham, fasih dalam menghayati, dan menerapkan metodologi yang tersedia. Berangkat dari kesadaran konteks dan pemahaman akan berbagai peluang yang terbuka, mereka terus menerus terlibat dalam upaya memajukan ilmu pengetahuan. Boleh jadi, salah satu penyumbang kemendegan ilmu sosial di Indonesia karena model pembelajarannya yang masih berwatak sintaktis. Pembelajaran yang berlangsung di perguruan tinggi sekedar untuk menyampaikan dan memberi tahu suatu teori dan tahu lebih banyak teori-teori. Ilmuwan sosial di sini, khususnya para

³¹ Purwo Santoso, *Ilmu Sosial ...*, hlm. 4.

dosen di perguruan tinggi, hanya berfungsi sebagai perantara yang mengoper ilmu-ilmu yang telah diperolehnya untuk disampaikan kepada para mahasiswa. Untuk menggairahkan pengembangan ilmu sosial, model pembelajaran yang mestinya dikembangkan di perguruan tinggi adalah model yang *transformatif*.

Hal kedua yang disasar dan menjadi tema utama dari pemikiran Purwo Santoso adalah apa yang disebutnya sebagai ilmu sosial transformatif. Ilmu sosial yang dimaksud di sini mencakup berbagai disiplin, termasuk Sosiologi, Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi, Antropologi, Sejarah, Ilmu Hukum dan seterusnya. Istilah *transformatif* di sini dipakai dalam pengertian yang longgar, sekadar untuk menandai cara kerja ilmuwan yang tidak hanya berjuang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya sendiri, namun peduli. Sungguh pun demikian, ilmu sosial transformatif bukanlah ilmu tentang ketrampilan (vokasi). Watak transformatif ilmu sosial bukan ditentukan oleh ketrampilan teknis, melainkan ditentukan oleh komitmennya untuk mewujudkan realitas baru sesuai dengan yang diteorikannya.³²

Watak *transformatif* tersebut tentu harus didasari dengan kejelasan pilihan epistemologisnya. Oleh karena itu, dalam pengembangan ilmu sosial transformatif, keberadaan metode keilmuan yang mengedepankan obyektivitas tidak harus ditolak, namun harus disadari kenaifannya. Kemudian dicarikan cara untuk mengkompensasi keperluannya untuk transformatif. Watak transformatif juga ditentukan oleh pilihan aksiologisnya. Ilmu sosial dikembangkan bukan sekadar akumulasi teori,

³² Purwo Santoso, *Ilmu Sosial ...*, hlm. 7.

melainkan juga untuk memperbaiki relasi sosial yang terjalin. Dan akhirnya, menghasilkan realitas sosial yang dinilai jauh lebih baik. Misal, ketika membahas *good governance*, maka kepeduliannya bukan hanya pada ukuran dan ciri-ciri *good governance*, melainkan sampai pada menghasilkan perilaku bersama yang memenuhi ukuran dan ciri-ciri yang dimaksud.³³

Untuk menuju pengembangan ilmu sosial transformatif ini perlu dipertimbangkan pentingnya *support system* dalam pengembangan kapasitas metodologis. Menurutnya, ada contoh yang bisa menjadi rujukan yaitu *London School of Economics and Political Science* yang mendirikan *Methodology Institute*. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengawal kompetensi metodologi keilmuan dan metode penelitian civitas akademiknya. Setidaknya semua dosen dan kandidat doktor harus belajar di lembaga ini, meskipun tidak harus mengumpulkan SKS. Selanjutnya diperlukan langkah-langkah konkrit yang menjadi agenda kolektif, antara lain: (1) pengrajin jejaring ilmuwan atau *social crafting*; (2) mobilisasi kegelisahan; (3) konversi kegelisahan menjadi karya-karya dan amal ilmiah, serta; (4) reproduksi tapak akademik menjadi kultur akademik.

Sekali lagi, ketrampilan *social crafting* sangat diperlukan untuk menggalang agenda yang berbasis kegelisahan kolektif dalam komunitas keilmuan yang ada. Tokoh-tokoh kunci dalam komunitas yang ada dituntut untuk mengoptimalkan kepemimpinannya demi menghasilkan karya-karya yang menjawab tantangan yang telah dirumuskan. Lebih dari itu, perlu inovasi untuk memungkinkan produk-produk keilmuannya

³³ *Ibid.*, hlm. 9.

dapat dibaca dan disajikan ke hadapan publik.³⁴ Sebagai contoh, di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta misalnya, sejak dua tahun lalu, telah didirikan sebuah forum yang diberi nama Forum Ilmu Sosial Transformatif (*FISTrans Institute*). Forum ini secara berkala melakukan diskusi bulanan dan pada saat tertentu menyelenggarakan seminar nasional dengan mengundang para narasumber yang memiliki kapasitas. FISTrans Institute antara lain telah menghadirkan Prof. Syed Farid Alatas (Universitas Nasional Singapura) dan Prof. Dr. Purwo Santoso (Fisipol UGM). Meskipun masih dalam bentuk pencarian format, FISTrans Institute sudah melahirkan dua buah buku dengan judul: (1) *Menuju Indigenisasi Ilmu Sosial Indonesia: Sebuah Gugatan atas Penjajahan Akademik*, dan (2) *Membongkar Hegemoni Negara Kapitalis atas Negara Berkembang: Mozaik Pemikiran Ilmu Sosial Profetik*.³⁵

Ilmu Sosial Profetik (Model Kuntowidjoyo)

Gagasan munculnya ilmu sosial profetik, bermula dan diawali dengan munculnya perdebatan di sekitar pemikiran Muslim Abdurrahman mengenai istilah Teologi Transformatif. Istilah ‘teologi’ yang digunakan di sini, adalah dimaksudkan agar agama diberi tafsir baru dalam rangka memahami realitas. Selanjutnya, metode yang efektif untuk maksud tersebut adalah dengan mengelaborasi ajaran-ajaran agama ke dalam bentuk suatu teori sosial. Lingkup yang menjadi sasaran dari pemikiran ini adalah lebih pada rekayasa sosial untuk transformasi sosial. Namun demikian, penggunaan istilah ‘teologi’ di sini, tampaknya, mengundang banyak pertanyaan, karena banyak yang

³⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

³⁵ Ajat Sudrajat, *Laporan Tahunan Dekan FIS UNY pada Dies Natalis Ke-48 FIS UNY*, Yogyakarta: FIS UNY, 2013.

memahaminya dalam kerangka aspek-aspek normatif yang bersifat permanen seperti pada pemahaman terhadap Ilmu Kalam atau Ilmu Tauhid. Untuk menghindari problem istilah yang berkepanjangan, Kuntowijoyo, dengan memperhatikan lingkup yang menjadi garapan adalah aspek yang bersifat empiris, histori, dan temporal, menurutnya sebutan ‘ilmu sosial’ lebih bisa diterima tanpa harus diberi pretensi doktrinal.

Sampai di sini, munculah gagasan ‘Ilmu Sosial Transformatif’. Namun demikian, gagasan ini harus dibedakan dengan gagasan yang muncul belakangan yang dikemukakan Purwo Santoso di atas, yang merupakan judul pidato pengukuhan guru besarnya pada tahun 2011. Dalam benak-pikiran Kuntowijoyo selanjutnya, ilmu sosial yang bagaimanakah yang dapat dipakai untuk melakukan transformasi sosial?. Ilmu sosial tranformatif yang tergambar dalam pikiran Kuntowijoyo adalah ilmu sosial yang tidak seperti ilmu-ilmu sosial akademis maupun ilmu-ilmu sosial kritis, yang tidak berhenti hanya untuk menjelaskan fenomena sosial, namun juga berupaya untuk mentransformasikannya. Tapi kemudian muncul persoalan, ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa?. Sampai di sini, menurut Kuntowijoyo, ilmu-ilmu sosial transformatif tidak bisa memberikan jawaban yang jelas.³⁶

Dalam rangka menjawab pertanyaan itulah, Kuntowijoyo mengemukakan bahwa yang dibutuhkan sekarang ini adalah ilmu-ilmu sosial profetik, yaitu yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. Oleh karena itu, ilmu sosial sosial profetik tidak sekedar

³⁶ Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006, hlm. 86.

mengubah demi perubahan, tetapi mengubah berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Dalam pengertian ini, maka ilmu sosial profetik secara sengaja memuat kandungan nilai-nilai dari cita-cita perubahan yang diidamkan masyarakatnya.

Menurutnya, perubahan itu semestinya didasarkan pada cita-cita humanisasi-emansipasi, liberasi, dan transendensi. Tiga muatan nilai ini, ia ambil dari kandungan yang ada dalam QS Ali 'Imran (3), ayat 110: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...". Tiga muatan inilah yang menjadi ciri ilmu sosial profetik. Dengan kandungan nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi, ilmu sosial profetik diarahkan untuk rekayasa masyarakat menuju cita-cita sosio-etiknya di masa depan.³⁷

Gagasan ilmu sosial profetik, dalam pengakuan Kuntowijoyo, sebenarnya juga diilhami oleh pemikiran Muhammad Iqbal, khususnya ketika Iqbal berbicara tentang peristiwa mi'raj Nabi Muhammad saw. Seandainya Nabi Muhammad saw adalah seorang mistikus atau sufi, kata Iqbal, tentu beliau tidak ingin kembali ke bumi, karena telah merasa bersatu dengan Tuhan dan berada di sisi-Nya. Justru, yang terjadi adalah, Nabi Muhammad saw kembali ke bumi untuk menggerakkan dan melakukan perubahan sosial, untuk mengubah jalannya sejarah. Nabi Muhammad saw mulai melakukan transformasi sosial budaya berdasarkan cita-cita profetik.³⁸ Tiga nilai yang menjadi muatan ilmu sosial profetik dijelaskan lebih lanjut oleh Kuntowijoyo sebagai berikut:

³⁷ *Ibid.*, hlm. 87.

³⁸ *Ibid.*

Pertama, tujuan *humanisasi* adalah memanusiaikan manusia. Ia melihat terjadinya proses dehumanisasi yang menimpa masyarakat dewasa ini. Masyarakat industrial yang sedang berjalan sekarang ini telah menempatkan manusia berada dalam masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Manusia mengalami objektivasi ketika berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar. Ilmu dan teknologi juga telah membantu kecenderungan reduksionalistik yang melihat manusia dengan cara parsial.

Humanisasi model Kuntowijoyo, menurut penjelasan dalam Wikipedia, sesuai dengan semangat liberalisme Barat. Hanya saja perlu segera ditambahkan, jika peradaban Barat lahir dan bertumpu pada humanisme antroposentris, konsep humanisme Kuntowijoyo berakar pada humanisme teosentris. Karenanya, humanisasi tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendensi yang menjadi dasarnya.³⁹

Kedua, tujuan *liberasi* adalah pembebasan dari kekejaman kemiskinan struktural, keangkuhan teknologi, dan pemerasan kelimpahan. Banyak orang yang terperangkap dalam kesadaran teknokratis dan tergusur oleh ekonomi raksasa. Oleh karena itu, manusia harus bisa membebaskan diri dari belenggu-belenggu yang dibangunnya sendiri.

Liberasi dalam ilmu sosial profetik, seperti dipaparkan dalam Wikipedia, juga sejalan dengan prinsip yang ada dalam faham sosialisme (marxisme, komunisme, teori ketergantungan, dan teologi pembebasan). Hanya saja ilmu sosial profetik tidak hendak menjadikan liberasinya sebagai ideologi sebagaimana

³⁹ Wikipedia, "Ilmu Sosial Profetik", diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_Sosial_Profetik.

komunisme. Liberasi ilmu sosial profetik adalah dalam konteks ilmu, ilmu yang didasari nilai-nilai luhur transendental. Jika nilai-nilai liberatif dalam teologi pembebasan dipahami dalam konteks ajaran teologis, maka nilai-nilai liberatif dalam ilmu sosial profetik dipahami dan didudukkan dalam konteks ilmu sosial yang memiliki tanggung jawab profetik untuk membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan kelimpahan, dominasi struktur yang menindas dan hegemoni kesadaran palsu.⁴⁰

Ketiga, tujuan *transendensi* adalah menambahkan dimensi transedental dalam kebudayaan. Banyak orang yang sudah terperangkap dan menyerah kepada arus hedonisme, materialisme, dan budaya yang dekaden. Menurutnya, harus ada yang dilakukan untuk mengatasi dan memberikan jalan keluar atas masalah ini, yaitu membersihkan diri dengan mengingatkan kembali dimensi transendental yang menjadi bagian sah dari fitrah kemanusiaan. Dunia ini harus dihayati dan dirasakan sebagai rahmat Tuhan, sekaligus merasakan sentuhan kebesaran-Nya.⁴¹ Seperti telah dinyatakan di atas, transendensi adalah dasar dari humanisasi dan liberasi. Transendensi memberi arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan. Transendensi dalam ilmu sosial profetik di samping berfungsi sebagai dasar nilai bagi praksis humanisasi dan liberasi, juga berfungsi sebagai kritik. Dengan kritik transendensi, kemajuan teknologi dapat diarahkan untuk mengabdikan pada perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada kehancurannya. Melalui kritik transendensi, masyarakat akan dibebaskan dari kesadaran materialistik, di

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Kuntowijoyo, *Islam ...*, hlm. 88.

mana posisi ekonomi seseorang menentukan kesadarannya untuk menuju kesadaran transendental. Nilai transendensi di sini dapat dan akan menjadi tolok ukur kemajuan dan kemunduran manusia.⁴²

Dengan ilmu sosial profetik, seorang ilmuwan sosial mestinya melakukan reorientasi terhadap epistemologi, yaitu reorientasi terhadap *mode of thought* atau *mode of inquiry*, bahwa sumber ilmu pengetahuan itu tidak hanya dari rasio dan empiri, tetapi juga dari wahyu.⁴³ Sementara itu, apabila ilmu sosial yang akan dibangun bercorak indigenis, menurut Heri Santoso dan Listiyono Santoso, sumber pengetahuan meliputi empiri, rasio, intuisi, kepercayaan, otoritas, dan wahyu. Masing-masing sumber pengetahuan tersebut diakui, namun ditempatkan secara proporsional.⁴⁴

Berangkat dari ilmu sosial profetik ini, demikian menurut Kuntowijoyo, sesungguhnya para ilmuwan sosial Indonesia tidak perlu galau dan mengidap kekhawatiran yang berlebihan terhadap dominasi sains Barat. Betapun dalam proses pembangunan dan pengembangan sebuah teori, seorang ilmuwan tidak dapat menghindarkan terjadinya *peminjaman* dari dan *sintesis* dengan khazanah ilmu Barat. Sekalipun pada tujuan akhir yang ingin dicapai harus terus berusaha untuk *mendekati cita-cita otentik*, akan tetapi dalam proses globalisasi dan universalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang

⁴²Wikipedia, "Ilmu Sosial Profetik", diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_Sosial_Profetik.

⁴³ Kuntowijoyo, *Islam ...*, hlm. 88.

⁴⁴ Hari Santoso dan Listiyono Santoso, *Filsafat Ilmu ...*, hlm. 77.

ini, seorang ilmuwan harus tetap membuka diri terhadap seluruh warisan kebudayaan.⁴⁵

Selain dua gagasan yang dikemukakan Kuntowijoyo dengan Ilmu Sosial Profetiknya (ISP) dan Purwo Santoso dengan Ilmu Sosial Transformatifnya (IST), Farid Alatas mengemukakan sifat diskursus alternatif yang ditawarkannya dengan memerinci ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Titik berangkat diskursus alternatif adalah kritik terhadap Eurosentrisme dan Orientalisme dalam ilmu sosial;
2. Diskursus alternative mengangkat masalah metodologis dan epistemologis dalam telaah masyarakat, historiografi, atau filsafat sejarah;
3. Diskursus alternatif secara implisit atau eksplisit menaruh perhatian pada analisis masalah yang ditimbulkan oleh pembagian kerja dalam ilmu sosial, di mana ilmu sosial Asia mendapati dirinya dalam keadaan konformitas, tiruan, dan tidak orisinal;
4. Diskursus alternatif berkomitmen untuk merekonstruksi diskursus sosial dan sejarah mencakup pembangunan konsep, kategori, dan agenda riset yang relevan dengan kondisi lokal atau regional;
5. Diskursus alternatif berkomitmen untuk memunculkan masalah orisinal dalam telaah sosial dan sejarah;
6. Diskursus alternatif mengakui semua peradaban dan praktik budaya sebagai sumber ide ilmu sosial; dan
7. Diskursus alternatif tidak mendukung penolakan atas ilmu sosial Barat secara *in toto* (keseluruhan).⁴⁶

⁴⁵ Kuntowijoyo, *Islam ...*, hlm. 89.

Catatan Penutup

Manusia sejati atau manusia yang menjadi, menurut Ali Syariati, adalah manusia tiga dimensional, manusia dengan tiga talenta utama, yaitu kesadaran, kemampuan berkehendak, dan daya cipta. Manusia tiga dimensional ini adalah manusia yang selalu berperang melawan dan berusaha membebaskan diri kekuatan deterministik yang cenderung membatasi dan membelenggu kesadaran diri, kemampuan berkehendak, dan daya ciptanya.⁴⁷ Seseorang yang memiliki kesadaran yang penuh akan diri dan masyarakatnya, diperkuat dengan kemampuan, dan daya kreatifnya, ia dengan segera dapat memahami realitas dan selanjutnya akan mampu dan sekaligus melakukan kontruksi terhadap diri dan masyarakatnya. Para ilmuwan sosial Indonesia, dalam konteks ini, seperti yang dikemukakan oleh Alatas, akan segera terbebas dari apa yang ia sebut dengan benak terbelenggu (*captive mind*). *Captive mind* di sini didefinisikan sebagai pikiran meniru yang tak kritis, terdominasi sumber-sumber eksternal, yang menyimpang dari perspektif independen.⁴⁸

Searah dengan pemikiran di atas, ada baiknya untuk memper-timbangkan langkah yang dilakukan oleh para pengagas *indigenous psychology* di masyarakat Asia Timur yang mengusulkan strategi epistemologis dengan menggunakan *realisme konstruktif* sebagai dasar filosofisnya.⁴⁹ Dengan

⁴⁶ Syed Farid Alatas, *Diskursus Alternatif Dalam Ilmu Sosial Asia: Terhadap Terhadap Eurocentrisme*, Jakarta: Mizan Publika, 2010, hlm. 77-78.

⁴⁷ Ali Syariati, *Tugas Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Srigunting, 1996, hlm. 60.

⁴⁸ Syed Farid Alatas, *Diskursus ...*, hlm.35.

⁴⁹ Uichol Kim, Kuo-Shu Yang, dan Kwang-Juo Hwang (ed.), *Indigenous and Cultural Psychology: Memahami Orang dalam Konteksnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 167.

menggunakan realisme konstruktif ini, para ilmuwan sosial dapat mengonstruksikan *microworld* teori ilmiah, dan menggunakan *microworld* ini sebagai kerangka acuan untuk melaksanakan penelitian empirik tentang *lifeworld* masyarakatnya.

Sebuah langkah kecil telah diambil Pada tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial Negeri Yogyakarta, setelah melalui proses diskusi selama kurang lebih 5 tahun telah menyepakati melalui Sidang Senat Fakultas mengesahkan visi Fakultas yang sejalan dengan gagasan untuk melahirkan Paradigma Ilmu Sosial Alternatif. Semoga langkah kecil itu adalah bagian dari cita-cita mulia untuk membuat Indonesia jaya, memperpanjang usia Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adullah, Taufik. (1984). "Ilmu Sosial dan Realitas Indonesia", *dalam Prisma*, Nomor 9, Tahun 1984, Jakarta: LP3ES.
- Alatas, Syed Farid. (2010). *Diskursus Alternatif Dalam Ilmu Sosial Asia: Terhadap Terhadap Eurosentrisme*, Jakarta: Mizan Publika.
- Bulkin, Farchan. (1984). "Ilmu Sosial dan Dimensi Manusia", *dalam Prisma*, Nomor 9, Tahun 1984, Jakarta: LP3ES.
- Cynthia, R. Banzon Bautista. (1997). "Filipina: Refleksi tentang Perkembangan Ilmu Sosial", *dalam Nico Schutle N dan Leontine Visser*, *Ilmu Sosial Di Asia Tenggara: Dari Partikularisme ke Universalisme*, Jakarta: LP3ES.
- Faisal, Yudi Ahmad. "Ilmu Sosial dan Hegemoni Barat", [http://sosbud.kompasiana.com/2011/01/23/ilmu-sosial-dan-hegemoni-barat/23 January 2011](http://sosbud.kompasiana.com/2011/01/23/ilmu-sosial-dan-hegemoni-barat/23%20January%202011).

- Geertz, Clifford. (1989). *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya,
- Kim, Uichol, Kuo-Shu Yang, dan Kwang-Juo Hwang (ed.). (2010). *Indigenous and Cultural Psychology: Memahami Orang dalam Konteksnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gausaf, *Menjadi Indonesia 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, Penerbit Mizan.
- Kuntowijoyo. (2006). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntjoro-Jakti, Darodjatun. (1984). "Cendekiawan Dunia Ketiga: Orang "Barat" di Dunia "Timur", dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (Peny.), *Cendekiawan dan Politik*, Jakarta: LP3ES.
- Langill, Steve dan Sam Landon. (1998). *Indigenous Knowledge*, Canada: IDRC-Lib.
- Parakitri T Simbolon, (2006), *Menjadi Indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Prasetyo, Yanu Endar, "*Keluar dari Penjajahan Akademik*", peresensi buku Syed Farid Alatas yang berjudul *Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia*, pada *Harian Republika*.
- Republika, "Saatnya Pribumisasi Ilmu Pengetahuan Dilakukan", [http:// www. republika. co.id/berita/nasional/umum/12/05/16/m43diu-saatnya-pribumisasi-ilmupengetahuan -dilakukan](http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/05/16/m43diu-saatnya-pribumisasi-ilmupengetahuan-dilakukan), Rabu, 16 Mei 2012.

- Samuel, Hanneman. (2010). *Geneologi Kekuasaan Ilmu Sosial Indonesia: Dari Kolonialisme Belanda hingga Modernisme Amerika*, Jakarta: Kepik Ungu.
- Santoso, Hari dan Listiyono Santoso. (2003). *Filsafat Ilmu Sosial: Ikhtiar Awal Pribumisasi Ilmu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta, Gama Media.
- Santoso, Heri. (2007). *Filsafat Ilmu Sosial Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Rasmedia.
- Santoso, Purwo. (2011). Ilmu Sosial Transformatif, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, pada tanggal 19 April 2011.
- Sri Teddy Rusdy. (2014). *Epistemologi Ki Ageng Suryomentaram Tandhesan Kawruh Bab Kawruh*, Jakarta, Yayasan Kertagama.
- Sudrajat, Ajat. (2013). *Laporan Tahunan Dekan FIS UNY pada Dies Natalis Ke-48 FIS UNY*, Yogyakarta: FIS UNY.
- Syamsudin, M. Din. (1997). “Tanggapan Ilmuwan Sosial Muslim terhaap Modernisasi Indonesia”, dalam Nico Schutle N dan Leontine Visser, *Ilmu Sosial Di Asia Tenggara: Dari Partikularisme ke Universalisme*, Jakarta: LP3ES.
- Syarifuddin Jurdi. (2017). *Sosiologi Profetik Paradigma Islam untuk Studi Sosial Kemanusiaan*, LSAF, Yogyakarta, Gramasurya.
- Soedjatmoko. (1980). “Dimensi-Dimensi Struktural Kemiskinan”, dalam Alfian dkk. (ed.), *Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial,.

2

Globalisasi Ilmu Pengetahuan: Bagaimana dengan Ilmu-Ilmu Sosial dan Identitas Nasional?¹

Ravik Karsidi² dan Pawito³

*Oh, East is East, and West is West,
and never the twain shall meet;
Till Earth and Sky stand presently
at God's great Judgment Seat ...
(Kipling, 1895).*

Kutipan dari sebagian baris-baris puisi karya Kipling di atas membersitkan tiga substansi yang unik dan sekaligus menarik untuk dipikirkan secara lebih mendalam. Benarkah (kebudayaan-peradaban) Timur dan Barat tidak akan pernah bertemu, atau bertemu juga tetapi hanya mirip dengan sekedar sapaan “*say hallo*”, ataukah keduanya bertemu kendati memang harus melalui banyak negosiasi dalam suatu narasi besar yang lebih dikenal dengan globalisasi. Pada kenyataannya banyak dijumpai gejala penerimaan anasir kebudayaan Barat yang masuk ke (dan diterima di) Timur termasuk Indonesia, misalnya gaya busana (stelan jas), berbagai macam tehnologi, dan juga

¹ Disampaikan dalam seminar “Meneguhkan Ilmu-ilmu Sosial Keindonesiaan” FIS UNY, Mei 2017.

² Ravik Karsidi/Ketua HIPHIS dan Guru Besar Sosiologi Pendidikan UNS.

³ Pawito/Pengurus HIPHIS dan Guru Besar Ilmu Komunikasi UNS.

metode-metode keilmiahan. Namun ada juga anasir kebudayaan Barat yang bernegosiasi dengan Timur dan kemudian menghasilkan sintesa seperti dapat diamati misalnya *es cream* yang menggunakan sebagian bahan dari ketela rambat, atau corak arsitektur Eropa namun berinteriorkan gaya tradisional.

Di sisi lain, kepadatan juga semacam gejala tandingan (*counter culture*) atau bahkan bisa disebut perlawanan; yakni unsur kebudayaan Barat memperoleh yang sebegitu jauh tidak berhasil bernegosiasi dengan kebudayaan asli Indonesia (Jawa) sehingga yang terjadi lebih merupakan berkompetisi ketat antara unsur kebudayaan Barat dengan unsur kebudayaan Timur (Indonesia), termasuk misalnya berbagai jenis dan/atau merk minuman ringan (*soft drink*) yang memperoleh perlawanan kuat oleh berbagai jenis minuman khas Indonesia termasuk (*wedang*) kopi, teh, ronde, cendol, dan kelapa muda. Makanan (kuliner, menu) cepat saji yang dikendalikan oleh perusahaan asing (Amerika) memperoleh perlawanan ketat oleh menu makanan asli seperti gurami bakar, kakap goreng, bebek/ayam/burung dara goreng (lengkap dengan asesori dan lalapan). Nampaknya butuh waktu lama, itupun kalau pada akhirnya bisa, untuk kekuatan luar memformat lidah dan perut dari yang asli Indonesia untuk dirubah menjadi barat; yang terjadi selama ini mungkin dapat dikatakan masih terkesan "kebarat-baratan."

Gejala demikian mengisyaratkan bahwa narasi mengenai globalisasi belum berakhir, dan nampaknya juga belum ada isyarat kapan hal itu akan berakhir. Kalau harus dikatakan bahwa globalisasi adalah untuk kemanfaatan semua penghuni bumi maka mungkin hal ini benar; tetapi sepertinya yang lebih lantang berteriak demikian adalah kalangan dominan-masyarakat yang memiliki kekuatan yang cenderung

menghegemoni dengan segala amunisi yang dimiliki termasuk sudah tentu adalah ilmu pengetahuan (termasuk ilmu-ilmu sosial), teknologi, modal, media (media massa dan media baru sebagai aparatus ideologi) dan cadangan arsenal kekuatan pemaksa (militer) sebagai aparatus represif. Tetapi haruskah (selamanya) demikian? Bukankah ilmu-ilmu sosial pada dasarnya mempelajari kehidupan manusia dengan segala tingkah-laku dan perangnya yang karena itu bisa sangat berbeda antara gejala yang berkembang di masyarakat megapolitan New York dengan masyarakat Desa Songbledeg (pantai selatan wilayah Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)? Lalu apa pula relevansinya teori-teori hasil penelitian yang dihasilkan dari dan oleh masyarakat negara maju/kaya di sana yang secangkir kopi bisa berharga US 5 Dolar (katakan Rp. 60.000,-) untuk menjelaskan realitas gejala masyarakat kita di sini yang di dalamnya ada keluarga yang berpendapatan kurang dari itu dalam seharinya?

Bertolak dari “keprihatinan”sebagaimana dikemukakan di atas maka paparan ini lebih dimaksudkan untuk berbagi pikiran untuk perkembangan ilmu-ilmu sosial dalam konteks keindonesiaan dengan mengambil titik-berat terutama berkenaan dengan konsep dan teori untuk penelitian sosial.

Berkenaan dengan Konsep

Sebagaimana kita ketahui, Geertz telah secara serius meneliti kehidupan masyarakat Pare Kabupaten Kediri (yang oleh Geertz nama wilayah ini disamakan menjadi Mojokuto) dengan memberikan penekanan pada penggolongan masyarakat di sana yang nampaknya dicoba dikaitkan terutama dengan peta kekuatan yang ada pada masyarakat Pare ketika itu. Geertz lewat laporan penelitian yang dihasilkannya kemudian menyarankan

adanya tiga golongan masyarakat di Pare: Santri, Abangan, dan Priyayi.

Dalam kaitan ini nampak kesan ketidak konsistenan terutama antara golongan santri dan priyayi –artinya dalam golongan masyarakat priyayi sebenarnya juga terdapat nuansa abangan yakni dengan diyakininya berbagai mitos dan/atau kepercayaan-kepercayaan termasuk misalnya menyelenggarakan upacara selamatan. Hanya saja masyarakat golongan priyayi ini lebih banyak bekerja sebagai pegawai negeri dan secara politis mereka lebih berafiliasi kepada Partai Nasional Indonesia (PNI). Hal demikian menunjukkan bahwa Geerts lebih melihat masyarakat Pare dalam konteks kekuatan politik yakni golongan Santri diasosiasikan dengan golongan Agama (Islam), golongan Priyayi diasosiasikan dengan PNI (walau sebenarnya juga meyakini berbagai mitos dan melaksanakan berbagai adat-kebiasaan seperti kalangan Abangan), dan golongan Abangan yang diasosiasikan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dapat dikayakan bahwa penggolongan dengan cara demikian seolah mengokohkan pikiran Soekarno tentang “NASAKOM” –suatu pandangan yang dapat dikatakan kontroversial. Dikatakan kontroversial terutama disebabkan oleh sifat ketidak-cocokan (*incompatible*) antara nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (prinsip pengakuan tentang adanya Tuhan yang hanya satu yakni Tuhan Yang Maha Esa) di satu sisi dengan nilai-nilai komunisme yang notabene tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Geertz dengan konsep trikotomik “Santri-Priyayi-Abangan” menunjukkan kesan sangat bias karena banyak sekali warga golongan yang oleh Geertz disebut Abangan sebenarnya bukan orang komunis. Lagi pula bacaan doa dalam upacara selamatan banyak yang memiliki kedekatan dengan doa yang

lazim dibaca oleh kalangan agama walau kebanyakan orang dari golongan Abangan ini memang tidak memahami arti dari bacaan-bacaan doa yang pada umumnya menggunakan bahasa Arab, dan mereka memang tidak menjalankan/memenuhi rukun Islam.

Mencermati hal demikian maka kelihatan bahwa nampaknya terlalu beresiko untuk terlalu bertumpu pada konsep dan teori yang dibuat oleh masyarakat Barat walau mengenai masyarakat Indonesia –apalagi konsep dan teori yang dibuat oleh peneliti asing sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan pada masyarakat asing pula. Terlalu banyak gejala pada masyarakat Indonesia yang dapat dikonsepskan dengan mengacu pada penyebutan oleh masyarakat Indonesia sendiri yang dapat membuka peluang untuk diciptakannya teori-teori yang lebih bernuansakan Indonesia.

Gejala lain, di kalangan masyarakat Minang terutama Payakumbuh misalnya, berkembang kebiasaan yang disebut dengan *marosok*. Konteks dari kebiasaan ini adalah bertransaksi (terutama dalam jual-beli) sapi tanpa dengan tawar-menawar menggunakan mulut tetapi dengan menyatukan kedua telapak tangan antara penjual dan pembeli yang kemudian disebutkan harga yang disepakati dengan mengacu keumuman harga yang berlaku. Walau kebiasaan ini nampak semakin memudar – dengan ditandai oleh semakin banyaknya tawar-menawar dengan mulut/ucapan– namun jelas bahwa *marosok* merupakan (dapat diangkat) sebagai konsep yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk menunjuk realitas gejala yang riil ada/berkembang.

Lebih lanjut adalah penggunaan istilah/konsep *suaraningasepi* (*the sound of silence*) oleh masyarakat Jawa. Konsep *suaraningasepi* tumbuh dan berakar pada konteks

kepemimpinan (*leadership*) tradisional-klasik Jawa. Konsep ini digunakan untuk menunjuk apa yang sebenarnya lebih diinginkan oleh rakyat tetapi tidak sempat terartikulasikan – sebagian besar karena tidak berani, atau karena tidak ada fasilitas/saluran, atau mungkin karena enggan. Karena kecenderungan demikian maka apa yang sebenarnya dikehendaki rakyat (*kawula*) tidak pernah muncul ke permukaan. Karena ideal kekuasaan dalam masyarakat Jawa adalah nyawiji, manunggal (menyatu) antara pemimpin sebagai representasi dari kekuasaan di satu sisi dengan rakyat (*kawula*) di sisi lain maka pemimpin harus dapat memastikan, dengan cara tertentu, apa sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat.

Cara yang dimaksud dalam hubungan ini terutama adalah dengan pola kepemimpinan Hastobroto -delapan laku utama yang notabene merupakan harmoni antara jagad gede (makro kosmos-yakni alam semesta) dengan jagad cilik (mikro kosmos-yakni diri seorang pemimpin). Pokok hakikat dari pola kepemimpinan ini adalah pengutamakan perilaku pemimpin yang mencintai rakyat, senantiasa berpikir dan bekerja untuk rakyat, membelanjakan waktu dan tenaga serta jiwanya untuk rakyat. Pokok hakikat demikian kemudian memanifestasi dalam perilaku pemimpin yang mementingkan dan rajin menghampiri rakyat, ikhlas mendengarkan dan memahami suara/kehendak rakyat-yang untuk hal ini bilamana perlu dengan melakukan penyamaran. Hanya dengan cara demikian maka pemimpin dapat mengetahui dengan pasti tentang bagaimana sebenarnya suara rakyat: Pemimpin dapat mendengar *suaraningasepi*.

Konsep *suaraningasepi* agak berbeda dengan kunjungan tidak resmi (*in-cognito*) pemimpin ke daerah, berbeda juga dengan inspeksi mendadak (sidak –yang lebih terkesan mencekam), dan sangat jauh berbeda dengan apa yang sekarang

dikenal luas sebagai *blusukan*. *Blusukan* di samping melibatkan rombongan juga senantiasa disertai dengan kamera (wartawan), dan kerap kali (walau mungkin tidak selalu) memang sengaja dilakukan untuk membangun citra.

Dengan menyebutkan beberapa konsep sebagaimana baru sajadikemukakan di atas maka nampaknya sangat penting bagi ilmuwan sosial di Indonesia sekarang untuk semakin banyak mengenali masyarakat kita sendiri dengan begitu beragam corak kebudayaannya. Penelitian demi penelitian sosial di Indonesia sangat diharapkan untuk tidak terlalu memaksakan menggunakan dan/atau mengkonfirmasi konsep dan teori yang dihasilkan oleh dan di masyarakat Barat. Hanya dengan cara demikian maka ilmuwan sosial di Indonesia akan dapat lebih berkontribusi terhadap upaya-upaya bersifat berkelanjutan termasuk misalnya membangun dan mengembangkan identitas nasional di tengah kuatnya penetrasi budaya global. Ilmu-ilmu sosial yang kita kembangkan bersama sangat diharapkan untuk lebih memiliki watak keindonesiaan.

Sehingga, seringkali terdapat kesan adanya semacam pemaksaan atau mungkin keterpaksaan ketika kita sebagai peneliti harus meneliti dan/atau menjelaskan gejala yang ada/tumbuh di masyarakat kita lalu kita menggunakan konsep (construct) dan juga teori-teori dari luar (asing). Sementara itu banyak realitas dan/atau gejala dalam masyarakat kita yang sangat bersifat khas yang semestinya dikonsepsikan secara khas pula; yang kemudian penelitian terhadapnya sangat memungkinkan ditemukannya teori baru yang lebih bersifat khas Indonesia.

Level teori

Kerap kali dijumpai penelitian yang menghasilkan kesimpulan yang membenarkan teori-teori dari Barat. Hal demikian mungkin tidak terlalu aneh sebab segala hasil/kesimpulan sebuah penelitian pastinya ditentukan oleh data yang berhasil dikumpulkan peneliti, analisis yang dibuat, serta interpretasi-interpretasi oleh peneliti. Di samping ini juga ada kemungkinan sifat “keumuman” dari teori sehingga suatu teori seringkali kedapatan banyak memperoleh konfirmasi oleh dan/atau dari suatu penelitian ke penelitian lain-bahkan penelitian yang dilakukan di belahan wilayah lain dari dunia ini. Pun begitu, selayaknya kembali disadari juga bahwa teori bukan hanya dapat difungsikan untuk membimbing penelitian tetapi juga sangat terkait dengan tindakan (*action*) termasuk pengambilan keputusan dan/atau penerapan kebijakan.

Sangat diharapkan bahwa dengan penelitian sosial yang dilakukan di Indonesia dan oleh peneliti Indonesia dapat mencapai temuan-temuan yang pada akhirnya dapat dipretensikan sebagai teori yang memiliki sifat khas keindonesiaan walau harus menegasikan (menolak) pandangan-pandangan teoritik yang berasal dari Barat; dan teori-teori demikian selanjutnya dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengambil keputusan, membuat kebijakan. Dalam kaitan ini nampaknya memang ada semacam dilema. Di satu sisi ada pendapat yang mengatakan bahwa semakin tinggi sifat keumuman sebuah teori maka akan semakin bagus sebuah teori. Namun di sisi lain ada pula pandangan yang mengatakan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan; sementara karena lingkungan masyarakat berbeda-beda maka perilaku masyarakat cenderung berbeda-beda pula dari suatu bagian wilayah dunia ke wilayah lain –termasuk dalam

merespon lingkungan serta tingkatan sejauh mana lingkungan berpengaruh terhadap perilaku. Dalam kaitan demikian maka pandangan dan/atau sikap yang lebih skeptik di kalangan ilmuwan sosial di Indonesia sangat dibutuhkan dengan semangat untuk menjadi penemu dan bukan untuk menjadi peniru, untuk menjadi pencipta dan bukan untuk menjadi pengikut.

Sebelumnya sudah dikatakan bahwa teori kerap kali dipahami sebagai sangat terkait dengan tindakan – artinya tindakan dan/atau keputusan dibuat dengan merujuk atau bahkan mungkin berpijak pada teori. Dengan kata lain, teori dapat menginspirasi atau bahkan dapat dipakai sebagai pijakan untuk membuat keputusan dan/atau kebijakan. Hal demikian sebenarnya menunjuk sebagian dari hal dimensi axiology (*causa finalis*) dari ilmu pengetahuan (dan/atau teori) (periksa misalnya Littlejoh dan Foss, 2011:23-24). Kecenderungan demikian memberikan pelajaran bahwa teori yang dibangun dari penelitian dan/atau pemikiran masyarakat Barat (dengan kebudayaan yang berbeda) belum tentu sesuai/cocok untuk menjelaskan, memprediksi, apalagi untuk menuntun tindakan (keputusan, kebijakan) berkenaan dengan gejala serta persoalan-persoalan yang tumbuh di Indonesia.

Sekedar sebagai contoh dikemukakan pengalaman Indonesia di masa Orde Baru berkenaan dengan penterapan teori pembangunan ekonomi yang disarankan oleh Rostov yang dikenal dengan Teori Tahap Pertumbuhan (*Stages of Growth Theory*). Teori ini berpandangan bahwa pembangunan nasional terutama di bidang ekonomi, dengan mencermati apa yang terjadi di Barat (Amerika dan Eropa Barat), dapat ditempuh dengan mengikuti tahap-tahap pertumbuhan: dari masyarakat tradisional (*traditional society*), kemudian berangsur menuju masyarakat menjelang tinggal landas (*preconditions to take off*),

tahap tinggal landas (*take off*), masyarakat yang menuju kematangan (*drive to maturity*), dan tahap masyarakat konsumsi massa tingkat tinggi (*age of high mass consumption*) (<http://www.academia.edu/.....>)

Ketika pada periode Orde Baru pemerintah Indonesia menerapkan teori Tahap-tahap Pertumbuhan (*Stages of Growth*) yang dirintis oleh Rostov maka memang, terutama di tahap-tahap awal, semuanya berjalan baik-baik saja (lancar). Tetapi begitu menginjak tahap *take-off* maka perkembangan selanjutnya ternyata tidak seperti yang diharapkan (tidak seperti dalam teori). Sampai dengan tahap ini Indonesia ketika itu telah benar-benar menimmati pertumbuhan ekonomi yang sangat menggembirakan, terutama dengan diberlakukannya berbagai kebijakan bersifat insentif oleh pemerintah untuk pembangunan di sektor industri. Namun demikian tahap takeoff ini sebenarnya membutuhkan apa yang disebut *self sustained growth*. Indonesia nampaknya kurang memiliki jaminan mengenai hal ini karena Indonesia relatif bertumpu pada pinjaman luar negeri untuk berbagai anggaran pembangunan. Hutang luar negeri jelas tidak kompatibel dengan kemandirian. Besarnya hutang luar negeri ketika itu ternyata berkomplikasi dengan berkembangnya gejala patologis berupa korupsi, dan juga faktor kekuatan eksternal terutama sekali IMF yang kemudian ternyata memainkan kartunya yang pada akhirnya berdampak pada keterpurukan bahkan akhirnya menimbulkan krisis ekonomi dan krisis politik di Indonesia terutama sejak 1997 (Pawito, 2002; Zon, 2012);

Hal demikian memberikan palajaran bahwa: *pertama*, teori dapat digunakan (memiliki fungsi) untuk pijakan membuat keputusan dan/atau kebijakan; dan kedua, teori ketika hendak digunakan untuk membangun keputusan/kebijakan maka membutuhkan pemikiran lebih lanjut termasuk kemungkinan

mengupayakan modifikasi dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia sendiri. Pun begitu penting sekali untuk mengapresiasi bahwa betapapun politik pembangunan ketika itu diimplementasikan dengan merujuk pada teori tertentu yang jelas. Hal demikian sudah tentu merupakan hal yang sangat penting.

Catatan Akhir

Nampaknya dibutuhkan keberanian serta rasa percaya diri yang tinggi di kalangan ilmuwan sosial Indonesia ke depan untuk mengupayakan “eksperimen” dengan lebih banyak mengenali dan menggali apa yang ada dan/atau berkembang di masyarakat kita sendiri dengan kebudayaannya yang begitu beragam. Hal demikian nampaknya menjadi kategori imperatif untuk dapat menghasilkan temuan-temuan penelitian yang lebih bernuansa Indonesia baik berkenaan dengan konsep, teori, dan pengembangan prosedur metodologis. Terlalu banyak penelitian sosial dengan bertumpu pada teori-teori dari luar tanpa menggunakan pemikiran-pemikiran mengenai kondisi masyarakat dan/atau kebudayaan masyarakat kita dapat menumbuhkan dan mengukuhkan cara berpikir yang cenderung bias dan hasil penelitian yang relatif kurang kontributif untuk upaya pengambilan keputusan/kebijakan.

Dikemukakan dalam kaitan ini bahwa nampaknya terlalu banyak agenda riset yang harus diselesaikan; sebagian dari agenda riset (ilmu) sosial yang dapat disarankan misalnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penumbuhan dan pengukuhan identitas nasional, kanalisasi dan/atau pencapaian penyelesaian konflik, dinamika masyarakat perbatasan (berserta dengan kebudayaannya), kondisi-kondisi masyarakat terpencil dan masyarakat marginal (terutama) di kawasan perkotaan.

Selain ini persoalan-persoalan lain lagi seperti pengembangan nilai-nilai demokrasi, menemukan penyebab pokok dari ketiadaan trickle-down effects dalam kerangka merevisi teori Rostov (atau teori pembangunan yang lain) dengan mengambil konteks untuk maksud mengupayakan deal dengan sistem global nampaknya perlu untuk secara lebih serius diupayakan. Termasuk dalam kaitan terakhir ini adalah dengan mencermati perkembangan di China yang memberikan kesan bahwa politik pembangunan yang ditempuh adalah dengan mensitesakan prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas yang dinuansasi oleh nilai-nilai sosialisme (sementara kita bangsa Indonesia memiliki Pancasila) sehingga dapat dicegah kecenderungan-kecenderungan yang lebih mengarah kepada sistem kapitalisme liar/buas (*wild capitalism*), dan/atau tatanan yang bersifat "liberalisme bermata satu" – yakni tatanan liberal yang kelewat berlebihan-absurd sehingga tidak dapat melihat selain akumulasi kapital (*capital gain*). Kapitalisme jenis ini notabene adalah kapitalisme yang tidak mengenal moral: Mengabaikan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga prinsip Keadilan Sosial.

Daftar Pustaka

Geertz, Clifford. (1960). *The Religion of Java*. Chicago: The University of Chicago Press.

Kipling, Rudyard, "*The Balad of East and West*" dalam *Stedman, Edmund Clarence ed. (1895). A Victorian Anthology 1837-1895*. Diakses melalui <http://www.bartleby.com/246/1129.html> (09-04-2017).

Littlejoh, Stephen W. dan Karen Foss (2011). *Theories of Human Communication 10th. Ed.* Long Grove, Illinois: Waveland Press, Inc.

Pawito. (2002). *Mass Media and Democracy: A Study of the Roles of the Mass Media in the Indonesian Transition Period 1997-1999*. Thesis Ph.D untuk School of Design, Communication and Information Technology pada The University of Newcastle, Australia.

Zon, Fadli, "*Bukan Pemimpin Biasa*" dalam Arissetyanto Nugroho dan Donna Sita Indria (eds.). (2012). Pak Harto The Untold Stories. Jakarta: Kompas Gramedia.

<http://study.com/academy/lesson/walt-rostows-stages-of-growth-in-economies.html>

http://www.academia.edu/3596310/Rostows_theory_of_modernization_development

3

Pembelajaran Ilmu-Ilmu Sosial yang Bercorak Keindonesiaan¹

Warsono²

Jika menyimak judul dalam tulisan ini paling tidak ada dua hal yang menarik. Pertama adalah ilmu-ilmu sosial dan yang kedua adalah pembelajaran ilmu-ilmu sosial yang bercorak keindonesiaan. Untuk itu, perlu dikaji terlebih dahulu wilayah kajian ilmu sosial dan pembelajaran ilmu-ilmu sosial yang bercorak indonesia. Secara filosofis, ilmu berangkat dari fakta yaitu alam semesta dan berakhir dengan fakta yang membenarkan pemikiran. Obyek kajian ilmu adalah alam semesta dengan segala isinya. Alam semesta sebagai suatu ekosistem memiliki berbagai unsur yang terkait satu dengan lainnya yang dibingkai dalam hukum sebab akibat (causalitas), sehingga setiap fenomena akan berkaitan dengan fenomena lainnya. Diantara fenomena-fenomena tersebut ada yang menjadi sebab dan menimbulkan akibat pada fenomena lainnya. Di sisi lain, di alam semesta juga ada suatu kaidah, bahwa sesuatu itu hanya identik dengan dirinya sendiri. Tidak ada sesuatu yang sama persis (identik), kecuali dengan dirinya sendiri. Hal inilah yang melandasi suatu hipotesis ada perbedaan, jika kita

¹ Makalah disampaikan dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 2017 di Kampus Universitas Negeri Yogyakarta.

² Guru Besar Universitas Negeri Surabaya

membandingkan suatu dengan lainnya. Meskipun ada perbedaan, juga tidak sama sekali berbeda. Ada kesamaan diantara unsur-unsur alam semesta, sehingga bisa dikelompokkan-kelompokkan atau dibuat klasifikasi.

Isi alam semesta bisa diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu, benda mati, tumbuhan, binatang, dan manusia. Masing-masing kelompok tersebut bisa menjadi obyek kajian ilmu secara monodisiplin. Dari obyek tersebut kemudian lahir kelompok ilmu yaitu ilmu alam (*natural science*) dan ilmu sosial (*social science*), meskipun dalam perkembangannya ada lagi kelompok ketiga yaitu ilmu humaniora. Pengelompokan ilmu alam dan ilmu sosial lebih didasarkan kepada obyek kajian, bukan pada faktor kesulitan (mudah dan sulitnya). Ilmu alam adalah kumpulan ilmu yang menjadikan non human (benda mati, tumbuhan, dan binatang) sebagai obyek kajiannya. Sedangkan ilmu sosial adalah himpunan ilmu yang menjadikan manusia sebagai obyek kajian. Perbedaan ini lebih didasarkan pada sifat yang dimiliki, terutama kepatuhannya terhadap hukum alam. Manusia dibedakan dari yang lain, karena manusia tidak mau sepenuhnya tunduk kepada hukum alam. Bahkan manusia berusaha untuk mengatasi hukum alam. Hal ini berbeda dengan unsur non human (benda mati, tumbuhan, dan binatang) yang sepenuhnya patuh terhadap hukum alam, kausalitas tunggal.

Manusia sebagai makhluk yang rasional secara kodrati diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa rasa ingin tahu (*curiosity*). Dengan rasa ingin tahu tersebut manusia mempertanyakan setiap hal yang dijadikan obyeknya. Meskipun jumlah pertanyaan hanya enam yang sering disebut dengan 5W (*what, who, where, when, why*) dan 1 H (*how*), telah menghasilkan banyak pengetahuan, mulai dari pengetahuan

deskriptif, prosedural sampai pengetahuan eksplanatif sesuai dengan bagaimana cara bertanya. Pertanyaan tersebut juga menghasilkan konsep sampai ke teori, dan ilmu sesuai dengan apa yang dijadikan obyek pertanyaannya. Dari enam kata tanya tersebut yang berkaitan dengan ilmu adalah tiga yaitu *what*, *how*, dan *why*. Pertanyaan *what* akan menghasilkan pengetahuan deskriptif. Dalam struktur ilmu pertanyaan *what* menghasilkan definisi atau konsep. Pertanyaan *how* menghasilkan pengetahuan prosedural, dan pertanyaan *why* menghasilkan pengetahuan hipotetikal atau eksplanatif.

Secara struktural ilmu terdiri dari fakta, konsep dan teori yang dibangun atas pertanyaan *what*, *how*, dan *why*. Ilmu pada hakikatnya adalah jawaban atas pertanyaan *why* atas suatu obyek yang dijadikan kajiannya. Ilmu akan memberi penjelasan hubungan kausal dengan mengurai suatu fenomena sehingga diketahui mana yang menjadi sebab dan mana yang akibat. Begitu juga teori, sebagai bagian dari ilmu merupakan penjelasan atas suatu fenomena. Oleh karena itu, salah satu fungsi ilmu adalah menjelaskan atas hubungan berbagai fenomena dan memprediksi apa yang akan terjadi.

Sayangnya hubungan kausalitas dalam kehidupan manusia tidak selalu linier dan tunggal (nomologik), sehingga sulit dilakukan generalisasi. Kemampuan prediksi dari ilmu sosial juga tidak setinggi ilmu alam, karena manusia terus mengalami perubahan. Bahkan manusia juga mampu menggunakan ilmunya untuk merespon apa yang akan terjadi, sehingga sebelum apa yang diprediksikan terjadi, sudah dilakukan tindakan antisipatif.

Sebagai makhluk Tuhan, dan bagian dari alam semesta, manusia merupakan makhluk yang unik dan misterius. Manusia

memiliki akal, perasaan, kebebasan, dan kesadaran diri yang semua itu tidak dimiliki oleh binatang maupun tumbuhan. Akal merupakan alat untuk berpikir, yang menghasilkan pengetahuan dan ilmu. Perasaan menghasilkan suatu nilai yang dijunjung tinggi. Dimilikinya kebebasan menyebabkan manusia terus berusaha untuk mengatasi hukum alam dengan menggunakan akal. Dengan kebebasan menyebabkan pemikiran manusia terus berkembang dan menghasilkan banyak pengetahuan dan ilmu. Sedang kesadaran diri, menyebabkan manusia bisa (dengan meminjam istilah dari Herbert Mead), menjadikan dirinya sebagai subyek (*I*) dan obyek (*me*), sehingga manusia bisa menjadikan dirinya sebagai suatu obyek pemikiran, yang bisa menghasilkan ilmu-ilmu sosial dengan berbagai konsep dan teori.

Diantara yang termasuk dalam rumpun ilmu sosial adalah sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, psikologi dan lainnya. Ilmu-ilmu tersebut menjadikan manusia sebagai obyek kajiannya dengan sudut pandang dan asumsi yang berbeda-beda. Misal Sosiologi memandang manusia sebagai makhluk sosial. Politik memandang manusia sebagai *homo politicus*. Ekonomi memandang manusia sebagai *homo economicus*, dan psikologi memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari jiwa dan raga, dengan asumsi bahwa jiwa adalah kebebasan yang terpenjara dalam badan (Plato). Akibatnya masing-masing ilmu sosial memberi penjelasan yang berbeda tentang pertanyaan siapa dan apa manusia. Inilah misteri dari manusia, yang tidak bisa menjawab pertanyaan tentang dirinya sendiri.

Di sisi lain, sebagai obyek ilmu manusia juga bisa dilihat sebagai suatu entitas, benda (fakta sosial) yang bisa diukur dan dihitung, seperti yang dikemukakan oleh kaum positivisme (Durkheim). Manusia juga bisa dilihat sebagai suatu entitas

mental seperti yang dianut oleh para neo-positivisme dan konstruktivisme). Manusia juga bisa dipandang sebagai subyek nilai yang perilakunya hanya bisa dipahami melalui interpretasi (Weber). Atau manusia adalah sebagai penghasil wacana yang hanya bisa dipahami dari dalam wacana itu sendiri (Foucault).

Keunikan dan kemisteriusan manusia tersebut telah melahirkan banyak teori, yang memiliki kebenaran sendiri dan sulit untuk digeneralisasi. Ini merupakan karakteristik dari ilmu sosial, yang berbeda dengan ilmu-ilmu alam. Ilmu sosial bukan hanya memberikan penjelasan, dan mengukur, tetapi juga memahami setiap tindakan manusia, dari aspek pemikiran, motivasi, keinginan, kepercayaan dan lainnya. Oleh karena itu, dalam ilmu sosial, untuk memahami realitas tidak bisa hanya dengan menjadi penonton, melainkan membutuhkan keterlibatan kita, termasuk para peneliti.

Ilmu Sosial yang Bercorak Keindonesiaan

Mungkin kita bertanya apakah ada ilmu sosial yang bercorak keindonesia?, bukankah ilmu itu bersifat univerversal? Seperti apakah ilmu sosial yang bercorak keindonesiaan?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut syah-syah saja, tetapi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah ilmu-ilmu sosial yang lahir dari fenomena masyarakat Indonesia. Sebagai suatu entitas, masyarakat Indonesia tentu memiliki perbedaan dengan masyarakat lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh lingkungan alam yang berbeda. Lingkungan alam yang berbeda menghasilkan sistem budaya yang berbeda. Lingkungan alam yang berbeda juga telah melahirkan sistem nilai dan norma yang berbeda. Alam telah menjadi tantangan yang membutuhkan respon agar manusia bisa bertahan hidup. Bahkan masyarakat

bukan hanya merespon lingkungan alamnya, tetapi juga memahami lingkungan alamnya. Respon dan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan alamnya telah melahirkan kebudayaan. Hal ini terlihat dari keanekaragaman budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia.

Di Indonesia ada ratusan masyarakat dengan kebudayaannya sebagai respon terhadap lingkungannya masing-masing. Keanekaragaman suku, budaya, adat istiadat dan agama yang ada di Indonesia merupakan “ladang” bagi perkembangan ilmu sosial, karena membutuhkan penjelasan dan pemahaman sendiri. Banyak peneliti asing yang melakukan penelitian untuk memahami masyarakat Indonesia, kemudian melahirkan teori-teori yang berbeda dengan teori-teori yang dibangun di tempat lain. Geertz misalnya, telah melahirkan suatu pemahaman masyarakat Mojokunto, dan membuat klasifikasi yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Martin Van Bruinessen; Andree Feilard yang melakukan penelitian tentang kehidupan umat Islam di Indonesia, khususnya NU, menghasilkan penjelasan yang berbeda dengan kehidupan masyarakat Islam di negara lain. Begitu juga dalam bidang politik, para peneliti yang meneliti tentang demokrasi di Indonesia, juga menghasilkan penjelasan yang berbeda dengan model demokrasi di negara-negara lain.

Di sisi lain, teori-teori yang dibangun dari masyarakat Barat, tidak selalu relevan dan mampu menjelaskan fenomena yang terjadi di Indonesia. Almarhum Prof. Mubiarto, seorang ahli ekonomi yang memahami berbagai teori ekonomi yang dikembangkan di negara Barat, kemudian mengembangkan konsep atau teori tersendiri yang dikenal dengan ekonomi Pancasila, karena menurut Beliau teori-teori yang dibangun dari barat tidak cocok diaplikasikan di Indonesia. Begitu juga dalam

teori politik yang diimport dari Barat, tidak selalu relevan dipraktikan di Indonesia, sehingga muncul suatu konsep baru misal demokrasi Pancasila.

Sebagai obyek kajian ilmu sosial, fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia memiliki keunikan dan kekhususan yang tidak selalu dapat dijelaskan dengan teori-teori yang dibangun dari masyarakat Barat. Selama ini kita sering terperangkap dengan teori-teori Barat, dan melupakan untuk membangun dan mengembangkan ilmu sosial yang berbasis dari masyarakat Indonesia sendiri. Justru banyak ilmuwan sosial Barat yang datang meneliti masyarakat Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut dihasilkan buku yang kemudian kita pelajari. Tampaknya gairah ilmuwan sosial di Indonesia untuk meneliti dan membangun teori yang dibangun dari masyarakat sendiri, masih perlu ditingkatkan.

Ada era tahun 70 an muncul ilmuwan-ilmuwan sosial Indonesia yang menghasilkan banyak pemikiran sebagai hasil penelitian yang kemudian dibukukan, seperti Koentjaraningrat; Selo Soemardjan; Sadli. Mereka adalah ilmuwan-ilmuwan sosial yang mampu melahirkan teori-teori yang dibangun dari masyarakat Indonesia sendiri. Mereka pula yang membidani lahirnya Himpunan Pengembang Ilmu Ilmu Sosial (HIPIIS) di Indonesia. Pada era tersebut gairah para ilmuwan sosial di Indonesia untuk melakukan penelitian dan membangun ilmu sosial yang bercorak keindonesiaan sangat besar. Hal ini terbukti dengan banyaknya buku yang ditulis oleh ilmuwan sosial Indonesia. Sejalan dengan gairah para ilmuwan sosial tersebut muncul majalah Prisma yang sangat populer di kalangan intelektual. Majalah tersebut merupakan wadah publikasi ilmiah dari pemikiran dan hasil penelitian yang sangat bergensi di kalangan ilmuwan sosial Indonesia.

Sayangnya majalah tersebut menghilang seiring dengan semakin menegndornya gairah meneliti dan mengembangkan ilmu sosial di Indonesia.

Upaya untuk menumbuhkan kembali gairah meneliti dan mengembangkan ilmu sosial di Indonesia harus terus dilakukan, agar bisa menghasilkan teori-teori yang mampu memahami dan menjelaskan berbagai fenomena sosial di Indonesia. Masih banyak fenomena sosial yang belum diteliti. Oleh karena itu, seharusnya para ilmuwan sosial Indonesia bisa lebih fokus untuk meneliti dan mengkaji masyarakat Indonesia sendiri, sehingga menghasilkan penjelasan dan pemahaman bagaimana mereka mamahami dan memaknai lingkungan alamnya, masyarakat, dan dirinya sendiri. Masyarakat Indonesia dengan segala keanekaragaman budaya termasuk cara berpikirnya, perlu dikaji dan dipahami melalui penelitian yang melibatkan berbagai disiplin ilmu sosial. Hasil penelitian tersebut kemudian ditransfers kepada para generasi muda, agar mereka bisa belajar dari generasi sebelumnya, sehingga tidak lagi mengulangi kegagalan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh generasi pendahulunya.

Pembelajaran Ilmu Sosial yang Bercorak Keindonesiaan

Dalam pendidikan ada dua pendekatan yaitu *teacher center* dan *student center*. Berkaitan dengan dua pendekatan tersebut juga ada istilah pembelajaran (*learning*) dan pengajaran (*teaching*). Istilah pembelajaran sering dikaitkan dengan pendekatan *student center*. Sedangkan istilah pengajaran dikaitkan dengan pendekatan *teacher center*. Meskipun perbedaan tersebut juga masih sering menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Perdedaaan tersebut bisa juga pahami, karena pada pendekatan *teacher center*, guru menjadi pusat dan

sumber pengetahuan (subyek), sehingga bersifat instruktif, dan ekspository. Sedangkan pendekatan *student center* menempatkan siswa sebagai subyek yang harus didorong untuk mengembangkan potensinya. Terlepas dari perbedaan tersebut ada juga kesamaan dari keduanya, yaitu mengharapkan terjadinya perubahan dari siswa, karena hakikat pembelajaran (*learning*) adalah adanya perubahan perilaku yang permanen (Hergenhahn, 2009:6). Perubahan perilaku tersebut tentu didasari oleh perubahan pengetahuan atau keyakinan. Oleh karena itu, perubahan yang diharapkan dari para peserta didik adalah perubahan dari tidak tahu menjadi tahu; perubahan dari tidak mampu menjadi mampu; dan perubahan dari tidak mau menjadi mau.

Perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, berkaitan dengan penambahan pengetahuan. Artinya pembelajaran harus membuat pengetahuan siswa bertambah. Namun penambahan pengetahuan juga bisa dilakukan oleh siswa sendiri (kemauan), yaitu dengan cara mencari dan membangun pengetahuan secara mandiri (kemampuan), seperti yang diteorikan oleh para penganut konstruktivisme. Dalam arti pengetahuan bisa lahir dari kemauan peserta didik atau siswa saja untuk berpikir, karena berpikir pada hakikatnya adalah mencari jawaban atas suatu pertanyaan. Ketika ada kemauan untuk berpikir (bertanya), maka akan melahirkan suatu jawaban (pengetahuan), terlepas pengetahuan tersebut benar atau salah.

Memang pengetahuan seperti apa yang akan dihasilkan, berkaitan dengan kemampuan bertanya. Pertanyaan *what* (apa ini, apa itu), akan menghasilkan pengetahuan yang berbeda dengan pengetahuan yang dihasilkan dari pertanyaan *how* dan *why*. Berkaitan dengan hal ini, pengajaran juga harus mampu melakukan perubahan cara berpikir sampai berpikir tingkat

tinggi (ilmiah), jika perlu sampai ke kemampuan abstraktif dan reflektif. Dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi akan menghasilkan pengetahuan eksplanatif, bahkan dengan kemampuan abstrak dan reflektif akan bisa menghasilkan *wisdom*.

Berpikir merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika dilihat dari potensi ini, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara bangsa satu dengan bangsa lain. Potensi berpikir bangsa Indonesia jika tidak berada di bawah bangsa-bangsa yang sekarang dianggap maju. Persoalannya yang membedakan adalah bagaimana cara menggunakan potensi tersebut. Bagaimana cara bertanya terhadap realitas (alam semesta). Kemauan bertanya dan kemampuan (cara) bertanya inilah yang harus didorong dalam pembelajaran. Kemauan bertanya (kritis) akan mendorong orang untuk menjadi kreatif ketika mereka bertanya *how*, yang pada gilirannya akan mendorong orang menjadi inovatif. Oleh karena itu, dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan *student center*, dan metode diskusi akan lebih mendorong para peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, karena salah satu manfaat dari diskusi adalah meningkatkan ketangkasan (*agility*) berpikir.

Tugas guru atau dosen adalah membimbing dan melatih peserta didik tentang bagaimana cara berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang ditandai dengan prinsip: *logico - hypothetico-empirico*, dalam arti berpikir yang didasarkan kepada kaidah-kaidah logika, berdasarkan kepada fakta dan data, dan menyadari bahwa kebenaran ilmiah (ilmu) bukanlah kebenaran mutlak dan tunggal. Dalam logika dituntut adanya konsistensi dan koherensi (keruntutan). Dalam pembelajaran peserta didik harus dilatih dan dibimbing untuk berpikir secara runtut dan

konsisten. Ketidakruntutan dan ketidakkonsistensian dalam berpikir akan melahirkan suatu pemahaman dan kesimpulan yang sesat. Selain berpikir peserta didik juga harus dilatih dan dididik untuk berpegang kepada fakta dan data. Data merupakan merupakan pengontrol terhadap suatu kebenaran (empirisme). Kebenaran yang dibangun dengan logika masih bersifat hipotesis, yang harus dibuktikan oleh data yang ada. Peserta didik juga harus diajarkan untuk bersikap terbuka terhadap kritik dan masukan, serta tidak memutlakan kebenaran dari hasil pemikirannya sendiri. Prinsip *hipotetico* merupakan etika akademis, yang menekankan bahwa tidak ada kebenaran tunggal dan mutlak dalam ilmu sebagai hasil pemikiran manusia.

Dalam konnteks pembelajaran ilmu sosial yang bercorak keindonesiaan tentu kontennya adalah fenomena sosial yang ada di Indonesia atau teori-teori sosial yang dilahirkan dari masyarakat Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap masyarakat memiliki persoalan (*social problem*) dan memiliki cara penyelesaian sendiri terhadap persoalan yang dihadapi. Perbedaan cara penyelsaian tersebut berkait dengan tingkat pengetahuan, paradigma berpikir dan keinginan atau harapan. Kajian persoalan sosial bukan dari masalah baik dan buruk, tetapi berkaitan dengan nilai, keyakinan, pengetahuan, dan keinginan yang dijunjung oleh masyarakat. Pemahaman terhadap suatu fenomena sosial, merupakan salah satu fokus dan sekaligus ciri dari ilmu sosial. Oleh karena itu, pembelajaran ilmu sosial harus diarahkan kepada pemahaman terhadap bagaimana rasionalitas suatu tindakan sosial (*social action*), bukan semata-mata pada hubungan causalitas antara berbagai fenomena sosial.

Dalam pembelajaran ilmu sosial, peserta didik diajak mendiskusikan berbagai fenomena sosial yang terjadi di Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia melahirkan berbagai fenomena yang berbeda pula, yang membutuhkan pemahaman dalam perspektif emik, yang tentu berbeda satu dengan lainnya. Diskusi tersebut bukan hanya mencari hubungan kausalitas antar berbagai fenomena, tetapi juga memahami mengapa fenomena tersebut terjadi. Meskipun dalam pembelajaran tersebut menggunakan teori-teori yang lahir di “Barat”, tetapi diarahkan untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia.

Dengan cara demikian, para mahasiswa bisa mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang memahami karakteristik masyarakat Indonesia, sehingga pada saat mereka mengambil tugas kepemimpinan dalam mengambil kebijakan tidak menimbulkan dampak sosial yang tidak diinginkan (disfungsional). Selain itu, mereka juga bisa menjadi *agent of change* untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik tanpa menimbulkan gejolak sosial. Secara normatif pembelajaran ilmu sosial diawali dari pemahaman terhadap konsep dan teori, kemudian dilanjutkan dengan kemampuan mengkritisi kekuatan dan kelemahan teori tersebut. Dengan cara demikian, peserta didik pada saatnya mampu memperbaharui teori tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran ilmu sosial bukan hanya memahami dan mengkaji teori-teori sosial dari “Barat”, tetapi juga mengkritisi teori-teori tersebut dalam perspektif masyarakat Indonesia, sehingga mampu membangun teori-teori berbasis keindonesiaan.

Daftar Pustaka

- Brookfield, D. Stephen and Preskill Stephen. (1999). *Discussion as Way of Teaching Tools and Techniques for University Teachers*. Buckingham: SRHE and Open University Press.
- Heiner Robert. (2006). *Social Problem an Introduction to Critical Constructionism. Second Edition*. New York: Oxford
- Hergenhahn R.B and Olson, H. Matthew (ed). (2009). *An Intruduction to Theories of Learning*. New Jersey: Pearson.
- Johson, Paul Doyle. (2008). *Contemporary Sociological Theory An Integrated Multi-Level Approach*. USA: Springer Science.
- Ramage E. Douglas. (1995). *Politics in Indonesia, Democracy, Islam and the Ideolgy of Tolerance*. London: Roudledge.
- Rosenberg, Alexander. (2008). *Philosophy of Social Science*. United States of America: Westview Press.
- Strydom, Piet and Delanty, Gerard (ed). (2003). *Philosophy of Social Science The Classic and Contemporary Reading*. Philadelphia: Open University Press.
- Warsono, (2016). *Pancasila-isme dalam Dinamika Pendidikan (edisi revisi)*. Unesa University Press.

4

Peta Teori Ilmu Sosial dan Posisi Ilmu Sosial Keindonesiaan¹

Cahyo Pamungkas²

Diskursus mengenai posisi ilmu sosial keIndonesiaan masih relevan didiskusikan hingga saat ini mengingat masih adanya beberapa persoalan krisis ilmu sosial dan humaniora. Krisis tersebut dapat dipahami pada dua tingkatan yang berbeda, yakni kualitas produksi ilmu pengetahuan sosial pada tingkat nasional dan orientasi ideologi ilmu sosial. Jika kualitas produksi bergantung pada sumberdaya peneliti ilmu sosial dan kapasitas lembaga produksi ilmu pengetahuan modern, maka orientasi ideologi ilmu sosial berhubungan dengan tujuan dan arah pengembangan ilmu pengetahuan. Baik kualitas produksi ilmu pengetahuan sosial dan humaniora maupun orientasi ideologi berada pada posisi yang terbelit satu sama lain yang menyebabkan perkembangan ilmu sosial dan humaniora di Indonesia menghadapi tantangan baik secara internal maupun eksternal.

Dimensi pertama yang melatarbelakangi tulisan ini adalah kualitas penelitian dan lembaga produksi pengetahuan yang

¹ Disampaikan dalam konferensi nasional Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 4 Mei 2017.

² Peneliti, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

masih belum memadai. Rendahnya kualitas penelitian di Indonesia terutama riset dalam ilmu-ilmu pengetahuan sosial ditunjukkan oleh studi May Ling-Gardiner (2010) yang mengatakan bahwa hasil-hasil penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI jarang digunakan oleh para pengguna (stakeholders) termasuk lembaga-lembaga pemerintah. Hal ini terutama disebabkan oleh kualitas penelitian ilmu sosial yang masih bersifat medioker, kurangnya alokasi dana, dan dibatasinya keleluasaan untuk menggunakan dana riset tersebut. Situasi ini sebenarnya dihadapi oleh hampir semua lembaga produksi pengetahuan konvensional termasuk perguruan tinggi dan LIPI karena munculnya lembaga-lembaga produksi pengetahuan modern yang lebih berorientasi pada *stakeholders* termasuk pasar, menggunakan pendekatan keilmuan yang transdisipliner dan metode penelitian yang lebih komprehensif (Tim Dant 2013).

Dalam realitasnya, kerja-kerja penelitian di Indonesia secara umum masih belum mendapatkan dukungan yang signifikan dari Pemerintah. Bila dilihat dari persentase anggaran riset terhadap GDP tahun 2014, Indonesia menempati urutan ke-37, yakni 0.22% atau 5,62 Milyar US\$ (RDMAG 2014). Persentase dan besaran alokasi dana riset tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia. Sebagai perbandingan, Malaysia menempati peringkat ke-28 dengan persentase 0.80% atau sebesar 7,53 Milyar US\$. Jika dibandingkan dengan India, Indonesia jauh tertinggal, India menduduki urutan ke-6 dimana alokasi dana risetnya 0.85% dari GDP atau 61,85 Milyar US\$. Rendahnya alokasi dana riset di Indonesia ini berimplikasi pada sedikitnya jumlah tenaga peneliti dan relatif kurang cukupnya kualitas penelitian secara umum.

Persoalan krisis ilmu sosial disampaikan secara terbuka pada tahun 2013 oleh Manneke Budiman, Dosen Departemen Susastra, FIB, Universitas Indonesia, dalam pidato kebudayaannya di Komunitas Salihara, Jakarta. Dua persoalan yang telah dianggap mengganggu perkembangan ilmu-ilmu sosial dan humaniora di Indonesia adalah overdosis postmodernisme dan penetrasi neoliberalisme ke dunia perguruan tinggi. Penggunaan konsep-konsep posmodernisme dalam penelitian ilmu-ilmu sosial yang meningkat pada tahun 1990-an menyebabkan berbagai fenomena yang menjadi kajian penelitian sosial bukannya menjadi semakin jelas kompleksitasnya. Namun menjadi sulit dipahami oleh pembaca karena banyaknya jargon teoretis yang menjadi sarana artiklasinya. Para pengkaji postmodernisme menganggap bahwa tugasnya sebagai ilmuwan hanyalah membongkar sedangkan alternatif pemikiran yang lebih baik bukan tanggung jawab mereka karena mereka tidak pernah percaya dengan adanya solusi. Persoalan lainnya adalah dampak destruktif dari ideologi neoliberalisme ke dalam dunia akademik sebagai akibat dari komodifikasi ilmu pengetahuan yang tidak dapat dikendalikan. Neoliberalisme memunculkan banyak tuntutan agar ilmu pengetahuan dan hasil-hasil penelitian dapat secara langsung dapat digunakan untuk menjadi solusi persoalan kemasayrakan atau kebangsaan. Sebagai implikasinya, penelitian-penelitian ilmu sosial dan humaniora yang tidak dapat memberi dampak langsung terhadap pemecahan persoalan sosial tidak pantas untuk didukung atau dikembangkan. Persoalan orientasi ilmu pengetahuan di Indonesia menurut Budiman (2013) adalah bagaimanakah mengembalikan kemanusiaan yang hilang di dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosial.

Selain kehilangan makna kemanusiaan, perkembangan ilmu sosial dan humaniora juga dihadapkan pada persoalan krisis identitas. Purwo Santosa dalam pidato pengukuhan guru besarnya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011 menolak pandangan mainstream kebanyakan ilmuwan bahwa ilmu pengetahuan seharusnya tidak dibatasi oleh nasionalisme. Menurutnya, ilmu sosial di Indonesia adalah ilmu sosial tentang Indonesia. Sebagai akibatnya teori-teori sosial yang dibangun oleh orang asing tentang kebersamaan kita sebagai komunitas bangsa merupakan ketidaksadaran kita akan arti penting masa depan kita. Pengetahuan ilmuwan asing mengenai bangsa kita merupakan kesempatan bagi bangsa lain untuk menguasai kita. Penguasaan akan ketidaksadaran kita dengan kata lain adalah pintu bagi dominasi atau hegenoni terhadap masyarakat kita. Purwo Santosa menanyakan apa yang akan terjadi kalau kendali pengembangan ilmu pengetahuan berada di tangan orang asli karena ketidaksadaran mengenai kehidupan sehari-hari yang diteorisasikan oleh ilmuwan asing itu memungkinkan bangsa lain mengendalikan bangsa kita melalui hegemoni ilmu pengetahuan (Purwo Santosa, 2011). Dampak dari hegemoni ilmu pengetahuan terhadap para pengkaji ilmu sosial tampak pada kontribusi mereka dalam pengembangan ilmu baik pada tataran teoretik maupun metodologis belum bisa dibanggakan. Indikasi lain adalah para peneliti ilmu sosial kita masih terombang-ambing dalam menentukan aliran atau mazhab yang ditawarkan oleh ilmuwan asing, sehingga rujukannya selalu pada pakar ahli Indonesia yang non-Indonesia. Indonesia bagi mereka hanyalah lokasi penelitian atau laboratorium sosial oleh para ilmuwan asing seperti JH Boeke, Furnivall, Clifford Geertz, dan Benedict Anderson.

Pengkaji ilmu sosial yang lain Vedi Hadiz dan Dhaniel Dakidae dalam bukunya yang berjudul *social sciences and power in Indonesia* pada tahun 2005, menyebutkan bahwa orientasi ideologi ilmu sosial di Indonesia berkaitan dengan konteks sosial dan politiknya. Perkembangan ilmu sosial tidak lah berjalan dengan independen dari konteks politik karena mengutip konsepsi Michael Foucault (2002), diasumsikan bahwa pengetahuan itu sendiri adalah kekuasaan dalam konteks menciptakan kepatuhan dan kedisiplinan. Ia tidak hanya menjadi instrumen legitimasi penguasa dan kebijakan politik, namun mengkonstruksi dan mereproduksi cara berfikir tertentu sehingga menciptakan jairngan yang bersifat kompleks. Rejim kekuasaan selalu mendasarkan legitimasinya pada ilmu pengetahuan. Sebaliknya, ilmu pengetahuan juga memerlukan dukungan dari kekuasaan untuk berkembang luas dan diakui dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk melihat genealogi ilmu sosial yang berkembang di Indonesia.

Bertolak dari kondisi penelitian ilmu sosial dan humaniora pada masa kini, artikel ini berusaha untuk menelusuri jejak-jejak transformasi ilmu sosial dan humaniora ke Indonesia sejak masa kolonial. Pertanyaan yang ingin dijawab oleh tulisan ini adalah (i) Bagaimanakah peta teori-teori sosial Barat yang diajarkan dalam ilmu sosial dan humaniora di Indonesia? (ii) Bagaimanakah transformasi ilmu sosial Barat di Indonesia sepanjang sejarah dan melalui jaringan sosial manakah praktik-praktik transformasi pengetahuan tersebut dilakukan? (iii) Bagaimanakah strategi membangun ilmu sosial keIndonesiaan pada masa depan di tengah belitan global (*global assemblages*). Argumentasi yang dibangun oleh tulisan ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, transformasi ilmu sosial Barat di Indonesia

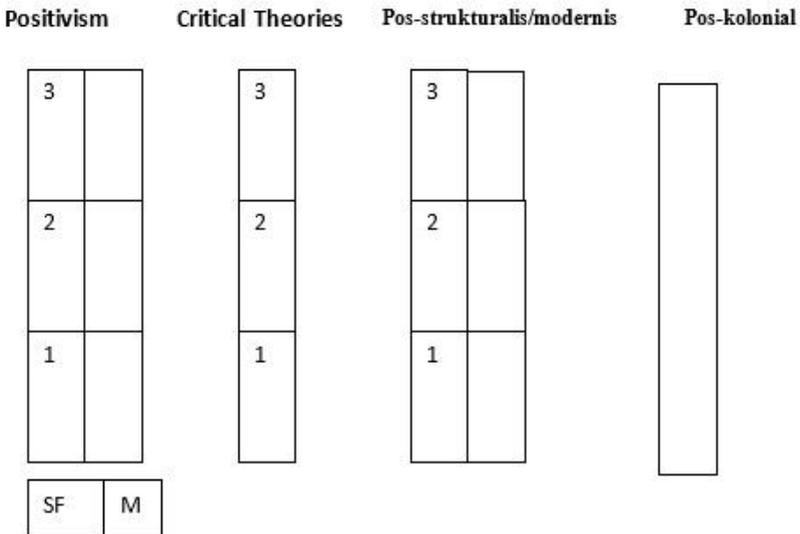
dibangun melalui praktik-praktik politik dan ekonomi sepanjang sejarah Indonesia, yang ditandai oleh kontestasi elit-elit baik pada tingkat nasional maupun global. *Kedua*, konsep dekolonisasi secara politik perlu dikaji kembali karena belum memasukkan aspek dekolonisasi ilmu pengetahuan. *Ketiga*, perlu dirumuskan strategi pengembangan ilmu-ilmu sosial pascakolonial di Indonesia yang mendukung transformasi sosial dan kebudayaan.

Teori-Teori Ilmu Sosial dalam Peta Pengetahuan

Dalam membahas peta ilmu sosial perlu diingat kembali pemikiran Bapak Sosiologi Agus Comte (Ritzer, 1996). Ia membagi masyarakat menjadi tiga tahapan. Masyarakat teologis bergantung pada kekuatan supranatural. Masyarakat Metafisik bergantung pada kekuatan alam. Masyarakat positif berpikir ilmiah. Pandangan ini muncul di Eropa Barat pada masa pencerahan. Imanuel Kant menyebut era ini sebagai masa keluar dari zaman kegelapan ditandai dengan penggunaan akal. Cita-cita pencerahan adalah mencapai kebebasan, kemajuan, dan kesetaraan berbasis rasionalisme dan empirisme. Masa pencerahan juga diawali dengan pemisahan antara agama dengan negara. Masyarakat sekuler menguat di Eropa. Ilmu sosial berkembang pada abad ke-19 adalah hasil dari abad pencerahan.

Dalam konteks historis, teori sosial masa kini bermula dari kritik terhadap sosiologi klasik Durkheim, Marx, dan Weber. Pemikiran mereka disebut teori fungsionalisme struktural dan fungsionalisme konflik. Fungsionalisme merupakan suatu pendekatan teori mengenai masyarakat yang menekankan ciri-ciri terintegrasi, saling tergantung, dan terstruktur (Jones, 2016). Kedua pendekatan ini memiliki kesamaan asumsi teoretis bahwa masyarakat berkembang secara linier. Dari masyarakat

tradisional ke masyarakat modern. Dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Dari solidaritas organik ke solidaritas mekanik. Evolusi masyarakat bertujuan untuk mencapai tahap modernitas, ditandai dengan kemajuan sistem sosial, ekonomi, dan budaya. Kedua pandangan ini berbeda dalam hal metode. Jika fungsionalisme struktural menekankan pada integrasi sosial atau struktur sebagai jalan menuju modernitas maka fungsionalisme konflik menekankan metode konflik sosial sebagai alat untuk mencapai tahap tertinggi fungsionalisme konflik yaitu masyarakat tanpa kelas. Persis dikemukakan oleh Marx (Turner & Turner, 1998).



Bagan 1 Peta Teori Sosial Barat

Dalam fungsionalisme struktural, Durkheim menjelaskan masyarakat dengan meng-analogi-kannya sebagai organisme. Masyarakat terdiri dari bagian saling terkait dan bergantung satu sama lain. Bagian tersebut membentuk keseimbangan, memiliki fungsi berbeda. Teori ini bertujuan untuk mendorong integrasi

sosial dan harmoni. Jika ada satu bagian tidak berfungsi maka merusak keseimbangan dalam sistem. Pemikiran Durkheim dikembangkan oleh Talcott Parson dan Robert Merton sebagai struktural fungsional. Menurut Durkheim integrasi sosial masyarakat modern akan tercipta jika ciri khas masyarakat tradisional seperti sentimen agama dan etnik sudah tidak muncul. Masyarakat selalu dinamis. Unsurnya menjaga keseimbangan dengan fungsi masing-masing. Karena, setiap struktur dalam sistem sosial adalah fungsional terhadap yang lain. Masyarakat bukan hasil dari penjumlahan individu tetapi merupakan sistem pembagian kerja. Dalam masyarakat tradisional pembagian kerja bersifat mekanis karena memiliki bentuk kesamaan. Masyarakat dipersatukan oleh kesadaran kolektif, norma-norma, dan perilaku sosial. Dalam masyarakat modern, pembagian kerja menghasilkan solidaritas organik. Pembagian kerja menghasilkan spesialisasi pekerjaan dan pranata sosial sehingga menciptakan interdependensi sistem sosial. Akibatnya, pembagian kerja dalam masyarakat modern menghasilkan kesadaran kuat individual (Veeger, 1993).

Dalam teori konflik Karl Marx menjadi rujukan utama. Asumsi mendasar pemikiran Marx adalah historis materialisme. Ini merujuk pada pemikiran Hegel mengenai dialektika menuju masyarakat ideal. Sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Perjuangan kelas terbentuk oleh konflik yang didasarkan atas kepentingan material. Masyarakat berkembang dari masyarakat berburu dan meramu, menjadi masyarakat pastoral kemudian masyarakat agraris kemudian masyarakat industri. Masyarakat industri akan digantikan oleh masyarakat tanpa kelas, komunis, melalui revolusi. Masyarakat industri terdiri dari kelas pemilik alat-alat produksi disebut borjuis dan kelas yang tidak memiliki alat-alat produksi disebut sebagai proletar. Ciri khas

masyarakat kapitalis adalah kelas borjuasi mengeksploitasi kelas proletar. Realitas kelas ini mengarahkan pada revolusi sosial menghancurkan kapitalisme. Inti pemikiran Marxisme adalah *determinisme ekonomi*. Artinya, aspek-aspek material terkait dengan penguasaan alat-alat produksi menjadi penyebab perubahan masyarakat melalui konflik sosial. Konflik diperlukan untuk mendorong perubahan. Pelaku perubahan adalah massa proletar. Aspek material disebut sebagai infrastruktur dalam sistem sosial, sedangkan aspek lain disebut sebagai suprastruktur, budaya, kesenian, politik, hukum, diproduksi oleh aspek material (Poloma, 1984).

Mazhab Frankurt mengkritik keras pemikiran modernitas. Tiga serangkai pendiri Mazhab Frankurt ialah Max Horkheimer, Theodore Adorno, dan Jurgen Habermas. Mereka memiliki pijakan sama bahwa perkembangan masyarakat dari modernitas ke kapitalisme lanjutan harus diarahkan karena kemajuan sistem sosial dan industrialisasi tidak memberikan tempat bagi kemanusiaan. Masyarakat kapitalisme lanjutan diibaratkan seperti sangkar besi yang mengurung kemanusiaan. Produksi tidak mendorong terciptanya konsumsi. Sebaliknya, konsumsi mendorong produksi. Industri tidak dipahami hanya dalam sistem ekonomi tetapi juga dalam sistem kebudayaan. Nilai-nilai budaya masyarakat diproduksi oleh dunia industri (Josep, 2005).

Makna kritis bertujuan menghapus bentuk dominasi yang muncul dari kapitalisme lanjutan. Makna kritis mendorong kebebasan, keadilan dan persamaan. Berbeda dengan Marxisme yang menggunakan metode revolusi sosial, aliran ini menggunakan metode *negative dialectic* (Marcuse, 1964). Mengkritik terus menerus terhadap bangunan sosial, ekonomi,

politik dan budaya yang menghambat kebebasan, keadilan, dan persamaan. Pengusung teori ini memandang dirinya sebagai penerus Karl Marx bahwa teori sosial harus menjadi teori emansipatoris. Artinya, ia tidak sekedar menarasikan, menjelaskan dan merefleksikan fenomena sosial tetapi juga berfungsi mengubahnya. Teori kritis pada dasarnya dibangun di atas konsepsi Marxisme. Namun konteks masyarakat Barat sekarang berbeda dengan konteks masyarakat yang menjadi kajian Karl Marx. Pendiri Mahzab Frankurt menyaksikan perkembangan pesat industri budaya seperti film, televisi, musik. Mereka diproduksi oleh industri swasta. Budaya massa komersial merupakan penanda masyarakat kapitalisme lanjut. Horkhaimer dan Adorno melihat fenomena eksploitasi menggunakan aspek kebudayaan. Industrialisasi dan komersialisasi budaya dikendalikan oleh relasi produksi kapitalis. Adorno menjelaskan bahwa ide pencerahan yang awalnya untuk menjaga kebebasan dari otoritas manusia berubah menjadi dominasi politik, sosial, dan budaya, sehingga manusia kehilangan makna kemanusiaan.

Jurgen Habermas, generasi kedua pemikiran kritis, menjelaskan rasionalitas komprehensif, rasionalitas yang direduksi secara teknis. Rasionalitas komprehensif terkait dengan rasionalitas komunikatif, dasar rasional kehidupan bersama. Rasionalitas komunikatif dapat diwujudkan ketika relasi sosial dibangun dalam prinsip, validitas konsekuensi politik tergantung pada kesepakatan yang diraih melalui komunikasi yang bebas dari dominasi. Metodenya, mendorong terciptanya ruang publik yang bebas dari dominasi. Dalam bukunya *on the logic of the social scientet*, Habermas (2015) mengkritik positivisme ilmu sosial karena sejalan dengan ilmu alam yang ingin menaklukkan alam. Ada tiga kepentingan manusia, yakni kontrol terhadap alam (teknis), memahami orang lain (praktis), dan membebaskan diri

dari struktur dominasi (emansipasi). Ini menjadi dasar keterkaitan antara pengetahuan dan kepentingan seperti diturunkan dalam ilmu alam (teknis), ilmu budaya (interpretatif), dan ilmu sosial (kritis). Tugas ilmuwan sosial adalah memahami situasi subjektif yang terdistorsi ideologis dari individu atau masyarakat dan penyebabnya serta menunjukkan bahwa kekuatan ini dapat dibatasi melalui kesadaran individu dan kolektif. Dalam konteks modernitas berakar dari pencerahan, Habermas mengatakan bahwa teori kritis tidak menolak proyek modernitas. Teori Kritis menghendaki agar modernitas diarahkan dengan teori moral normatif menuju tujuan pencerahan.

Selanjutnya, kajian berkembang dari kajian masyarakat menjadi kajian wacana (*discourse*). Fenomena ini sering disebut dengan *linguistic turn*. Aliran ini disebut teori post-strukturalis dan post-modernisme. Kedua teori ini mengkritik narasi besar teori-teori sosial. Mereka memiliki asumsi bahwa teori-teori sosial perlu melakukan *decentering*. Ini adalah mengembangkan pemikiran alternatif di luar narasi teori besar (*grand theory*). Pemikiran ini juga menolak pemikiran oposisi biner yang memusatkan analisis dalam perspektif hitam putih. Analisis bersifat oposisi biner tidak relevan jika digunakan untuk melihat realitas sosial yang kompleks, dan tidak memungkinkan munculnya alternatif pemikiran. Kedua aliran pemikiran ini tidak mempercayai modernitas sebagai tahap perkembangan masyarakat. Namun perbedaannya adalah jika post-strukturalis masih percaya pada struktur sosial yang dipahami dalam perspektif berbeda dengan teori fungsionalisme struktural dan fungsionalisme konflik, post-modernisme benar-benar menolak eksistensi dari struktur sosial.

Menurut Mackenzie (2003) post-strukturalis adalah kritik terhadap liberalisme, Marxisme, dan teori kritis. Tokohnya adalah Derrida, Foucault, Guattari, dan Lyotard. Menurut Terry Eagleton, post modernisme merujuk gaya berpikir curiga terhadap pengertian klasik tentang kebenaran, rasionalitas, identitas, obyektivitas, ide kemajuan universal atau emansipasi, satu kerangka kerja, *grand narrative* atau dasar-dasar terdalam dalam penjelasan. Berlawanan dengan norma-norma Pencerahan ini, postmodernitas melihat dunia sebagai yang kontingen, tidak berdasar, tidak seragam, tidak stabil, tidak dapat ditentukan, seperangkat kebudayaan yang plural atau penafsiran yang melahirkan skeptisisme terhadap obyektivitas kebenaran, sejarah dan norma-norma, kodrat yang terberikan serta koherensi identitas. Post-strukturalisme adalah sebuah aliran pemikiran yang menekonstruksi pemikiran strukturalisme. Inti pemikiran strukturalisme adalah bahwa pikiran dan dunia sosial dibentuk oleh bahasa, yang dibangun berdasarkan prinsip oposisi biner. Derrida (2016) mengkritik strukturalisme, terutama dalam bahasa, dengan mengatakan bahwa logosentrisme, yakni pencarian bagi sistem universal pemikiran, didominasi oleh pemikiran sosial Barat. Oleh karena itu diperlukan dekonstruksi pengetahuan sosial dengan cara membebaskan teks dari kepentingan yang mengendalikan penulis. Pemikir Poststrukturalis Michael Foucault memfokuskan perhatiannya pada konsekuensi negatif modernitas dalam praktik kehidupan sehari-hari terutama pada wacana-wacana yang termarginalisasi oleh narasi besar yang memunculkan narasi-narasi kecil.

Pemikiran Post-modernisme menolak meta-narasi yang dijelaskan oleh teori-teori besar. Jadi tidak ada satu definisi yang jelas mengenai pandangan post-strukturalis dan post-modernisme dalam ilmu-ilmu sosial. Salah seorang pemikir post-

modernisme paling radikal, Lyotard, mengatakan bahwa narasi besar harus ditolak. Ia menekankan perbedaan-perbedaan. Para pemikir moderat mengatakan bahwa meskipun terjadi perubahan dalam masyarakat post-modern namun mereka mengakui bahwa apa yang terjadi adalah kelanjutan dari masyarakat modern. Dalam realitasnya tidak jelas batas antara modernitas dan post-modernitas karena masih ada kontinuitas masyarakat modern dengan masyarakat post-modernitas. Turner (1998) menjelaskan post-modern sebagai ilmu yang mengkritik modernitas. Robohnya modernitas menjadi simbol kultural relasi individu dengan dunia sosial. Post-modern sebagai ilmu menyerang keyakinan modernitas terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait tiga hal berikut: (1) masalah representasi, apakah bahasa dapat membantu memahami realitas (2) masalah kekuasaan dan kepentingan, ilmu pengetahuan dipahami dalam konteks kebudayaan dan tidak dapat berkembang dengan netral. (3) masalah kontinuitas karena ada diskontinuitas pengetahuan. Menurut Lyotard, post-modern adalah kondisi ketidakpercayaan terhadap meta-narasi diartikan sebagai teori keseluruhan tentang sejarah dan tujuan manusia. Pemikir lainnya seperti Richard Rorty mengatakan bahwa realitas merupakan sesuatu yang di luar manusia. Bahasa digunakan agar dapat melihat realitas secara objektif. Namun, bahasa tidak akan mampu lebih objektif karena mendekonstruksi realitas. Bagi kalangan postmodernis kebenaran bersifat kontekstual dan plural.

Aliran pemikiran post-modern juga muncul dalam Sosiologi. Salah satu tokohnya adalah Fredrich Jameson dan Zigmunt Bauwman. Jameson mengatakan bahwa masih ada keberlanjutan antara modernitas dengan post-modernitas. Kapitalisme sekarang dapat disebut kapitalisme lanjutan dan

membutuhkan logika kultural baru, yakni post-modernisme. Namun, struktur ekonomi eksploitatif yang menjadi watak dasarnya masih sama dengan kapitalisme masyarakat modern. Kapitalisme pasar, kapitalisme global, dan kapitalisme lanjutan membutuhkan rasionalitas kebudayaan berbeda. Dalam masyarakat kapitalis lanjutan, penanda kebudayannya adalah tidak adanya dominasi dari satu kultur tertentu tetapi banyak kultur hadir secara bersamaan. Sedangkan Sygmunt Bauman mengkaji mengenai akibat dari dekonstruksi makna mengenai diri yang *chaos*, random, dan terdifferensiasi. Ia menolak pandangan pencerahan karena pencerahan melahirkan keraguan dan ketidaktentuan. Masyarakat postmodern tidak membutuhkan legitimasi intelektual dan negara karena masyarakat lebih tergantung kepada pasar dan gaya hidup konsumtif. Negara tidak membutuhkan intelektual karena lebih tergantung kepada pasar.

Aliran pemikiran teori sosial terakhir adalah teori postkolonial. Aliran ini dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan sosial dari luar Eropa dan Amerika seperti Arab (Edward Said) dan India (Gayatri Spivak, Hommi Bhaba). Meskipun terdapat banyak perbedaan di antara para pemikir teori post-kolonial, asumsi teoretik yang mendasarinya bahwa keseluruhan teori-teori sosial Barat hanya relevan untuk menganalisis masyarakat Barat. Teori-teori sosial Barat bersifat orientalistik. Teori ini membedakan antara masyarakat Barat yang superior, beradab, maju, dan modern dengan masyarakat Timur sebagai inferior, kurang beradab, tertinggal dan tradisional. Teori-teori postkolonial berusaha untuk membuka selubung kepentingan-kepentingan politik teori sosial Barat ketika digunakan untuk menganalisis dunia Timur.

Teori Poskolonial merupakan respon terhadap ilmu sosial dan humaniora Barat. Asumsi teoretik ilmu sosial Barat menjadi narasi besar atau meta narasi, didasarkan atas cara berfikir oposisi biner. Ilmu sosial Barat menempatkan masyarakat Barat sebagai subjek unggul, rasional dan beradab. Sedangkan, Timur diandang sebagai masyarakat terjajah, orang luar, objek, dan irasional. Ketidaksetaraan antara dunia Barat dan Timur dalam pandangan ilmu sosial Barat adalah asumsi mendasar orientalisme (Moore dan Gilbert, 2000). Salah satu pemikir terkemuka teori postkolonial adalah Edward Said. Ia menyebutkan bahwa teori-teori Barat tidak objektif dan tidak netral karena mengandung bias kekuasaan. Ilmuwan Barat di tanah jajahan bergantung pada catatan pemerintah kolonial sehingga kurang kritis. Orientalisme menurut Said merendahkan cara berfikir masyarakat Timur karena dianggap tidak sederajat dengan masyarakat Barat. Epistemologi orientalis menempatkan diri mereka sebagai subjek sementara masyarakat timur sebagai objek. Teori postkolonial memberikan kontribusi perspektif, pentingnya identitas nasional, nilai kemerdekaan, dan prinsip universal kemanusiaan..

Kebanyakan para pemikir teori postkolonial berasal dari India seperti Gayatri C. Spivak dan Hommi K Bhaba. Spivak (1998) mengenalkan konsep mengenai masyarakat subaltern, marginalisasi, sebagai realitas masyarakat pasca kolonial. Masyarakat subaltern adalah istilah untuk seluruh objek tertekan, lemah, dan marginal. Yakni, masyarakat terjajah, imperior dan bisu. Kolonialisme tidak hanya melakukan penjajahan fisik tetapi juga penjajahan jiwa, pikiran, dan kebudayaan. Hommy K. Bhaba memperkenalkan konsep hibriditas, mimikri, meniru, dan leminalitas, ruang dialog, antara kebudayaan Timur dan Barat sehingga tidak ada yang disebut kebudayaan asli. Pandangan

pasca kolonial juga menunjukkan bahwa masyarakat Timur tidak tunggal dan tidak seragam. Dengan kata lain, ada heterogenitas dunia Timur. Karena, ada perbedaaan geografis dan kebudayaan. Teori pasca kolonial memiliki perbedaan konsep pemikiran satu sama lain, berusaha melakukan dekonstruksi asumsi-asumsi tersembunyi ilmu pengetahuan sosial Barat sebagai kebenaran universal. Tujuan umum perspektif pasca kolonial ialah melawan dampak kolonialisasi dalam ilmu pengetahuan Barat. Kritik atas teori paca kolonial adalah bahwa kolonialisme politik memang selesi namun kolonialisme bentuk ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan belum selesi. Oleh karena itu perspektif pasca kolonial memiliki misi untuk melakukan dekolonisasi ilmu pengetahuan dari masyarakat bekas jajahan (Moore-Gilbert, 2000).

Kesimpulannya adalah bahwa ilmu sosial dengan pandangan kebenaran universal berasal dari ide pencerahan. Tujuannya adalah kebebasan, kemajuan, dan kesetaraan. Akan tetapi ketika dipakai mengalisis masyarakat dunia ketiga, ilmu sosial berubah menjadi alat kolonialisasi. Ilmu sosial menjadi alat hegemoni dan dominasi negara maju terhadap negara miskin. Dalam konsep mimikri Bhaba (2007) mendeskripsikan bahwa transformasi pengetahuan terjadi karena intelektual dunia ketiga melakukan peniruan terhadap intelektual negara maju. Persis sebagaimana ilmuwan Eropa memandang masyarakat dunia ketiga sebagai objek yang lemah dan marjinal. Namun harus diingat bahwa transfer pengetahuan adalah salah satu dari cara kerja kekuasaan. Hal Ini bukan sekedar dominasi dan hegemoni pengetahuan oleh Eropa. Dalam konteks sejarah Indonesia hal ini dapat dirunut dan dikaji kembali Transformasi ilmu pengetahuan Barat di Indonesia terjadi sejak masa kolonial sampai sekarang

melalui praktik-praktik politik dan ekonomi, terkait dengan kebijakan pembangunan negara.

Ilmu Sosial dan Praktik-Praktik Kekuasaan

Masyarakat Plural dan Ideologi Persatuan

Geertz (1973) menjelaskan bahwa negara baru hasil dekolonisasi di Asia dan Afrika rawan perpecahan. Perpecahan terjadi karena ikatan primordial begitu kuat. Ikatan ini melekat kuat secara budaya dalam hubungan kekeluargaan berakar sejak lahir, menjaral menjadi komunitas agama, bahasa, dan mengikuti tradisi sosial tertentu (hal. 259). Dalam masyarakat modern yang tradisi politik sipilnya masih lemah dan syarat membentuk pemerintah efektif belum terjadi, ikatan primordial menjadi dasar pemisahan unit politik. Konflik terjadi antara ikatan primordial dengan *civil sentiment*. Konflik ini memunculkan *tribalism*, *parochialism*, *communalism* dan menjadi masalah bagi negara-negara baru (hal. 261). Geertz membuat kesimpulan bahwa kemampuan negara untuk memobilisasi sumberdaya sosial untuk tujuan publik malah mendorong munculnya sentimen primordial. Geertz memberikan saran untuk elit negara baru agar tidak menghilangkan sentimen primordial tetapi menjinakkannya. Misalnya memberikan saluran ketidakpuasan melalui jalur politik ketimbang melakukan tindakan represif. (hal 277). Revolusi integratif tidak menghilangkan ethnosentrisme tetapi membuatnya menjadi modern.

Argumentasi Geertz bahwa negara post-kolonial rawan perpecahan sejalan dengan pandangan Furnivall (1939) yang menyebut negeri jajahan sebagai masyarakat yang terdiri atas dua

atau lebih tertib sosial (komunitas). Negeri jajahan dalam hal ini Indonesia secara kultural dan ekonomi terpisah satu satu sama lain (Nasikhun dalam Heryanto dkk 1996). Masyarakat plural dicirikan sebagai berikut: keragaman kultural, aliansi etnik, dan terorganisasi secara politik. Jadi sebenarnya argumentasi Geertz adalah bukan hal baru. Geertz tidak menjelaskan bahwa interaksi antar kelompok dalam masyarakat kolonial dikonstruksi untuk berjarak satu sama lain sebagai dampak dari politik *division and rule*. Maka tidak mengherankan jika golongan elit dalam negeri jajahan selalu mengkonstruksi identitas nasional baru. Jika dilihat secara mendalam identitas baru itu merupakan warisan dari penjajah untuk menyatukan mereka seperti misal ide tentang bangsa.

Geertz mengajukan tesis bahwa revolusi integratif malah memperkuat etnosentrisme sebagai dampak dari kuatnya sentimen primordial. Namun ia lupa bahwa sentimen primordial adalah konsekuensi logis dari kebijakan integrasi politik negara yang menghindari politik perbedaan, *the politics of differences*. Elit negara baru berusaha menerapkan sistem politik negara kolonial. Ini ditandai dengan kuatnya aspek sentralisasi dan politik identitas menempatkan golongan berkuasa di atas golongan-golongan yang dikuasai. Konsekuensinya adalah relasi antara etnik mayoritas dengan etnik minoritas sejalan dengan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan sebangun dengan relasi politik antara negara penjajah dengan negara terjajah. Revolusi integratif gagal. Ketidakdilan dalam pembagian sumberdaya antara etnik mayoritas dan minoritas di negara-negara post-kolonial menghasilkan gerakan separatis dari etnik minoritas. Kegagalan revolusi integratif diikuti dengan pertanyaan mengenai masyarakat plural. Konsep masyarakat

plural tidak mampu menjelaskan relasi politik antar golongan etnik, diwarnai oleh dominasi dan hegemoni golongan mayoritas.

Patut diingat kembali bahwa konsepsi masyarakat plural dikonstruksi oleh Pemerintah Hindia Belanda, Pemerintah Orde Lama, dan Pemerintah Orde. Pemerintah kolonial melontarkan fatwa politik bahwa eksistensi Pemerintah Hindia Belanda adalah untuk mengintegrasikan semua komunitas sosial baik etnik dan kelas di Indonesia. Ketidakhadiran Hindia Belanda, akan menyebabkan konflik antarkomunitas karena mereka tidak berinteraksi satu sama lain. Demikian juga dengan Pemerintah Orde Lama mendasarkan otoritarian kerakyatan pada masyarakat plural. Pemerintah Orde Baru menggantikan otoritarianisme kerakyatan dengan otoritarianisme birokratik sebagai alat untuk menyatukan masyarakat plural. Sebagaimana leluhurnya Hindia Belanda, Rezim Orde Baru memandang bahwa Indonesia terdiri dari beragam golongan sosial dengan sentimen primordial dan tidak bersatu karena itu Indonesia perlu kekuatan integratif untuk memperkuat persatuan nasional.

Maka selama konsepsi masyarakat plural diagungkan maka selalu muncul faktor-faktor integratif bagi persatuan nasional dalam riwayat keindonesiaan. Sebaliknya jika konsepsi masyarakat plural tidak digunakan maka konsekuensinya adalah bagaimana membentuk persatuan nasional dan menghadapi ancaman sentimen primordial. Menurut Geertz revolusi integratif akan berhasil jika masyarakat negara baru mampu membuang sentimen primordial beserta perasaan kesukuan dan meleburkan diri dalam nasionalisme menuju negara bangsa modern. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah konsepsi masyarakat plural sengaja dikonstruksi oleh elit politik dan cendekiawan untuk mempertahankan kekuasaan. Wacana masyarakat plural

ditentukan oleh siapa dan bagaimana elit menjalankan pemerintahan.

Jika ditinjau secara mendalam, pemahaman masyarakat plural terkait dengan bagaimana mendefinisikan nasionalisme Indonesia dan etnis sebagai dasar bagi revolusi integratif. Keragaman masyarakat Indonesia diakui oleh negara bukan sebagai potensi disintegratif namun potensi integratif. Mengutip Abdul Wahid (2003) tentang kerusuhan anti-Tionghoa Mei 1998, menunjukkan bahwa Ke-Indonesiaan lama yang dibentuk oleh Orde Baru bersifat uniformistik dan sentralistik tidak dapat lagi dipertahankan validitasnya. Bangsa Indonesia harus kembali pada titik awal untuk merumuskan kembali makna nasionalisme Indonesia untuk menghadapi tantangan zaman ke depan. Makna Ke-Indonesiaan dalam masyarakat plural ditentukan oleh bagaimana setiap komunitas memandang sejarahnya dan mendialogkan dengan komunitas lain. Abdul Wahid (2003) sampai pada kesimpulan nan sejalan dengan nasihat Geertz bahwa Bangsa Indonesia membutuhkan nasionalisme adalah benar karena nasionalisme akan mejadi perekat antarberbagai kelompok sosial tersebut. Selain itu, Wahid (2003) juga mendasarkan pendapatnya pada Eric J. Hobsbawm bahwa sebuah bangsa itu lahir karena ditemukan dan nasionalisme adalah tradisi yang perlu terus digali. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Giddens bahwa negara adalah tempat yang berisi berbagai kekuatan yang berbeda yang saling bergesekan satu sama lain.

Maka tepat nasihat Benedict Anderson untuk Indonesia bahwa nasionalisme adalah sebuah proses yang harus diperjuangkan dari satu generasi ke generasi. Nasionalisme juga dapat dipahami suatu proses untuk menjadi sebuah masa kini

demokrasi masa depan. Akan tetapi nasionalisme tidak bersifat netral tetapi dikonstruksi oleh kekuatan politik dominan ketimbang kontrak sosial. Permasalahannya adalah sejauh mana kepentingan politik elit dalam mengkonstruksi nasionalisme mampu melindungi eksistensi berbagai, beragam, dan beraneka golongan yang merupakan realitas mutlak Indonesia. Maka, nasionalisme harus dimaknai dua arah yaitu kepentingan untuk mengikat seluruh golongan primordial sekaligus memberikan tempat, menghormati, melindungi, dan memberikan jaminan bagi keberlangsungan golongan primordial yang membentuk Indonesia tersebut. Ketika konsepsi nasionalisme didominasi oleh konsepsi politik semata maka didefinisikan sebagai nasionalisme negara, dan kondisi ini tidak akan bertahan lama tergantung dari umur rezim penguasa. Konsepsi nasionalisme semacam ini tidak berakar dari keragaman komunitas.

Masyarakat Sedang Berkembang

Ide tentang pembangunan di negara sedang berkembang terkait erat dengan rasionalitas instrumental Weberian. Max Weber menjelaskan bahwa rasionalitas adalah unsur pokok yang menyebabkan peradaban Barat memiliki pengaruh universal. Banyak peradaban dalam sejarah melakukan pencarian keuntungan namun hanya kebudayaan Barat pencarian keuntungan diselenggarakan dalam kerangka organisasi diatur secara rasional (Abdullah 1979). Perilaku ekonomi kapitalistis adalah pengharapan keuntungan didapat dengan mempergunakan kesempatan tukar menukar jual beli. Berdasarkan pendekatan ini dapat dikatakan bahwa modernisasi dan pembangunan tidak lain adalah praktik ekonomi kapitalis ditujukan terhadap negara-negara sedang berkembang atau belum modern. Sebagai konsekuensinya, jika ingin menjadi

modern maka negara-negara itu harus melalui jalan kapitalisme ekonomi dan modernitas.

Ahli-ahli Indonesia sangat beriman pada pandangan modernitas. Clifford Geertz (1963: 28) mengatakan bahwa masalah pembangunan ekonomi di Mojokuto secara mendasar adalah tata organisasi. Menurut Geertz, kekurangan pengusaha kecil di Mojokuto adalah kekuasaan untuk memobilisasi kapital dan saluran yang dapat mendorong mereka untuk mengeksploitasi pasar. Mereka kekurangan kapasitas untuk menciptakan lembaga-lembaga ekonomi efisien. Sering disebut sebagai pengusaha tanpa kewirausahaan. Berlawanan dengan ekonomi perusahaan ditandai dengan spesialisasi dan pembagian kerja, ekonomi Mojokuto didasarkan pada aktivitas-aktivitas independen dari para pedagang yang saling bersaing dan saling berhubungan melalui kegiatan jual beli barang. Meskipun ekonomi demikian memiliki keuntungan, dapat memperkerjakan orang-orang marjinal namun kerugiannya adalah menjauhkan dan menghambat pengusaha untuk melakukan ekspansi dan membangun pasar (Geertz 1963: 28-29).

David McClelland memberikan saran agar negara dunia ketiga menerapkan nilai-nilai modernitas negara Barat dan membangun kaum wiraswasta modern. Sedangkan Bellah berpendapat bahwa bahwa nilai-nilai universalitas dan motivasi amat diperlukan oleh negara dunia ketiga untuk membebaskan diri dari kungkungan ekonomi tradisional. Sumawinata menyebutkan jika negara dunia ketiga ingin menuju fase tinggal landas mereka memerlukan syarat ekonomis yang pernah dimiliki negara-negara Barat. Yang paling masyhur adalah JJ Rostow. Ia melengkapi teori modernisasi dengan mengenalkan

lima tahap pembangunan ekonomi dari tahap masyarakat tradisional ke masyarakat berkonsumsi tinggi.

Kalangan Neo-Marxist melontarkan kritis keras pada Teori modernisasi. Kritik terhadap modernisasi dari kalangan mainstream ilmuwan sosial antara lain adalah sebagai berikut (Soewarsono 2006): (1) Teori modernisasi terlalu bersifat etnosentris, mengapa negara-negara Barat diletakkan sebagai ujung dari evolusi dan negara-negara berkembang sebagai titik awal; (2) Teori modernisasi yang bersifat linier mengabaikan kemungkinan pencarian dan pengembangan alternatif pembangunan negara berkembang; (3) Teori modernisasi tidak menguji kemungkinan macetnya pembangunan. Sedangkan bagi kalangan Neo-Marxist, teori modernisasi tak lebih dari ideologi perang dingin untuk memberikan legitimasi intervensi Amerika Serikat terhadap kepentingan negara dunia Ketiga. Selain itu, Teori-teori modernisasi tidak menjelaskan dominasi asing dalam kerangka teorinya. Misalnya kolonialisme, fenomena perusahaan multinasional, ketidakseimbangan nilai tukar perdagangan. Para Teoritisi Neo-Marxist berpendapat bahwa negara dunia ketiga secara ekonomi, politik, dan budaya tetap berada dalam dominasi Barat.

Menurut Andre Gunder Frank, Teori Modernisasi hanya menjelaskan faktor dari dalam sebagai penyebab pokok keterbelakangan negara berkembang. Padahal penyebab pokoknya adalah kolonialisme dan dominasi asing. Frank berpendapat bahwa hubungan antara negara Barat dan negara berkembang adalah hubungan eksplotatif antara satelit dan metropolist atau antara Pusat dan Pheriperi yang lahir sejak masa kolonial ketika penjajah membangun kota-kota di tanah jajahan untuk mengambil surplus ekonomi.

Implikasi dari pendekatan modernisasi ini terhadap Indonesia adalah krisis ekonomi 1997. Krisis tersebut merupakan konsekuensi logis dari penerapan pendekatan Teori-Teori modernitas sebagai preskripsi pembangunan di Indonesia. Krisis ekonomi 1997 juga berdimensi politik, sosial, dan kebudayaan yang telah menghancurkan sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir semua negara di Asia Tenggara yang mengikuti jalan pembangunan ekonomi seperti Thailand, Filipina, Malaysia, dan Indonesia terkena krisis.

Hal ini berarti bahwa fundamental modernisasi Indonesia sangat lemah karena gagal menciptakan kekuatan produktif. Hal ini berimplikasi pada ketergantungan Indonesia terhadap modal asing dan hutang luar negeri sebagai satu-satunya penopang kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia. Permasalahan utama dari negara-negara post-kolonial adalah dihadapkan pada pilihan mengikuti jalan modernisasi atau kembali ke *local wisdom*. Cara yang dilakukan oleh Jepang dan Korea selatan bertumpu pada pendekatan modernisasi dalam konteks demokrasi liberal dan ekonomi pasar, tanpa menghilangkan watak tradisional dan kebudayaannya. RRC juga mengembangkan model modernisasi sejak tahun 1978 dalam konteks ekonomi pasar dan sistem politik komunis sehingga menjadi negara sosialis modern pada saat ini.

Formasi kapitalisme di Indonesia

Menurut Yoo Hwan Shin (1989) bahwa kapitalisme Indonesia dibentuk oleh kekuatan elit birokrasi, elit militer, pengusaha pribumi yang dibesarkan oleh elit-elit negara, dan pengusaha Tiong Hoa. Selain itu disebutkan bahwa negara adalah relatif otonom dari kepentingan-kepentingan kelas. Hal tersebut dapat dimengerti mengingat bahwa kelompok kapitalis yang dibentuk

adalah kapitalisme kroni yang bergantung terhadap negara. Dengan demikian, berbeda dengan para *Indonesianist* yang beraliran modernis dan historis-Struktural, Shin berpendapat bahwa baik masyarakat maupun negara memiliki peranan dalam pembentukan kapitalisme Indonesia.

Formasi kapitalisme di Indonesia sebelum dan sesudah perang dingin pada hakekatnya adalah sama dalam arti bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah kapitalisme. Faktor yang membedakan adalah aktor-aktor yang bermain. Sebelum perang dingin, formasi kapitalisme dibentuk oleh elit-elit negara yang terdiri dari birokrasi, militer, teknokrat dan elit-elit pengusaha yang menjadi kroni-kroninya. Sementara itu, sesudah perang dingin, aktor-aktor yang berperan semakin kompleks karena melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional dan organisasi-organisasi keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan World Trade Organization (WTO). Sistem ekonomi dan sosial kapitalisme beserta substansi eksploitasi, dominasi, dan hegemoninya tetap sama, yang berubah adalah para pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa kapitalisme bergeser dari kapitalisme *erzats* atau *crony capitalism* atau kapitalisme yang tidak sempurna menjadi kapitalisme yang sempurna. Dengan demikian, formasi kapitalisme pasca-perang dingin menandai integrasi ekonomi Indonesia ke dalam tatanan kapitalisme internasional.

Perkembangan kapitalisme internasional sendiri secara umum dapat dibagi ke dalam tiga tahap. *Pertama*, periode kolonialisme yakni perkembangan kapitalisme di Eropa yang mengharuskan ekspansi secara fisik untuk memastikan perolehan bahan baku di Tanah Jajahan. *Kedua*, periode *developmentalism* ditandai dengan masa kemerdekaan negara Dunia Ketiga secara

fisik dan dominasi negara-negara bekas penjajah terhadap bekas koloni mereka tetap dipertahankan melalui kontrol teori dan proses perubahan sosial mereka. Kolonialisasi tidak terjadi secara fisik, melainkan melalui hegemoni yakni dominasi cara pandang dan ideologi serta diskursus yang dominan melalui produksi pengetahuan. *Ketiga*, liberalisasi segala bidang yang dipaksakan melalui kebijakan ekonomi neo-liberal: Structural Adjustment Program (SAP) oleh IMF dan disepakati oleh rezim GATT suatu organisasi global yang dikenal dengan WTO.

Masuknya kapitalisme dunia di Indonesia difasilitasi oleh Orde Baru. Salah satu kebijakan yang penting dan didukung oleh IMF, Bank Dunia, dan negara-negara G7 adalah mengundang investasi perusahaan multinasional. Freeport Mc Moran melakukan investasi pertama kali di Papua, sementara Bechtel dan Exxon Mobile melakukan investasi di Aceh pada tahun 1967. Baik Freeport Mc Moran, Bechtel maupun Exxon Mobile telah berperan dalam merusak tatanan sosial dan lingkungan hidup pada daerah-daerah yang ditempati oleh suku Amungme, Komoro, dan Aceh (Hafild, 2004). Perlawanan dan protes yang dilancarkan oleh suku-suku tersebut dihadapi dengan pendekatan militer. Dengan demikian, Foreign Direct Investment (FDI) dalam tingkat tertentu telah berperan terhadap terjadinya konflik dan disintegrasi nasional (*deepening conflict and national disintegration*).

Dialektika dan struktur hubungan ekonomi Indonesia dari zaman kolonial sampai sekarang tidak mengalami perubahan yang signifikan. Walaupun pembangunan ekonomi mampu mengurangi tingkat kemiskinan absolut dari 40% pada tahun 1976 menjadi 11% pada tahun 1996, namun ekonomi rakyat tetap berada dalam posisi termarjinalkan sebagai strata paling

bawah konstelasi ekonomi nasional. Ekonomi rakyat semakin tidak berdaya dan tereksplotasi oleh perkembangan pasar yang berpihak kepada pengusaha besar. Hal ini dibuktikan dalam bentuk menurunnya tingkat upah riil buruh, menurunnya nilai tukar petani, dan semakin tingginya tingkat pengangguran. (Sritua Arief, 1995). Struktur penguasaan produksi tidak terlepas dari sistem ekonomi kapitalistik dan bergantung kepada tata ekonomi global yang tercermin dalam bentuk modal asing dan hutang luar negeri.

Penguasaan surplus ekonomi nasional oleh kekuatan ekonomi dunia di Indonesia terhadap strata bawah struktur sosial bukanlah suatu wacana tetapi telah menjadi realitas sosial politik dalam kehidupan sehari-hari. Kolonialisme dan imperialisme yang berbentuk program-program pembangunan ataupun globalisasi selalu mengkampanyekan kebijakan-kebijakan ekonomi neo-liberal yang bertumpu pada integrasi ekonomi nasional terhadap pasar dunia. Dengan demikian kapitalisme global telah menempatkan Indonesia sebagai objek eksploitasi tata ekonomi global. Pasar bebas telah menjadi ideologi baru bagi ekonom-ekonom dan para penyelenggara kekuasaan di negara-negara berkembang. Padahal pasar bebas tidak lain adalah sebuah instrumen ekonomi negara-negara kapitalis untuk memanfaatkan kelemahan struktural dalam perekonomian negara-negara berkembang. Adapun ciri-ciri utama formasi kapitalisme sebelum dan sesudah perang dingin dapat digambarkan ke dalam bagan berikut:

Tabel 1. Formasi Pembentukan Kapitalisme Indonesia Sebelum dan Sesudah Perang Dingin

	Sebelum perang dingin	Sesudah perang dingin
Unsur-unsur	Birokrasi, militer, pengusaha pribumi, pengusaha Tiong-Hoa	Pengusaha pribumi, pengusaha Tiong-Hoa, dan MNC, IMF, WB, WTO, dll.
Peranan negara	Regulasi dan birokratisasi: peran negara relatif dominant, pengendalian kurs/harga gabah/import/dll.	Deregulasi dan debirokratisasi: peranan negara relatif berkurang dengan adanya deregulasi pasar uang/modal/perdagangan
Peranan swasta	Relatif bergantung terhadap negara	Negara relatif bergantung terhadap kekuatan pasar
Model kapitalisme	Kapitalisme negara: monopoli BUMN dan oligopoli	Ekonomi pasar
Lingkungan internasional	Perang dingin blok Kapitalis vs. Komunis	Tata Ekonomi kapitalisme internasional
Teori-Teori Ekonomi yang dipakai	Teori-teori Keynesian,	Teori-teori neo-klasik: Milton Friedman
Instrumen pengendalian terhadap sistem ekonomi	Kebijakan fiskal	Mekanisme pasar
Wacana yang dibangun	Pembangunan	Globalisasi dan ekonomi pasar
Hubungan antara bisnis dan masyarakat	Konflik dan kekerasan	<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>
Sistem politik negara	Otoritarianisme birokratik	Demokrasi liberal (paska 1998)

Sumber: disarikan dari beberapa sumber

Bureacratic Authoritarian Regime:

Herber Feith meng-kategori-kan lima rezim developmentalis yakni Lee Kuan Yew-Singapura, Park Chung Hee-

Korea Selatan, Shah-Iran, Soeharto-Indonesia, dan Marcos-Filipina. Ia menganalisis cara kerja rezim developmentalis melalui pertumbuhan ekonomi, represi politik, ideologi negara, dan penguatan. Kelima rezim ini berhasil meningkatkan tingkat GNP. Perusahaan-perusahaan transnational menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun represi politik menyertai pembangunan ekonomi baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Feith menyebutkan bahwa pengendalian represif merupakan prasyarat bagi TNC melakukan investasi. Reorganisasi pemerintahan memungkinkan pertumbuhan cepat dan mendorong mekanisme pengendalian represif.

Terdapat tiga tahap pengaturan politik oleh rezim represif developmentalis. Pertama, menghancurkan pusat kekuatan sayap kiri dan nasionalis seperti pembubaran partai-partai politik, serikat buruh, dan organisasi tani. Kedua, mengenakan kontrol ketat terhadap koalisi unsur-unsur pendukung, mengurangi kebebasan kelompok yang berpotensi mengerahkan massa, dan memperluas peran perwira militer dalam aparat pemerintah serta membersihkan angkatan bersenjata dari unsur-unsur oposisi. Ketiga, melakukan intervensi ketika harus menghadapi kekecewaan-kekecewaan yang timbul akibat perubahan politik dan restratifikasi sosial. Rezim represif developmentalis membedakan antara golongan bawah yang terasing dari partisipasi politik dengan golongan atas yang diijinkan untuk mendapatkan kehidupan publik terbuka dan bebas melakukan kritik terhadap pemerintah. Namun, beberapa bagian dari golongan atas menjadi sasaran utama kegiatan represif dan golongan bawah menjadi korban utama dalam pemerataan dan kesempatan kerja dalam pembangunan. Rezim ini memperlakukan angkatan bersenjata dengan terhormat. Birokrasi didominasi oleh teknokrat. Alumni dari universitas-

universitas negara maju. Mereka memiliki kedudukan tinggi terkemuka. Mereka menjadi penghubung antara rezim dengan IMF, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga donor lainnya termasuk perusahaan-perusahaan transnasional.

Jika Rezim Orde Baru disebut sebagai Bureacratic Authoritarian Regime (BAR), maka Orde Lama disebut sebagai rezim Popular Authoritarian Regim (PAR). Persamaan antara PAR dan BAR adalah kedudukan Presiden yang sangat sentral dalam pengaturan pemerintahan yaitu menggunakan metode-metode represif dalam hubungan antara negara dengan masyarakat sipil. Sedangkan perbedaannya adalah jika PAR didukung oleh partai-partai politik dengan militer, maka BAR didukung oleh militer, teknokrat, dan birokrasi. Unsur-unsur pendukung saling bekerjasama dan bergantung kepada kekuasaan presiden. Selain itu, jika PAR lebih dekat kepada rezim Uni Soviet atau RRC, maka BAR lebih dekat ke Amerika Serikat. Fungsi militer dalam kedua rezim represif ini adalah menjaga stabilitas politik. Sedangkan peran dari teknokrat dalam birokrasi yang sangat besar adalah tanda dari penghargaan rezim BAR terhadap ilmu pengetahuan dan pengakuan terhadap modernisasi. Legitimasi kekuasaan dari BAR adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, sedangkan legitimasi dari PAR adalah menciptakan *nation building* dan sosialisme Indonesia.

Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 merupakan dari krisis kekuasaan. Penguasa Orde Baru kehilangan legitimasi kekuasaannya sebagai akibat dari krisis ekonomi yang melahirkan dampak-dampak yang terinstitusionalisasikan dalam bentuk liberalisasi/demokratisasi sistem politik. Salah satu hasil yang signifikan dalam perubahan politik pada tahun 1998 tersebut adalah penataan kembali lembaga-lembaga politik

melalui amandemen UUD 1945. Selain itu, adalah terbukanya akses masyarakat terhadap proses-proses politik yang terjadi pada lembaga-lembaga politik negara. Pemilihan Presiden secara langsung termasuk dalam satu kemajuan yang signifikan dalam kehidupan berdemokrasi. Reformasi telah mengantarkan bangsa Indonesia ke dalam tata kehidupan politik yang demokratis.

Namun, krisis kekuasaan juga menandai meningkatnya peranan kelompok pemodal baik borjuasi lokal maupun internasional sebagai *the ruling class* yang menggantikan sejumlah elit-elit politik sipil dan militer pada masa Pemerintahan Orde Baru. Mereka kemudian berkonspirasi membentuk sebuah oligarki politik untuk menentukan mekanisme bekerjanya sistem demokrasi liberal dan sistem ekonomi liberal. Sistem politik berubah dari otoritarianisme menjadi demokratis namun struktur sosial tetap tidak berubah di mana sejumlah elit masyarakat memegang kendali atas seluruh alat-alat produksi materiil dan intelektual. Hegemoni dan dominasi mengalami transformasi dari sistem politik yang otoriter menjadi sistem politik demokrasi liberal. Jika ditelusuri lebih jauh, struktur penindasan berupa dominasi dan hegemoni tidak lah dihilangkan oleh sistem demokrasi liberal bahkan diperkuat oleh sistem ekonomi neo-liberal.

Style of governance secara substansial tidak berubah dari Orde Baru ke reformasi namun bentuknya yang berubah. Jika Orde Baru disebut sebagai *Bureacratic Authoritarian Regime*, maka Orde reformasi dapat disebut sebagai *Market Authoritarian Regime* (MAR). Kehadiran sistem demokrasi liberal tidak banyak bermanfaat kepada kepentingan massa rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan manakala sistem tersebut menjadi instrumen bagi kelompok pemodal untuk menancapkan dominasi

kekuasaannya. Justeru, demokrasi liberal berkontribusi menyebarkan *style of governance* BAR menjadi lebih menyerap ke segala penjuru tanah air dan sampai ke tingkatan pemerintahan terkecil yaitu desa. Demokrasi liberal adalah transformasi dari authoritarianisme birokratik menjadi otoritarianisme pasar. Kekuatan koersif yang dijalankan militer digantikan oleh kekuatan pemodal. Selain itu, posisi pemodal dengan politisi, militer, dan birokrat hampir tidak dapat dibedakan lagi karena baik elit birokrat, politisi, maupun militer adalah merupakan kelompok pemodal. Sementara itu, kedudukan kaum ilmuwan hampir-hampir adalah memberikan legitimasi kepada sistem yang ada.

Strategi Membangun Ilmu Sosial Postkolonial

Berdasarkan paparan di muka, kita dapat menyimpulkan bahwa konstruksi ilmu pengetahuan sosial Barat di Indonesia berlangsung melalui relasi-relasi dan praktik-praktik kekuasaan yang sudah berlangsung sejak masa kolonial. Dekolonisasi secara politik masih menyisakan persoalan kolonialisasi secara ilmu pengetahuan yang mengikuti kolonialisasi dalam ranah ekonomi. Tantangan ke depan bagi para pengkaji dan peneliti ilmu sosial di Indonesia adalah membangun ilmu sosial poskolonial atau ilmu sosial yang bersifat transformatif, berdasarkan atas kondisi masyarakat Indonesia. Hal ini tidak berarti bahwa teori-teori sosial Barat kita abaikan tetapi tetap kita gunakan sebagai titik awal untuk menjadi landasan kritik dan pengembangan ilmu sosial poskolonial yang transformatif.

Mengutip Prof Purwo Santosa (2011), Ilmu sosial transformatif bukan ilmu tentang ketrampilan. Watak transformatif ilmu sosial bukan ditentukan oleh ketrampilan

teknis melainkan komitmennya untuk mewujudkan realitas baru. Ketika membahas good governance, kepeduliannya bukan hanya pada membongkar ciri-ciri good governance melainkan perilaku bersama untuk memenuhi ciri-ciri ideal good governance. Pengembangan ilmu sosial transformatif mensyaratkan kepewaaian dalam tiga dimensi filsafat ilmu, yakni: ontologi, epistemologi dan aksiologi. Tiga hal ini bersifat kebulatan. Artinya sisi epistemologis dan sisi aksiologis harus mendapatkan perhatian serius. Watak transformatif perlu didasari dengan kejelasan pilihan epistemologis. Ilmu sosial dikembangkan bukan sekadar akumulasi teori melainkan juga memperbaiki relasi sosial yang terjalin. Dan akhirnya, menghasilkan realitas sosial yang jauh lebih baik.

Dalam konteks Indonesia, Lowe (2007) memberikan contoh Iwan Tjitradjaja, Profesor Antropologi UI, melontarkan argumentasi keras bahwa tujuan riset bukan untuk menemukan teori baru tetapi menemukan solusi kreatif untuk menyelesaikan masalah kontrol terhadap sumber daya alam di Sumatra. Ilmuwan ini bekerja pada isu *community forest*. Ia berhadapan dengan persoalan distribusi sumber daya alam, hak kepemilikan, birokrasi, partisipasi, dan kemampuan komunitas lokal untuk mengambil keuntungan dari sumber daya hutan rakyat. Iwan Tjitradjaja memiliki perhatian pada dampak dari kebijakan kehutanan di Indonesia. Selain degradasi hutan studinya juga mengkaji tentang komunitas masyarakat di sekitar hutan. Rehabilitasi hutan yang diperjuangkan ditujukan agar hutan dapat dikembalikan pada masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi isu ini tidak hanya dapat menjadi model dalam studi Asia Tenggara, tetapi juga studi kehutanan masyarakat di Amerika Serikat. Pendekatan tersebut bermula dari penelitian konflik hutan. Ia berjuang untuk

mengembalikan hak-hak penguasaan hutan kembali pada masyarakat melalui cara-cara damai. Fasilitasi masyarakat menjadi fokus penelitian dalam konteks meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

Pengetahuan mengenai pengelolaan hutan oleh masyarakat membantu memikirkan ulang gagasan tentang manajemen lingkungan. Iwan mengomunikasikan persoalan ini dengan pejabat perencanaan di jawatan kehutanan. Ia menemukan bahwa para pejabat tersebut tidak memiliki pengalaman dalam ranah implementasi kebijakan. Iwan memfasilitasi antara birokrat dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Masyarakat jelas memiliki perbedaan kepentingan dalam hal pengelolaan hutan. Oleh karena itu, tim peneliti memfasilitasi mereka untuk mendiskusikan masalah dan metode untuk memecahkan masalah ketika berhadapan dengan birokrasi. Mereka diharapkan dapat mengelola hutan dengan transparan, demokratis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tim peneliti membawa sekelompok birokrat untuk tinggal dan mempelajari hal yang dikerjakan masyarakat dalam menggunakan sumber daya hutan mereka. Dengan demikian, para pejabat menyaksikan langsung interaksi antara petugas kehutanan dengan masyarakat sehingga keduanya dapat mengambil pelajaran yang berharga.

Pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut bukan semata-mata kajian kawasan yang berguna bagi masyarakat. Tidak semua ilmuwan memiliki pengetahuan untuk memecahkan persoalan dunia. Antropolog Amerika Serikat juga menghadapi masalah yang sama, yakni berjuang untuk meyakinkan birokrat untuk berpikir secara etnografi. Cara Tjitradjaja dalam memahami dan bertindak dalam relasi antara birokrat kehutanan,

komunitas masyarakat, dan hutan dalam konteks Asia Tenggara dapat dijadikan model bagi ilmu sosial transformatif.

Contoh lain kontribusi kajian ilmu sosial transformatif berkaitan dengan kajian Papua. Kajian ini dapat dikategorikan dalam kajian kawasan mengingat karakteristik sejarah, bahasa, dan budayanya yang unik dan khas sebagai bagian dari dunia kebudayaan Melanesia di Kepulauan Pasifik. Hasil kajian tim peneliti LIPI di bawah Widjojo dkk menghasilkan buku *Papua Road Map*, berhasil mengidentifikasi empat persoalan mendasar di Papua, yakni (i) sejarah integrasi, status, dan identitas politik yang dipahami berbeda antara Papua dan Jakarta, (ii) kekerasan politik dan pelanggaran HAM yang dialami oleh rakyat Papua selama menjadi bagian dari NKRI, (iii) kegagalan pembangunan di Papua karena implementasi UU Otsus yang tidak optimal, (iv) marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua.

Perbedaan pendapat mengenai sejarah integrasi, status, dan identitas politik Papua tidak dapat diselesaikan melalui kekerasan ataupun pembangunan, tetapi seharusnya diselesaikan melalui dialog yang inklusif dan partisipatif melibatkan pemerintah pusat dan orang Papua. Kekerasan politik dan pelanggaran HAM dapat diselesaikan melalui pengadilan-pengadilan HAM atau rekonsiliasi yang difasilitasi oleh Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Sementara itu, kegagalan pembangunan karena implementasi UU Otsus yang tidak berjalan sesuai dengan UU dapat diselesaikan dengan pembangunan sosial ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah pusat bersama pemerintah Papua dapat merumuskan strategi baru untuk mengimplementasikan pembangunan yang berpusat pada orang asli Papua. Ikhwal marginalisasi terhadap orang asli Papua dapat diselesaikan

dengan kebijakan afirmasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan, atau Papuanisasi.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Republik Indonesia memprakarsai pertemuan eksploratif untuk memungkinkan para pihak yang *concern* dengan permasalahan Papua berdialog mencari pemecahannya. Atas dasar inisiatif tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan Jaringan Damai Papua (JDP) menyelenggarakan beberapa pertemuan eksploratif yang dihadiri oleh perwakilan dari unsur masyarakat sipil dan pemerintah daerah (Pemda) di tanah Papua serta pemerintah pusat. Pertemuan ini ditujukan untuk membangun komunikasi yang konstruktif dan secara bersama-sama mengidentifikasi masalah, indikator dan solusi bagi upaya-upaya penyelesaian konflik Papua secara damai dan bermartabat. Selain itu, pertemuan seperti ini juga dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman atau perbedaan pandangan yang telah berlangsung selama ini sehingga memunculkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antara pemerintah dan masyarakat Papua dalam menyelesaikan persoalan di tanah Papua.

Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (1979). *Agama, Etos Kerja, dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Budiman, M. (2013). Perjalanan para intelektual dan pencarian kembali kekuasaan. *Jurnal Kebudayaan Kalam online* di Serambi Salihara, 16 Juli 2013.

- Bhaha, H. (2007). *The location of culture* (5th ed). London, New York: Routledge.
- Dant, T. (2013). *Knowledge, Ideology & Discourse: A Sociological Perspective*. Routledge.
- Derrida, J. (2016). *Of grammatology*. JHU Press.
- Feith, H. (1980). Rezim-Rezim Developmentalis Represif di Asia: Kekuatan Lama, Kerawan Baru. *Prisma* No. 11 November 1980 Tahun IX.
- Furnivall, J. S. (1939). *Netherland India a Study of Plural Society*. Cambridge University Press.
- Foucault, M. (2002). *The order of things: An archaeology of the human sciences*. Psychology Press.
- Geertz, C. (1973): 'The integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New State' in *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books. 251-311.
- Geertz, C. (1963). *Peddlers and Princes, Social Change and Economic Modernization in two Indonesia Towns*. Chicago dan London: The University of Chicago Press.
- Habermas, J. (2015). *On the logic of the social sciences*. Wiley & Sons.
- Hadiz, V. R., & Dhakidae, D. (2005). *Social science and power in Indonesia*. Equinox Publishing.

- Industrial Research Institute and Research & Development. (2016). 2016 Global R&D Funding Forecast. Diakses dari Website IRI https://www.iriweb.org/sites/default/files/2016GlobalR%26DFundingForecast_2.pdf
- Joseph, J (Ed.). (2005). *Social Theory: A reader*. Edinburg: University Press Ltd 2005, hal. 193-201.
- Jones, P., Bradbury, L. & Le Boutlier, S. (2016). *Pengantar teori-teori sosial* (edisi kedua), diterjemahkan oleh Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lowe, C. (2007). Recognizing scholarly subjects. *Knowing Southeast Asian Subjects*, 109–138.
- Kayam, U. (1989). “Transformasi Budaya Kita,” Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, 19 Mei
- Finlayson, Alan. 2014. *Contemporary Political Thought: A Reader and Guide*. Edinburgh University Press
- Moore-Gilbert, B. (2000). *Postcolonial Theory: Contexts, Practices, Politics*. London: Verso.
- Nasikhun. J. (1996). Pembangunan dan Dinamika Intgerasi Nasional dalam Masyarakat Majemuk. *Dalam Ariel Heryanto dkk. Nasionalisme Reflkesi Kritis Kaum Ilmuwan*. Yogyakarta: PP
- Oey-Gardiner, M. (2010). *Final Report: Study of the role of The indonesian institute of sciences (lipi) In bridging between*

Research and development policy. Jakarta: PT Insan Hitawasana Sejahtera.

Poloma, M. (1984). *Sosiologi Kontemporer. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Tim Penerjemah Yayasan Solidaritas Gadjah Mada.* Jakarta: CV rajawali.

Ritzer, G. (1996). *Sociological theory.* Tata McGraw-Hill Education.

Santoso, P. (2011). *Ilmu sosial transformatif. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 19 April 2011.*

Said, E. (1979). *Orientalism.* 1978. *New York: Vintage, 1994.*

Shin, Y. H. (1989): *Demistifying the capitalist state: Political Patronage, Bureaucratic Interest, and Capitalist information in Soeharto's Indonesia.* Ph. D thesis Yale University. 1-88.

Soetrisno, L. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif (ed) Soetrisno.* Yogyakarta: Penerbit Kanisius hal 19-42.

Soewarsono & So, A. Y. 2006. *Perubahan Sosial dan Pembangunan.* Jakarta: LP3ES.

Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak?. *Can the subaltern speak? Reflections on the history of an idea,* 21-78.

Turner, J. H., & Turner, P. R. (1998). *The structure of sociological theory.* Belmont-CA: Wadsworth Publishing Company.

Veeger, K.J. (1993). *Pengantar Sosiologi.* Jakarta: Gremedia

Widjojo, M. S., Amiruddin, A. R. E., Pamungkas, C., & Dewi, R. (2008). papua road map. *Indonesian Institute of Sciences, Jakarta.*

5

Merajut Ilmu Sosial Keindonesiaan melalui Penelitian Kearifan Lokal

Hastuti¹

Kearifan lokal di Indonesia seperti Subak di Bali, Pahomba di Nusa Tenggara, dan Sasi di Maluku telah berhasil menuntun masyarakat wilayah tersebut mencapai keseimbangan dan keselarasan hubungan dengan lingkungannya masih terus terjaga. Perbatasan Jawa Tengah DIY ada gunung berapi yang masih aktif, masyarakat Lereng Merapi melakukan labuhan atau sedekah Merapi secara periodik dan turun temurun, saat ini ritual tersebut dikuatkan dengan ritual penanaman pohon untuk melindungi Lereng Merapi agar tetap terjaga sebagai kawasan penyangga. Masyarakat di Indonesia sebagian besar memiliki warisan nenek-moyang yakni kearifan lokal berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus yang beragam dalam rangka menjaga keseimbangan alam. Ketika kearifan lokal masih ditaati dan dijadikan kebiasaan hidup pada masyarakat terbukti mampu melindungi wilayah tersebut dari kerusakan lingkungan baik lingkungan alam, budaya dan sosial seperti Sasi di Maluku dan Subak di Bali. Masyarakat Baduy memiliki kearifan lokal dengan menjaga keseimbangan dan keselarasan dengan alam. Masyarakat Baduy dalam, memiliki ajaran tentang menjaga serta

¹ Dosen dan Ketua Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, UNY

melestarikan alam. Hal tersebut yang menciptakan masyarakat Baduy hidup selaras berdampingan dengan alam secara harmonis. Masyarakat Baduy tidak mengeksploitasi alam dengan semena-mena, mereka menggunakan seperlunya yang ada di alam dan disertai dengan pelestarian alam (Raden Cecep Eka Permana, Isman Pratama Nasution, dan Jajang Gunawijaya, 2011).

Kearifan lokal menjadi sumber inspirasi untuk peneliti ilmu sosial. Teori-teori sosial dengan paradigma barat telah lama mengkooptasi ilmuwan sosial di Indonesia. Perbagai persoalan sosial yang terjadi di Indonesia didekati dengan teori ilmu sosial yang selama ini dikembangkan dari pemikiran barat. Benar jika batas yang jelas antara ilmu dengan orientasi barat dan bukan barat sulit diterapkan dalam perkembangan ilmu secara utuh. Namun tak dapat menutup mata bahwasanya teori yang sudah ada tersebut sering kali mengalami kegagalan apabila diterapkan untuk pemecahan masalah sosial di Indonesia.

Ditengah hiruk pikuk dinamika ilmu sosial saat ini, muncul kesadaran yang diawali dari diskusi-diskusi kecil hingga saat ini sudah dilakukan langkah-langkah lebih lanjut guna mekonstruksi ilmu sosial keindonesiaan di perguruan tinggi. Diskusi yang diadakan di sebuah perguruan tinggi yang memiliki perhatian di bidang ilmu sosial, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta untuk menggagas konstruksi ilmu sosial keindonesiaan. Keprihatinan betapa makin kompleksnya persoalan sosial yang dihadapi di Indonesia, semakin mendorong peneliti, pengajar dan pemerhati ilmu sosial di Fakultas Ilmu Sosial menggagas upaya pengembangan ilmu sosial keindonesiaan. Gagasan yang berharap mampu memberi sumbangan pemikiran untuk mencari solusi dan menemukan teori-teori ilmu sosial dengan aras keindonesiaan

Pemikiran tentang ilmu sosial keindonesiaan ditawarkan sebagai gagasan yang harus segera diwujudkan dengan langkah nyata. Kegiatan ilmiah dalam bingkai pengembangan ilmu dengan diskusi, penulisan buku, seminar ilmiah, studi banding dan penelitian diarahkan untuk merajut lembar demi lembar eksemplar guna menemukan dan mekonstruksi teori sosial keindonesiaan. Bagian yang sedang dikerjakan saat ini mencoba mengajak seluruh civitas akademika untuk melakukan riset yang diarahkan untuk menghasilkan eksemplar demi eksemplar temuan ilmiah dari kajian tentang kearifan lokal. Kearifan lokal diyakini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Bentuk kearifan yang bervariasi dari satu tempat ke tempat di Indonesia berkaitan dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, alam diyakini dapat dijadikan salah pijakan untuk menemukan teori teori sosial keindonesiaan

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta saat memiliki tujuh rumpun keilmuan sosial yang dikembangkan dibawah payung PKNH, Pendidikan Geografi, Ilmu dan Pendidikan Sejarah, Pendidikan Sosiologi, Administrasi Negara, Pendidikan IPS, dan Ilmu Komunikasi. Masing-masing disiplin tersebut tentu saja memiliki paradigma keilmuan yang berbeda untuk melakukan riset keilmuan yang dilakukan sering dikenal sebagai objek formal. Rumpun disiplin keilmuan sosial memiliki objek material yang sama yakni manusia dengan segala aktifitas kehidupannya. Objek material pelaksanaan riset yang akan dilakukan saat ini adalah kearifan lokal merupakan sisi kehidupan manusia dalam melakukan kearifan terhadap kehidupannya.

Ilmu Sosial Keindonesiaan

Ilmu sosial telah berkembang dalam cabang disiplin ilmu yang bervariasi. Di Indonesia ilmu sosial menjadi subjek matter yang dikembangkan di banyak perguruan tinggi. Tulisan dan hasil penelitian ilmu-ilmu sosial dikembangkan dengan mengacu teori barat telah mengkooptasi pengembangan dan pemikiran ilmu sosial di Indonesia selama beberapa dekade. Kesadaran untuk mengkaji ilmu sosial keindonesiaan lahir di sebuah kampus Universitas Negeri Yogyakarta tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial hampir setengah dekade ini. Guna menunjang pengembangan ilmu sosial di Indonesia upaya penelitian, membuat himpunan atau asosiasi yang menjadi wadah diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah telah dilakukan. Eksemplar ilmu sosial baik dari kajian teori yang sudah ada (yang umumnya mengacu teori dari barat) sudah banyak dijumpai. Disamping itu ada pula hasil- hasil penelitian yang dipublikasi melalui jurnal ilmiah dan sebagian menjadi dokumen di perguruan tinggi.

Ditengah gegap gempita pengembangan ilmu sosial di Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial UNY mencoba untuk menggali ilmu sosial keindonesiaan yang dituangkan dalam misi fakultas. Sejak empat tahun lalu sebenarnya gagasan tentang ilmu sosial yang ingin dikembangkan dengan karakter keindonesiaan mulai dilontarkan. Gagasan tentang ilmu sosial yang mampu menghadirkan teori ilmu sosial yang memiliki karakter dan kekuatan analisa dengan kajian untuk pemecahan persoalan di Indonesia.

Sampai saat ini masih terus dicari format tentang ilmu sosial keindonesiaan dengan berbagai langkah kegiatan ilmiah mulai dari dikembangkan kurikulum yang mengarah pada pengembangan ilmu sosial keindonesiaan, diskusi ilmiah secara

rutin, seminar, aktif dalam perhimpunan ilmuwan dan peneliti ilmu sosial dan penelitian untuk menemukan konstruksi ilmu sosial keindonesiaan. Harapan yang paling mendasar adalah bagaimana dapat ditemukan teori ilmu sosial keindonesiaan untuk memecahkan berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia. Gagasan pengembangan ilmu sosial keindonesiaan tentu tidak dapat dilepaskan dari konstalasi pengembangan ilmu sosial yang telah ada dan berkembang sejak lama. Mengingat dari hal tersebut maka ilmu sosial yang dikembangkan sesuai dengan konsep yang ada. Fakultas Ilmu Sosial, UNY mengembangkan ilmu sosial dibidang PKnH, Pendidikan Geografi, Ilmu dan Pendidikan Sejarah, Pendidikan Sosiologi, Administrasi Negara, Pendidikan IPS, dan Ilmu Komunikasi.

In the second edition of the Social Science Encyclopedia, Ralf Dahrendorf presented a more contemporary definition: The social sciences include economics, sociology (and anthropology) and political science. At their boundaries, the social sciences reach into the study of the individual (social psychology) and of nature (social biology, social geography). Methodologically, they straddle normative (law, social philosophy, political theory) and historical approaches (social history, economic history). In terms of university departments, the social sciences have split up into numerous areas of teaching and research, including not only the central disciplines, but also such subjects as industrial relations, international relations, business studies, and social (public) administration (Nancy L. Herron, 2002).

Kajian ilmiah seperti diskusi, penelitian, penulisan buku dengan mengkaji teori dan menggali objek penelitian di lapangan

terus dilakukan oleh civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial, UNY. Secara eksplisist upaya terus menerus dilakukan termasuk membangun jaringan dengan ahli-ahli ilmu sosial dari dalam maupun luar negeri untuk studi banding. Saat ini penelitian sedang ditawarkan dalam rangkaian menuju pengembangan ilmu sosial keindonesiaan dengan aspek kajian kearifan lokal. Penelitian kearifan lokal dilakukan dengan paradigma masing-masing disiplin keilmuan yang dikembangkan di fakultas ilmu sosial.

Mengapa Harus Kajian Tentang Kearifan Lokal?

Merunut berbagai peristiwa yang menyertai perjalanan sejarah kebangsaan di Indonesia. Indonesia dengan karakter unik dihadapkan dengan persoalan- persoalan berat yang menghujam kebhinekaan tetapi akhirnya dapat menguatkan rasa kebangsaan antara lain dengan tetap memegang teguh kebhinekaan tersebut. Indonesia memiliki kearifan lokal yang bervariasi dari satu tempat ke tempat lain yang mampu menjadi penjaga keharmonisan sosial, budaya, dan alam sejak lama.

Kearifan Lokal merupakan pengetahuan eksplisit yang muncul dari periode yang panjang dan berevolusi bersama dengan masyarakat dan lingkungan di daerahnya berdasarkan apa yang sudah dialami (Sudarmin dan Sri Endang Pujiastuti, 2013). Jadi dapat dikatakan, kearifan lokal disetiap daerah berbeda-beda tergantung lingkungan dan kebutuhan hidup. Kearifan Lokal memiliki beberapa ciri-ciri memiliki kemampuan mengendalikan, mempunyai kemampuan mengendalikan, merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar, dan memberi arah perkembangan budaya, serta memiliki kemampuan mengintegrasikan atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan

lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat.

Kearifan lokal dalam pendekatan kebudayaan, penguatan modal sosial, seperti pranata sosial budaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup penting sebagai pedoman. Manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan akan memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan (Kuntjaraningrat, 2007). Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan. Pengetahuan tentang lingkungan setempat dijadikan pedoman yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan pemukimannya. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam (Roikhwaphut Mungmachon. 2012).

Contoh tentang kearifan lokal sebagai nilai yang bersifat fundamental dalam masyarakat yang mampu menjaga sumberdaya alam di Jawa. Mitos menjadi bagian dari sistem

kepercayaan masyarakat. Sistem kepercayaan yang dimiliki suatu masyarakat tentu akan berpengaruh pula pada pola pikir dan tingkah laku yang nantinya berujung pada cara-cara pengelolaan lingkungan. Diceritakan dalam Babad Tanah Jawa memberikan pelajaran kepada masyarakat bagaimana sikap manusia terhadap alam. Prinsip konservasi yang dibutuhkan adalah rasa saling menghormati dan menjaga alam, masyarakat cenderung akan berpikir ulang jika melakukan kegiatan di tempat-tempat yang dianggap *angker*. Suatu tempat yang dianggap *angker* membuat aktifitas manusia jarang dilakukan di tempat tersebut. Hal ini justru dapat menjaga keseimbangan ekosistem karena kurangnya aktifitas manusia. Dewi Sri yang menjelma sebagai ular sawah. Mitos ini ada jauh sebelum ilmu pengetahuan tentang lingkungan berkembang. Masyarakat petani mengkeramatkan ular sawah karena dianggap sebagai jelmaan dari Dewi Sri yang membawa keberkahan dan kesuburan sawah. Lewat kaca ilmu pengetahuan adanya ular sawah tersebut akan membantu petani dalam mengendalikan hama terutama tikus sawah dan kotorannya menjadi pupuk untuk menyuburkan lahan. *Sesajen* merupakan seperangkat persembahan yang digunakan untuk menghormati penunggu tempat-tempat tertentu, seperti pohon besar, muara sungai, dan lain-lain. Pohon yang diberi *sesajen* menghalangi seseorang untuk menebang atau menghindari terjadinya penebangan pohon tersebut.

Kearifan lokal untuk mitigasi bencana telah berhasil membuat ancaman bencana dapat ditekan, apabila masyarakat memiliki kewaspadaan yang tinggi dengan memperhatikan kearifan lokal seperti tanda-tanda alam yang telah dikirimkan dari lingkungan mereka. Lereng Merapi merupakan kawasan penyangga bagi kawasan di bawahnya meliputi terutama

Yogyakarta sehingga pengelolaan lingkungan di Lereng Merapi akan berdampak pada kawasan yang lebih luas. Masyarakat di Lereng Merapi menganggap vulkan ini sebagai sahabat karena di tempat tersebut mereka harus bertahan hidup secara turun temurun. Sebagian pengetahuan terkait kearifan lokal disampaikan leluhur secara rasional dan benar, meski ada yang bersifat mitos bahkan kurang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga diperlukan diskusi terus menerus dan kajian secara ilmiah untuk menghidupkan kearifan lokal di Lereng Merapi agar dapat membantu mitigasi bencana sehingga resiko terhadap bencana dapat ditekan (Hiryanto dan Kartika Nur Fathiyah, 2013). Kesadaran para pemerhati mengenai pentingnya kearifan lokal untuk menjaga kelangsungan hidup yang lebih sejahtera di muka bumi sehingga akhir-akhir ini kearifan lokal menjadi ranah kajian ilmiah dan penelitian dari berbagai disiplin, tak terkecuali ilmu sosial.

Ketika Merapi sedang erupsi masyarakat selalu waspada karena ada keyakinan yang berkembang di masyarakat Lereng Merapi, bahwa "*Merapi lagi nduwe gawe*" ada batas waktunya setelah terjadinya erupsi selesai maka berkah akan menghampiri masyarakat. Tumpukan pasir dan batu sebagai sumber pendapatan, wisatawan yang datang tanpa diundang adalah berkah sebagai sumbangan secara ekonomi bagi masyarakat di Lereng Merapi. Masyarakat Lereng Merapi memiliki kearifan lokal yang mengajarkan kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan ketika Merapi sedang erupsi melalui tanda-tanda alam yang dikirimkan dalam kehidupan mereka. Kearifan lokal yang mampu menjadikan mereka yakin sehingga dijadikan pedoman terhadap keputusan apa yang akan diambil saat Merapi erupsi disadari benar oleh masyarakat bahwa erupsi Merapi secara periodik terus berlangsung mengingat karakter Merapi

sebagai vulkan aktif. Kearifan lokal dalam melakukan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman Merapi dilakukan antara lain dengan memperhatikan tanda-tanda alam sehingga menjadi kearifan lokal yang terus dipelihara dari generasi ke generasi. Masyarakat Lereng Merapi terus memelihara lingkungan mereka mengingat betapa pentingnya menjaga lingkungan sebagai penopang kehidupannya seiring dengan wilayah Lereng Merapi yang semakin dipadati penduduk dengan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya.

Kearifan lokal yang masih berlaku dan tetap terjaga menjadi perilaku, kebiasaan, bahkan menjadi budaya senantiasa akan menjadi penjaga lingkungan di Lereng Merapi meskipun telah terjadi modernisasi masyarakat di wilayah tersebut. Interpretasi masyarakat dalam mengelola lingkungan yang merupakan bagian dari kepercayaan dalam sistem dan norma-norma sosial sehingga tercermin dalam ekspresi budaya, tradisi, mitos dan cerita-cerita yang dibangun secara rasional akan tetap diterima masyarakat seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Kearifan lokal akan tetap mampu melahirkan kebijaksanaan sebagai modal sosial, bahkan rangkaian perjalanan kearifan lokal dalam memelihara kehidupan telah terbukti bermanfaat untuk menjaga lingkungan sesuai dengan peruntukannya bagi kelangsungan hidup masyarakat di Lereng Merapi.

Keberadaan lingkungan di suatu wilayah memiliki keterkaitan dengan lingkungan wilayah lain sebagaimana diketahui bahwa kerusakan lingkungan di Lereng Merapi sebagai wilayah hulu di Daerah Istimewa Yogyakarta, akan berpengaruh terhadap lingkungan di wilayah lain terutama di wilayah hilir. Perubahan lingkungan di hulu Lereng Merapi akan berpengaruh terhadap kehidupan wilayah hilir, dengan menjaga lingkungan

Lereng Merapi sesuai peruntukannya maka kenyamanan hidup selaras alam di wilayah Merapi (hulu dan hilir) maupun wilayah sekitarnya akan terus terwujud.

Penelitian Tentang Kearifan Lokal

Kearifan lokal lahir dari rangkaian *learning by experience* kemudian dipertahankan dan diturunkan dari generasi ke generasi guna menciptakan keteraturan dan keseimbangan kehidupan (Sugeng Setyo Cahyanto, Bonafesius SP, Aktaabiik Muktaman, 2012). Kearifan lokal tidak diperoleh melalui pendidikan, namun pengalaman sepanjang kehidupan mereka secara turun temurun senantiasa akan menuntun perilaku masyarakat dalam mewujudkan keselarasan hidup mereka. Kearifan lokal menjadi perilaku, budaya, dan kebiasaan melalui proses panjang dalam waktu lama bahkan dari generasi ke generasi sehingga diyakni memberikan kebaikan- kebaikan.

Local wisdom refers to the knowledge and abilities of local people that have been accumulated and disseminated as human potential or capability to solve problems, adapt, learn and transmit to future generations (Rattiya Pongsiri, Songkoon Chantachon, dan Noipranorm Kiantong, 2013)

Masyarakat banyak yang memiliki kearifan lokal yang berlaku dalam kelompoknya. Kearifan lokal telah membawa masyarakat di berbagai wilayah yang memilikinya dapat bertahan dan berhasil menjalani kehidupannya dengan baik. Masyarakat memegang teguh kearifan lokal yang diterapkan dalam kehidupan mereka sehingga diyakini banyak memberikan manfaat dalam menjaga kelangsungan hidup mereka. Saat ini kearifan lokal banyak diyakini oleh berbagai kalangan

selayaknya terus dikaji kembali secara keilmuan untuk menjelaskan betapa kearifan lokal dapat menuntun manusia untuk hidup dalam keseimbangan. Begitu pentingnya kearifan lokal untuk menjaga lingkungan sehingga harus dijelaskan secara ilmiah pada generasi yang semakin materialistis dan rasional.

Mengapa penelitian harus dilakukan sebagai bagian pengembangan ilmu?. Penelitian harus dilakukan dan sebaiknya dilakukan pula oleh peneliti yang kompeten dibidangnya. Kompetensi ini agar peneliti dalam melakukan pengambilan keputusan terhadap rangkaian kerja penelitian secara mandiri dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan bidang keahlian peneliti. Peneliti dapat melakukan pengambilan keputusan secara mandiri terhadap objek penelitiannya karena peneliti benar-benar mengetahui tentang seluk beluk bidang penelitiannya.

Penelitian dilakukan untuk penyempurnaan pengetahuan yang ada atau akuisisi pengetahuan. Penelitian ditujukan untuk membantu membuat keputusan agar terjadi perbaikan atau perluasan pengetahuan dalam bidang tertentu. Kemajuan ilmu ditentukan oleh gerak langkah penelitian pada bidangnya. Semakin banyaknya penelitian yang berkualitas tentu saja akan secara signifikan berpengaruh terhadap peran ilmu tersebut dalam menemukan teori, mengembangkan teori dan aplikasi keilmuan.

Melakukan penelitian berarti merangkai pemikiran ilmiah baik secara induktif maupun deduktif sehingga akan membawa pada berpikir logis dan sistematis. Peran penelitian di beberapa bidang baik untuk ilmu dasar terkait dengan membangun teori dan bidang ilmu terapan agar ilmu dapat

diterapkan secara signifikan akan membawa pada kemajuan ilmu (Anol Bhaacherjee, 2012).

Cara berpikir induktif dan deduktif tentu saja diperlukan pemilihan tepat agar penelitian yang dilakukan memiliki hasil yang memadai mulai dari pemecahan masalah, metode, dan pelaporan hasil. Semakin kompleks permasalahan penelitian diperlukan metode penelitian yang tepat agar mampu untuk memecahkan permasalahan secara efektif dari segi anggaran, waktu, tenaga, dan hasil yang diperoleh dapat bermanfaat secara optimal baik untuk penelitian fundamental maupun penelitian terapan serta jenis penelitian lain.

Saat ini berbagai institusi telah memiliki lembaga penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan peran dan kinerja institusi yang bersangkutan. Melalui penelitian sebuah institusi dapat merancang berbagai kebijakan secara tepat sehingga institusi dapat bekerja lebih baik mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini penelitian dilakukan dalam rangka melaksanakan misi untuk menemukan teori-teori ilmu sosial keindonesiaan. Penelitian sebagai kegiatan ilmiah yang memiliki peranan penting dalam pengembangan ilmu diperlukan persyaratan tertentu untuk melakukan kegiatan penelitian. Penelitian dalam rangka merajut ilmu sosial keindonesiaan dengan kajian tentang kearifan lokal dilakukan dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan sebagai upaya membandingkan variasi kearifan lokal pada satu tempat tertentu dan kearifan lokal antar tempat satu dengan tempat lain
2. Penelitian dilakukan dalam rangka untuk mengkorelasikan tentang kearifan lokal dikaitkan dengan

kehidupan masyarakat pada satu tempat tertentu dan waktu tertentu.

3. Penelitian dilakukan untuk bertindak, intervensi, dan melakukan perubahan. Langkah ini dapat dilakukan berdasar pada nilai-nilai yang dapat dipetik dari kearifan lokal yang berlaku pada satu tempat dan waktu tertentu.
4. Menjaga keberadaan variasi kearifan lokal di Indonesia sebagai modal dasar yang potensial dalam kajian ilmu sosial keindonesiaan, mengingat kearifan lokal sebagian sudah mulai terpinggirkan bahkan hilang dari kehidupan masyarakat di Indonesia.
5. Penelitian dapat dilakukan untuk menemukan teori- teori baru terkait dengan kearifan lokal pada berbagai wilayah di Indonesia sebagai bagian penting dalam merajut ilmu sosial keindonesiaan.

Penutup

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan penting untuk menemukan teori-teori baru dan pemecahan persoalan sesuai bidang keilmuan masing-masing. Dalam rangka menemukan teori-teori baru terkait ilmu sosial keindonesia dilakukan penelitian yang diawali dengan kajian tentang kearifan lokal. Cara tersebut diharapkan mampu menjadi sumber gagasan atau inspirasi untuk memberi sumbangan pemikiran dalam menemukan/ mencari model atau teori ilmu sosial yang lebih cocok dengan pemikiran dan pemecahan persoalan sosial di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anol Bhaacherjee. (2012). *Social Science Research: Principles, Methods, and Practices*. The USF Tampa Library Open Access Collections at Scholar Commons.
- Babbie, Earl R. (1994). *What is society?: reflections on freedom, order, and Change*. Pine Forge Press
- Koentjaraningrat. (2007). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Muslimin Machmud. (2013). Heritage Media and Local Wisdom of Indonesian Society. *Global Journal of Human Social Science Arts and Humanities Vol 13 Issue 6*. 2249 – 460
- Tamalene, et all. (2015). Climate changes mitigate anticipation strategy based on local wisdom - a study of Tobelo (Togutil) in Halmahera Island, Indonesia. *Journal of Biology and Earth Science*.2084 -3577
- Nancy L. Herron. (2002). *The Social Sciences A Cross-Disciplinarry Guide to Selected Sources*. A Division of Greenwood Publishing Group, Inc. Greenwood Village, Colorado
- Permana, R., Nasution, I., dan Gunawijaya, J. (2011). Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy, *Makara Sosial Humaniora, Vol. 15, No. 1, Juli 2011: 67-76*
- Roikhwanphut Mungmachon. (2012). Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure. *International Journal of Humanities and Social Science* .

Sudarmin dan Sri Endang Pujiastuti. (2013). Scientific Knowledge Based Culture and Local Wisdom in Karimunjava for Growing Soft Skills Conservation.

6

Penemuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara melalui *Local Wisdom* Masyarakat Jawa¹

Eny Kusdarini²

Tulisan ini diangkat untuk memberikan gambaran tentang penemuan asas-asas umum pemerintahan yang baik melalui nilai-nilai *local wisdom* yang telah berkembang pada masyarakat di Indonesia. Hal ini dikemukakan karena pada awalnya asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berkembang dalam Hukum Administrasi Negara adalah merupakan bagian dariu asas-asas hukum tidak tertulis. Walaupun pada saat ini konsep asas-asas tersebut sudah banyak yang dituangkan secara formal dalam hukum tertulis di Indonesia. Namun, sebenarnya masih banyak konsep-konsep asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB) yang berasal dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Selama ini, penuangan AUPB ke dalam hukum tertulis oleh pembuat undang-undang banyak yang mengacu dan

¹ Sebagian tulisan ini pernah dimuat dalam Jurnal Penelitian Humaniora Vol 21, Nomor 1, April 2016

² Dosen pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial UNY

mangadopsi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dari luar Indonesia. Pada hal sebetulnya banyak nilai-nilai lokal yang dapat dijadikan sebagai bahan atau materi untuk mengembangkan AUPB dalam Hukum Administrasi Negara Indonesia. Bahan-bahan itu bisa diketemukan dari nilai-nilai kearifan lokal yang telah berkembang dalam masyarakat termasuk masyarakat Jawa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pengembangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik melalui nilai-nilai *local wisdom* Keraton Yogyakarta pada tahun 2014 dapat diketemukan bahan atau materi asas-asas umum pemerintahan yang baik dari masyarakat Jawa yang telah dipraktekkan dan dijalankan oleh masyarakat di sekitar Keraton Yogyakarta sejak konsep AUPB masuk ke Indonesia. Sebagai contoh nilai yang ditemukan dan dapat diapakai sebagai bahan atau materi asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah ungkapan jawa: *berbudi bawa leksana ambeg adil para marta, sabda pandhita ratu tan kena wola-wali, manunggaling kawula gusti* dan juga ajaran Ki Hajar Dewantoro yang cukup dikenal dan juga telah dilaksanakan dalam dunia pendidikan, yakni seorang pemimpin itu seharusnya melaksanakan nilai-nilai falsafah Jawa: *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso* dan *tut wuri handayani* dan juga nilai-nilai lokal masyarakat Jawa lainnya yang telah lama dipraktekkan.

Nilai-nilai lokal masyarakat Jawa ini dapat diterapkan dan dipraktekkan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dapat dituangkan dalam konsep AUPB yang nilai-nilainya diambilkan dari nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat Indonesia. Asas-asas pemerintahan yang baik ini seharusnya dilaksanakan oleh para pelaksana pemerintahan di Indonesia

baik dalam lingkup eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Di dalam menjalankan roda pemerintahan ini mereka harus mengindahkan AUPB sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang secara formal telah diundangkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2014³. Hal ini perlu dilakukan oleh alat pemerintahan dalam arti luas, supaya mereka tidak melakukan tindakan-tindakan tercela dalam mengantarkan masyarakat menuju pada kesejahteraan pada tipe *welfare state* (negara kesejahteraan).

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan alenia keempat UUD 1945 yang memuat tentang tujuan dari didirikannya negara Indonesia, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan tujuan negara dan mengantarkan masyarakat Indonesia menuju pada pelabuhan kesejahteraan ini maka perilaku aparat pemerintah di samping harus mengindahkan aturan-aturan hukum untuk memenuhi asas legalitas juga harus melaksanakan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Pada masyarakat Jawa sebetulnya sudah dikenal sejak lama nilai-nilai yang dianggap baik yang dapat dipakai sebagai pedoman tingkah laku aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai itu dikembangkan berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*) yang telah berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai yang telah ada ini dapat dikembangkan menjadi

³ Lihat UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

sebuah asas dalam pemerintahan yang baik dan dapat dipakai sebagai patokan dan pedoman bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Contoh nilai-nilai kearifan lokal di keraton Yogyakarta yang bisa dijadikan untuk pengembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah seperti apa yang dijelaskan oleh PJ Suwarno⁴ mengenai *wara-wara* yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX yang dimuat dalam Maklumat tanggal 19 September yang berisi nasehat-nasehat yang dituangkan dalam tulisan yang berjudul “*kautaman niti priksa garbane dewe*” (keutamaan mawas diri) yang berisi ajaran tentang arti kemerdekaan, berani mengakui kesalahan pribadi, menjunjung tinggi keutamaan masyarakat berdasarkan semboyan “*sayuk rukun, sepi ing pamrih rame ing gawe*”. Dimaksudkan dengan semboyan ini adalah bekerja keras tanpa pamrih. Nilai-nilai ini sebetulnya berasal dari nilai-nilai falsafah Jawa yang telah berkembang di sekitar Keraton Yogyakarta.

Peranan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Kehidupan Ketatanegaraan di Indonesia

Kata “peranan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁵, diartikan sebagai: 1) “bagian yang dimainkan oleh seorang pemain”, 2) “tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”. Di dalam konteks tulisan ini yang dimaksudkan dengan “peranan” adalah bagian yang dimainkan oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kehidupan ketatanegaraan

⁴ PJ Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*. (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm: 172

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan kesembilan Edisi IV*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm 1051

di Indonesia yang dilaksanakan oleh aparat pemerintahan dalam arti yang luas. Dimaksudkan dengan aparat pemerintahan dalam arti yang luas, yakni aparat pemerintahan di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif serta aparat pemerintahan lainnya yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-ndangan lainnya⁶.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan (administrasi negara) dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam bagian penjelasan pasal demi pasal pada undang-undang tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap ketentuan pasal 1 angka 17. Hal ini berarti, bahwa dalam semua pejabat pemerintahan di Indonesia dalam menjalankan kewenangannya dan/atau di dalam melakukan tindakan-tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus menggunakan acuan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahkan tidak hanya para pejabat pemerintahan yang terikat pada AUPB, akan tetapi semua penyelenggara negara terikat pada AUPB. Hal ini dapat dilacak dari pengertian AUPB secara etimologis.

Secara etimologis kata “asas” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Inggris “*principles*”⁷ yang diartikan

⁶ Lihat ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pembagian kekuasaan menurut teori Montesquieu, kekuasaan didalam suatu negara dibagi menjadi tiga kekuasaan yakni: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada dewasa ini kekuasaan yang ada di dalam suatu negara telah berkembang sedemikian rupa sehingga ada kekuasaan negara yang tidak termasuk dalam konsep teori Montesquieu.

⁷ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, hlm 31

sebagai “dasar” atau “landasan”, sehingga aparat pemerintah di Indonesia dalam menjalankan kewenangannya dan dalam melakukan tindakan-tindakan selaku penyelenggara negara harus berlandaskan pada AUPB. Kata “umum”⁸ diartikan sebagai kata sifat yang berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya”. Hal ini berarti bahwa semua aparat pemerintah atau orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia terikat untuk melaksanakan AUPB. Istilah “baik” secara etimologis mengandung arti “elok”, “patut”, “teratur” (apik, rapi, tidak ada celanya)⁹. Oleh karena itu secara etimologi pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) adalah dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh seluruh aparat pemerintahan dalam menjalankan kegiatan roda pemerintahan atau kehidupan ketatanegaraan secara apik, teratur, patut, dan sedapat mungkin tidak ada celanya. Sedangkan yang dimaksud dengan kehidupan ketatanegaraan dalam tulisan ini adalah penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif serta lembaga-lembaga negara lainnya yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Peranan asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dikemukakan di sini bahwa dengan melihat ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik harus dipakai sebagai acuan dasar para penyelenggara negara didalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Mengenai siapa yang harus menjalankannya yakni semua aparat pemerintah baik pada level

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, op.cit*, hlm 1526

⁹ *Ibid*, 118

legislatif, eksekutif, yudikatif dan penyelenggara lainnya¹⁰. Bagi kekuasaan legislatif, asas-asas umum pemerintahan yang baik mempunyai peranan sebagai sebagai pengarah dan acuan dalam pembuatan undang-undang yang baik. Bagi aparat eksekutif asas-asas ini mempunyai peranan sebagai acuan dan arahan untuk menjadi pelaksana pemerintahan dalam artian yang sempit sebagai administrasi negara sekaligus pelayan masyarakat yang baik. Bagi aparat yudikatif, asas-asas tersebut mempunyai peranan dalam hal mengarahkan prosedur dalam penyelesaian sengketa yang baik.

Di samping itu juga pada level pemerintahan di tingkat pusat maupun di daerah, hal ini perlu dilakukan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini diperkuat juga dengan analisis dari Henk Addink, Gordon Anthony, Antoine Buyse & Cees Flinterman¹¹ yang mengemukakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan prinsip-prinsip dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu landasan dari sebuah negara hukum modern, di samping dua landasan lainnya yakni penegakan hukum dan demokrasi.

Berkaitan dengan peranan asas-asas umum pemerintahan yang baik, SF Marbun¹² mengemukakan bahwa dalam kehidupan bernegara ada beberapa peranan yang bisa dimainkan, yakni:

¹⁰ Adink, Henk Gordon Anthony, Antoine Buyse & Cees Flinterman, *Sourcebook HUMAN RIHGT & GOOD GOVERNANCE*, SIM Special, Utrecht, 2010, hlm. 14

¹¹ Henk Addink, *et.al*, *Human Right & Good Governance*, *op.cit.*, hlm 11

¹² SF Marbun, Deno Kamelus, Saut P.Panjaitan, Gde Pantja Astawa, dan Zainal Muttaqqin, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001. hlm 210

1. Bagi administrasi negara (aparatur pemerintah dalam arti sempit), asas-asas tersebut mempunyai peranan sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar dan tidak jelas sekaligus juga membatasi perbuatan *onrechtmatigedaad*, *detournement de pouvoir*, *abus de droit*, dan *ultra vires*;
2. Bagi warga masyarakat pencari keadilan asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dapat dipakai sebagai dasar gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bagi hakim PTUN dapat dipakai sebagai alat uji untuk menilai apakah tindakan aparat yang digugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;
4. Asas-asas ini juga mempunyai peranan bagi badan legislatif untuk merancang suatu undang-undang yang baik.

Kesimpulan yang dapat diambil dari peranan AUPB dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia yakni bahwa asas-asas tersebut mempunyai peranan dalam pembuatan undang-undang yang baik, pelaksanaan kehidupan dan pelayanan warga negara yang baik, dan juga memainkan peranan dalam prosedur peradilan yang baik.

Penemuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara Melalui *Local Wisdom* Masyarakat Jawa

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, di mana mereka telah sejak lama melaksanakan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai luhur yang telah dimiliki oleh nenek

moyangnya. Namun demikian nilai-nilai itu sebagian telah luntur karena perkembangan zaman. Berkaitan dengan hal itu perlu digali dan ditemukan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat termasuk nilai-nilai yang ada pada masyarakat Jawa. Penemuan kembali ini untuk diteguhkan sebagai bagian dari AUPB yang harus dijadikan pedoman dan acuan bagi para penyeleggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Nilai-nilai kearifan lokal yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan hal-hal yang baik. Hal ini diperkuat oleh pandangan Edy Sedyawati¹³ yang menyatakan bahwa nilai adalah merupakan hal-hal yang dianggap baik, benar dan atau pantas, sebagaimana disepakati di dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai jenis kegiatan. Pengarahan diri yang dipandu oleh nilai-nilai itu mengacu kepada keberterimaan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya dengan sendirinya bersifat sosial-budaya. Kata kearifan berasal dari kata “arif”. Sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁴, “arif memiliki” dua arti, yaitu bijaksana; cerdas dan pandai; berilmu. Arti kedua dari kata “arif” adalah paham; mengerti. Sedangkan kata “kearifan” berarti kebijaksanaan, kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi di masyarakat. Kata “lokal”, yang berarti tempat atau pada suatu tempat atau pada suatu tempat tumbuh, terdapat, hidup sesuatu yang mungkin berbeda dengan tempat lain¹⁵ atau terdapat di suatu tempat yang bernilai yang mungkin berlaku setempat atau mungkin juga berlaku universal. Nasiwan,

¹³ Edy Sedyawati . 2007. hlm 254

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, op.cit, hlm 85

¹⁵ Ibid. hlm 839

dkk¹⁶ mengemukakan bahwa wacana seputar *local wisdom* atau kearifan lokal, biasanya selalu disandingkan dengan wacana perubahan, modernisasi, dan relevansinya. Hal ini bisa dimaklumi sebab wacana diseputar kearifan lokal pada prinsipnya berangkat dari asumsi yang mendasar bahwa, nilai-nilai asli, ekspresi-ekspresi kebudayaan asli dalam konteks geografis dan kultural dituntut untuk mampu mengekspresikan dirinya ditengah-tengah perubahan. Pada sisi lain ekspresi kearifan lokal tersebut juga dituntut untuk mampu merespons perubahan-perubahan nilai dan masyarakat. Sebetulnya dan seharusnya “kearifan lokal” itu tidak akan hilang dari peredaran nilai sebuah masyarakat termasuk masyarakat Jawa. Di dalam konteks tulisan ini kearifan lokal masyarakat Jawa dapat diartikan sebagai kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya masyarakat Jawa seperti tradisi, petatah-petitih dan semboyan hidup atau falsafah hidup. Nasiwan, dkk¹⁷ mengutip pendapat Wales, mengemukakan bahwa kearifan lokal dapat dilihat dari dua perspektif yang saling bertolak belakang, *pertama* yaitu: *extreme acculturation* yang memperlihatkan bentuk-bentuk tiruan suatu budaya yang tanpa adanya proses evolusi budaya dan akhirnya memusnahkan bentuk-bentuk budaya tradisional, dan *ke dua*, *a less extreme acculturation* yakni proses akulturasi yang masih menyisakan dan memperlihatkan *local genius* yaitu adanya unsur-unsur atau ciri-ciri tradisional yang mampu bertahan dan bahkan memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan unsur-unsur budaya dari luar serta mengintegrasikannya dalam kebudayaan asli. Nilai-nilai kearifan lokal juga mempunyai kemampuan untuk memegang pengendalian serta memberikan arah perkembangan kebudayaan. Dengan demikian tepatlah

¹⁶ Nasiwan, dkk, 2012, hlm 159

¹⁷ *Ibid*, hlm 16

dikatakan bahwa kebudayaan merupakan manifestasi kepribadian suatu masyarakat. Artinya identitas masyarakat tercermin dalam orientasi yang menunjukkan pandangan hidup serta sistem nilainya, dalam pola serta sikap hidup yang diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari, serta dalam gaya hidup yang mewarnai peri kehidupannya.

Laica Marzuki, mengemukakan bahwa *local wisdom* dapat dikembangkan dalam pelaksanaan pemerintahan sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pendapat ini sebagaimana disunting oleh Muin Fahmal¹⁸ yang menyatakan bahwa dalam kaidah-kaidah hukum (*rechtenormen*) dibangun nilai-nilai etika hukum (*values of legal ethic*) yang nilai kepatuhannya didasarkan pada kesadaran hukum. Kesadaran hukum ini pada hakikatnya adalah pematuhan nilai-nilai etika hukum yang telah berlaku dalam masyarakat. Bagir Manan sebagaimana disunting oleh Muin Fahmal¹⁹ menyatakan bahwa asas hukum bukanlah sebuah norma hukum sebagaimana hukum yang telah dirumuskan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang serta merta mengikat. Akan tetapi, sebagai penanaman normative (*legal term*) bagi nilai etika hukum yang sesungguhnya adalah nilai yang tumbuh dalam budaya hukum masyarakat, sehingga nilai tersebut ditaati sebagai tolok ukur terwujudnya keadilan yang sesungguhnya. Jimly Asshiddiqie²⁰ berpendapat bahwa budaya hukum masyarakat juga penting di samping perilaku penegak hukum. Hal ini diperkuat dengan pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa manusia juga diatur dan tunduk pada

¹⁸ Muin Fahmal, 2006, hlm 31

¹⁹ Ibid. hlm 32

²⁰ Jimly Asshiddiqie, 2011, hlm 5

aturan adat-istiadat (hukum kebiasaan), hukum agama (sepanjang belum menjadi hukum positif), dan hukum moral²¹.

Berkaitan dengan local wisdom masyarakat yang dapat digali lagi untuk dijadikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), Franz Magnis Suseno²² berpendapat bahwa dalam paham kekuasaan Jawa tertanam motivasi-motivasi kuat bagi penguasa untuk berusaha menjadi seorang penguasa yang baik, yang adil, dan dicintai rakyatnya, yang mempertahankan negaranya dalam keadaan tenteram dan sejahtera. Dalam kaitan dengan penemuan AUPB dalam Hukum Administrasi Negara melalui *local wisdom* ini apabila dikaji sebetulnya ditemukan falsafah Jawa yang sudah dikenal dan berlaku di Keraton Yogyakarta, yakni filosofi : *Hamangku*, *Hamengku*, dan *Hamengkoni*. Filosofi *Hamangku* mengandung makna mengangkat harkat dan martabat masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dengan pengabdian tanpa pamrih. Membesarkan hati, dengan lebih banyak memberi daripada menerima. Hakekat dari *berbudi bawaleksana* atau falsafah bahwa seorang raja (pemimpin) harus memiliki watak atau perilaku selalu memberikan keadilan pada orang-orang yang dipimpinya itulah aktualisasi dari filosofi *Hamangku*. Apabila dicermati falsafah *Hamangku* ini mencerminkan implementasi dari asas kepentingan umum yang sudah dikenal lama dalam budaya Jawa dan telah dipraktekkan di Keraton Yogyakarta. Setelah dikaji dapat dikemukakan bahwa sebetulnya asas kepentingan umum sebagai bagian dari AUPB sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor

²¹ Bagir Manan, 2004, hlm 5

²² Franz Magnis Suseno. *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, (Jakarta: PT Gramedia,1985), hlm 113

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah lama dikenal dan dipraktekkan di Keraton Yogyakarta.

Mengenai filosofi *Hamengku* mengandung makna *hangrengkuh* atau *ngemong*, yang berarti melindungi dan mengayomi secara adil, tanpa membeda-bedakan golongan, keyakinan, dan agama. *Hamengku* identik dengan *hambeg adil paramarta*. Local wisdom ini mengandung makna pelaksanaan konsep asas keadilan dan kepentingan umum. Sedangkan nilai filosofi *Hamengkoni* mengandung makna keteladanan dan watak *gung binathara*. Filosofi *local wisdom* ini mengandung makna bahwa dalam situasi sulit, pemimpin adalah juga pengayom yang berdiri paling depan, menjadi panutan dan tampil mengambil tanggung jawab dengan segala resikonya.

Nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) Jawa ini oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sri Sultan Hamengku Buwono X) pada tahun 2008 dituangkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian dikenal dengan istilah “Budaya Satria”. Peraturan Gubernur tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan untuk menerapkan AUPB yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, norma hukum serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN maka diperlukan budaya pemerintahan. DIY mempunyai kekhasan budaya dengan nilai filosofi *hamemayu hayuning bawono*, dan ajaran moral *sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh*, serta semangat *golong gilig*. Kekhasan budaya tersebut perlu dimiliki oleh setiap aparatur di DIY.

Apabila dikaji filosofi nilai-nilai kearifan lokal *hamemayu hayuning bawono*, ajara moral *sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh*, dan semangat *golong gilig* itu merupakan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Jawa yang sebetulnya juga sudah dilaksanakan lama oleh nenek moyang masyarakat Jawa. Nilai-nilai itu diangkat dan ditemukan kembali untuk dijadikan rumusan konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik pada budaya “SATRIYA” yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintahan di DIY. Ajaran moral budaya Jawa yang tertuang dalam Peraturan Gubernur tersebut tentang *sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh, serta semangat golong-gilig*, apabila dikaji terkandung makna pelaksanaan rumusan konsep asas-asas umum pemerintahan, yakni asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Sebetulnya Peraturan Gubernur tersebut bisa ditingkatkan dan dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD DIY bersama sehingga bisa mempunyai ikatan hukum yang lebih kuat karena dalam pembuatannya melibatkan badan legislatif daerah.

Hamemayu Hayuning Bawana mengandung nilai filosofi dan makna nilai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh perikehidupan baik dalam skala kecil (keluarga), ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri. Turunan dari falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam konteks aparatur dapat dijabarkan menjadi tiga (3) aspek. *Pertama, Rahayuning Bawana Kapurba Waskithaning Manungsa* yang dapat diartikan

bahwa kelestarian dan keselamatan dunia ditentukan oleh kebijaksanaan manusianya. *Kedua, Darmaning Satriya Mahanani Rahayuning Nagara*, dapat diartikan bahwa pengabdian ksatria menyebabkan kesejahteraan dan ketentraman negara. *Ketiga, Rahayuning Manungsa Dumadi Karana Kamanungsane*, diartikan bahwa kesejahteraan manusia terjadi karena kemanusiaannya. Apabila dikaji dan dianalisis filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* mengandung makna bahwa pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, ditujukan untuk mensejahterakan warga Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah menyatakan diri sebagai sebuah negara modern sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Nilai-nilai *local wisdom* masyarakat Jawa lainnya seperti ungkapan *manunggaling kawulo gusti* merupakan prinsip tentang kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat. Pemimpin berasal dari rakyat dan harus mengabdikan diri hanya untuk kepentingan rakyat. *Berbudi bawa leksana ambeg adil para marta*, merupakan falsafah Jawa yang menyatakan bahwa seorang pemimpin (raja) harus memberikan keadilan kepada segenap rakyat. Melalui kepemimpinannya segenap rakyat dipuaskan karena menerima keadilan. Berkaitan dengan itu, seorang raja haruslah seorang yang *gung binathara* yaitu adil, berwatak mulia, pembela rakyat, dan pelindung rakyat. Ciri kepemimpinan seperti yang digambarkan diatas harus ditegakkan dan menjadi dasar evaluasi integritas.

Local wisdom masyarakat Jawa lainnya yang juga sudah dikenal sejak lama, yakni ajaran Ki Hajar Dewantara yakni: *ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso*, dan *tut wuri handayani*. *Ing ngarso* itu didepan /dimuka, yang artinya

menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang disekitarnya. *Ing madyo mangun karso* artinya di tengah mampu membangkitkan atau menggugah kemauan atau niat untuk maju. Dapat disimpulkan bahwa seseorang ditengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Oleh karena itu seseorang juga harus mampu memberikan inovasi-inovasi dilingkungannya dengan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk keamanan dan kenyamanan. Ajaran *tut wuri handayani* mengandung makna bahwa seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang.

Di Yogyakarta nilai-nilai kearifan lokal itu sudah dipraktekkan sebelum Indonesia merdeka. Keraton Yogyakarta pada masa penjajahan Belanda adalah merupakan *zelfbestuurende landschappen* yang diatur dalam *Indische Staatsregeling* (IS) yakni undang-undang dasar bagi kehidupan ketatanegaraan di Hindia-Belanda. *Zelfbestuurende landschappen* diatur dalam dalam Pasal 21 IS. Pasal tersebut menyatakan bahwa ada bagian dari wilayah Hindia Belanda, di mana Raja dan penduduk aslinya diberi hak untuk memerintah sendiri (*zelfbestuur*). Wilayah Keraton Yogyakarta, sebelum masa kemerdekaan Indonesia merupakan wilayah yang telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebelum dikenalnya asas-asas tersebut di Indonesia.

Pada saat ini walaupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sudah dimasukkan dalam hukum tertulis di Indonesia, akan tetapi sebetulnya masih dapat dikembangkan dengan menemukan kembali nilai-nilai etik yang ada dalam masyarakat termasuk nilai-nilai etik yang dikenal dengan *local wisdom* masyarakat Jawa. Nilai-nilai kearifan lokal yang telah

berkembang dalam masyarakat Jawa ini dapat dikembangkan menjadi asas-asas umum dalam pemerintahan yang dapat dipakai sebagai patokan dan pedoman serta arahan bagi aparat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tidak merugikan warga masyarakat.

Local wisdom masyarakat Jawa tersebut di muka dapat ditemu kenali kembali untuk mengembangkan AUPB dalam Hukum Administrasi Negara yang selama ini banyak mengadopsi dari nilai-nilai yang berasal dari luar Indonesia. Hal ini dikarenakan sebetulnya banyak nilai-nilai *local wisdom* masyarakat di Indonesia termasuk nilai-nilai lokal masyarakat Jawa yang dapat dikembangkan untuk dijadikan AUPB dalam Hukum Administrasi Negara. Di samping itu ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan peluang untuk mengembangkan AUPB dengan menyatakan bahwa AUPB selain yang tertuang dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) diakui sepanjang telah dijadikan dasar putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Memang untuk diakui secara nasional, penemuan kembali AUPB dalam Hukum Administrasi Negara melalui *local wisdom* masyarakat Jawa memerlukan waktu yang panjang yakni setelah *local wisdom* tersebut diakui oleh hakim terutama hakim Peradilan Tata Usaha Negara dengan putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Daftar Pustaka

Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press

- Departemen Pendidikan Nasional. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan kesembilan Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Edi Sedyawati. 2007. *Keindonesiaan dalam Budaya*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Franz Magnis Suseno. 1985. *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Henk Adink, Gordon Anthony, Antoine Buyse & Cees Flinterman. 2010. *Sourcebook Human Right & Good Governance*. SIM Special, Utrecht.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia an English-Indonesian Dictionary*. Cetakan XX. Jakarta: PT Gramedia,
- Jimly Asshiddqie. 2011. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muin Fahmal. 2006. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintah yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press.
- Nasiwan, dkk. 2012. *Menuju Indigenisasi Ilmu Sosial Indonesia*. Yogyakarta: FISTRANS Institute
- PJ Suwarno. 1994. *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*. Yogyakarta: Kanisius.

SF Marbun, Deno Kamelus, Saut P.Panjaitan, Gde Pantja Astawa, dan Zainal Muttaqqin. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Gubernur DIY Nomor Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

7

Pemanfaatan Kearifan Lokal untuk Revitalisasi Teori Komunikasi Berperspektif Keindonesiaan

Suranto Aw¹

Teoris komunikasi pada dasarnya merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis tentang fenomena peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia. Teori tersebut disusun berdasarkan hasil analisis atas proses komunikasi pada tataran empiris. Pada giliran berikutnya, teori berfungsi sebagai rujukan untuk dapat menyusun strategi komunikasi yang tepat. Idealnya seorang praktisi komunikasi memahami teori, dan mampu menggunakannya dalam praktik komunikasi.

S. Djuarsa Sendjaja (2002, 110) mengatakan bahwa teori komunikasi pada dasarnya merupakan abstraksi tentang fenomena komunikasi yang bersifat terbatas dan relatif. Pendapat ini menyiratkan argumentasi kuat bahwa ketika teori komunikasi tersebut akan diimplementasikan diperlukan penyesuaian dan penyelarasan terlebih dahulu dengan budaya lokal. Itulah mengapa perlu merevitalisasi teori komunikasi bercorak keindonesiaan. Dengan teori komunikasi berperspektif keindonesiaan diduga aktivitas akademis mempelajari fenomena

¹ Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial UNY

dan dinamika komunikasi yang berbasis budaya nasional, akan lebih efisien dan tepat sasaran.

Revitalisasi teori komunikasi berperspektif keindonesiaan diharapkan mengurangi ketergantungan pada teori Barat. Penyelesaian masalah komunikasi tidak perlu lagi dari dunia akademis barat, karena keadaan sosial di barat dan di negara dunia ketiga sangat berbeda, maka diperlukan penyelesaian yang berasal dari sumber permasalahannya sendiri. Diperlukan usaha identifikasi dan inventarisasi teori komunikasi yang bercorak keindonesiaan, yaitu teori komunikasi yang berbasis “identitas” yang menjadi pengenalan karakteristik kearifan budaya berkomunikasi bangsa Indonesia. Pada giliran berikutnya perlu usaha meneguhkan teori komunikasi berperspektif keindonesiaan sebagai upaya menghadirkan teori alternatif komparatif diranah perkembangan keilmuan komunikasi.

Rujukan Praktisi Komunikasi

Ilmu komunikasi sebagai salah satu cabang ilmu-ilmu sosial memiliki karakteristik yang unik yaitu membahas cara, dinamika, proses, dan hasil komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat. Di setiap masyarakat memiliki budaya yang khas, yang membedakan dengan budaya masyarakat lainnya. Tidak terjadi universalitas budaya. Hal ini sangat berbeda dengan fenomena yang terkait dengan ilmu pengetahuan alam seperti fisika dan kimia, dimana di dalam ilmu pengetahuan alam tersebut dapat dilakukan klaim universalitas atas suatu temuan. Tetapi ilmu sosial, seperti ilmu komunikasi, sosiologi, ilmu politik, dan ilmu hukum tidak dapat diklaim keuniversalitasannya karena setiap budaya yang dipujikan di kalangan masyarakat memiliki corak, struktur, dan sistem yang berbeda. Dengan demikian teori komunikasi produk akademisi

Barat tidak selamanya kompatibel dengan pola perilaku komunikasi Masyarakat Indonesia. Dissnayake (2003:19) menegaskan fenomena komunikasi sehari-hari dalam masyarakat selalu mencerminkan keanekaragaman budaya pembentuknya.

Pada tataran empiris implementatif, teori akan menjadi rujukan bagi para praktisi. Seorang pemain sepakbola profesional pastilah menerapkan teori dasar sepakbola dalam permainannya: ada teori menggiring bola, mengambil tendangan bebas, mengeksekusi tendangan penalti. Seorang guru harus memahami dan mampu mengimplementasikan teori pembelajaran: teori membuka pembelajaran, menggunakan media, mengelola kelas, mengevaluasi, dan sebagainya. Untuk menjadi seorang praktisi komunikasi yang handal, perlu pengetahuan, pemahaman, dan pelaksanaan teori komunikasi yang relevan. Idealnya praktik komunikasi di Indonesia perlu dipandu oleh teori-teori yang relevan dengan latar belakang budaya, bahasa, dan norma yang berlaku di Indonesia. Prahastiwi Utari, dkk. (2012: 1) menjelaskan bahwa penentuan konsep-konsep dalam pengembangan teori komunikasi Indonesia harus sesuai dengan budaya Indonesia. Pencarian budaya lokal menjadi lebih diutamakan ketika ingin memunculkannya sebagai budaya Indonesia. Pada saatnya pertemuan puncak-puncak dari lokalitas budaya yang ada ini dapat menjadi penciri dari budaya Indonesia. Konsep ide dan artefak dari budaya lokal dapat dikembangkan sebagai bahan kajian dalam mengembangkan teori komunikasi Indonesia.

Ketersediaan teori komunikasi bercorak keindonesiaan akan menjadi rujukan yang tepat bagi praktisi komunikasi, khususnya dalam penyusunan strategi komunikasi. Dengan

tersedianya teori komunikasi keindonesiaan, di satu sisi akan memantapkan para praktisi dalam perencanaan dan pelaksanaan komunikasi, dan di pihak lain ketergantungan terhadap teori komunikasi Barat dapat diurai atau ditekan. Turnomo Raharjo (2008) sudah cukup lama mengkritisi fakta bahwa teori-teori komunikasi yang dipelajari di Indonesia didominasi oleh produk dari sejarah intelektual Barat. Godwin Chu (2012) menyatakan pemikiran teoritik barat lebih banyak menekankan pada metode kuantitatif, sehingga perlu sikap hati-hati ketika akan mengimplementasikannya untuk disesuaikan dengan konteks yang ada. Alwi Dahlan (2011) mengungkapkan keprihatinannya terkait adanya kecenderungan bahwa teori-teori dan riset yang dikembangkan di Indonesia saat ini masih mengacu kepada teori komunikasi model Barat yang belum tentu sesuai dengan kondisi Indonesia.

Teori komunikasi yang perlu diunggulkan sebagai rujukan para akademisi dan praktisi adalah teori yang dibangun berdasarkan realita empiris yang relevan. S. Djuarsa Sendjaja (2002: 112) menyebut teori yang baik adalah teori yang konseptualisasi dan penjelasannya didukung oleh fakta serta dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Apabila konsep dan penjelasan teori tidak sesuai dengan realitas, maka keberlakuannya diragukan dan teori demikian digolongkan sebagai teori semu. Pendapat ini mendorong sikap perlunya sikap kritis untuk menggali, mengidentifikasi, dan menginventarisasi sumber-sumber teori komunikasi dalam berbagai bentuk kearifan lokal budaya Indonesia. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain: (1) menelaah karya sastra, tulisan jurnalistik, filsafat, linguistik, syair, dan sebagainya untuk melihat kearifan yang dapat dijadikan postulat dalam komunikasi; (2) menelaah nilai-nilai tradisi, adat, ritual,

dan sebagainya yang diwariskan turun temurun berkaitan dengan simbol komunikasi budaya yang unik; (3) menggali karakteristik perilaku komunikasi dalam perbedaan masyarakat, dengan sudut pandang antar budaya; (4) menggali informasi dari para tokoh adat, sumber-sumber ujaran primer yang memiliki wawasan terhadap norma komunikasi yang diagungkan pada masa lalu dan tetap relevan pada masa sekarang; (5) mengumpulkan serta menganalisis data perilaku komunikasi masyarakat melalui penelitian ilmiah dan mempublikasikan hasilnya; dan (6) memahami dan menganalisis data, informasi, dan gejala-gejala yang menggambarkan nilai-nilai kearifan lokal Budaya Indonesia, yang diharapkan bermanfaat sebagai masukan perumusan teori dan konsep fundamental berupa revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal pada teori komunikasi berperspektif keindonesiaan.

Kearifan Lokal

Salah satu modal penting dalam revitalisasi teori komunikasi adalah tebaran kearifan lokal budaya bangsa terkait dengan aktivitas komunikasi. Secara konseptual, kearifan lokal adalah nilai-nilai yang diaktualisasikan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yang mencerminkan jati diri suatu komunitas dalam batas kolektivitas tertentu. Kearifan lokal merupakan *local genius* sehingga merupakan kekayaan luar biasa yang di miliki Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang sistematis dan ilmiah untuk mengidentifikasi seperangkat nilai-nilai kearifan tersebut.

S. Djuarsa Sendjaja (2002: 1.13) menguraikan pendekatan dan langkah-langkah proses pengembangan dan penguatan teori yang lazim digunakan dalam tradisi keilmuan. Pendekatan

tersebut diberi nama *hypothetic-deductive method*, yaitu penguatan dan pengembangan teori yang melibatkan empat langkah sebagai berikut: (1) *Developing question*; (2) *Forming hypotheses*; (3) *Testing the hypotheses*; (4) *Formulating theory*.

Berdasarkan pendekatan tersebut, sekiranya kearifan lokal menjadi sumber inspirasi revitalisasi teori, maka asumsi-asumsi dan gejala-gejala tentang kearifan sosial dideduksi menjadi hipotesis. Kemudian hipotesis ini dirinci ke dalam konsep-konsep operasional yang terukur yang dapat dijadikan patokan untuk observasi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menggunakan pendekatan riset, kemudian dibuat generalisasi-generalisasi. Selanjutnya dari generalisasi-generalisasi ini akhirnya diinduksi menjadi teori.

Catatan khusus perlu diketengahkan di sini, bahwa kearifan lokal yang menjadi sumber inspirasi penguatan teori komunikasi pada hakikatnya ada dua wujud, yaitu: (1) kearifan lokal dalam wujud abstraksi simbolis, dan (2) kearifan lokal dalam bentuk fakta perilaku di dunia nyata. Kearifan komunikasi dalam wujud abstraksi simbolis adalah berupa nilai, norma, konsep, kebiasaan, jalan pikiran, keyakinan, dan sebagainya yang ada pada masyarakat. Sedangkan kearifan lokal dalam bentuk fakta, dapat ditemukan dalam berbagai bentuk perilaku berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian yang secara khusus mengkaji tentang kearifan lokal sebagai sumber inspirasi bagi tersusunnya konsep fundamental revitalisasi teori komunikasi yang menjadi acuan berinteraksi dan berkomunikasi warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari masih jarang dilakukan. Fenomena ini membuka peluang untuk melakukan penelitian tentang kearifan

lokal sebagai unggulan untuk membangun konsep keindonesiaan di bidang ilmu komunikasi. Dengan topik penelitian yang sangat spesifik ini, tentu saja membuka peluang untuk diangkat sebagai bahan penyusunan konsep pemikiran dan artikel publikasi. Di samping itu, topik penelitian semacam ini relevan dengan visi FIS UNY untuk menjadi fakultas yang unggul di Asia Tenggara dalam menghasilkan paradigma alternatif keilmuan sosial, ilmuwan sosial, dan tenaga pendidik yang bertakwa, mandiri, dan cendekia berlandaskan keindonesiaan. Lebih jauh lagi, topik penelitian ini juga selaras dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Dengan demikian sangat jelas bahwa undang-undang ini mengamanatkan arti penting pendidikan sebagai agen peningkatan kualitas anak bangsa, dalam aspek penguasaan pengetahuan (intelektual) maupun aspek nilai etika dan budaya (kultural).

Dilihat dari substansi konten keilmuan, penelitian tentang kearifan lokal secara jelas dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk menjadikan nilai-nilai kearifan lokal menjadi suatu perangkat nilai modern yang mudah dipahami dan menyenangkan untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun kelompok, yaitu dalam bentuk praktik komunikasi di masyarakat. Fakta menunjukkan

bahwa pengaruh budaya global telah merambah kepada gejala egoisme untuk memenangkan persaingan sehingga seringkali mengganggu keharmonisan sosial. Gempuran busaya global juga telah menggantikan nilai-nilai kearifan lokal dengan nilai-nilai kekinian yang belum tentu relevan dengan norma budaya bangsa. Beberapa contoh kearifan lokal berkomunikasi yang sering dilupakan: (1) *Empan papan*; (2) *Ajining diri gumantung kedaling lathi (mulutmu harimaumu)*; (3) *Ajining salira gumantung tata busana*; (4) *Manjing ajur ajer*; (5) *Lembah manah, andhap asor*; (6) *Dupak bujang, esem mentri, semu bupati*; (7) *Jembar segarane*; (8) *Aja dume*; (9) *Menthung koja kena sembagine*; (10) *Alon-alon waton kelakon*; (11) *Nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake*; (12) filosofi huruf Jawa ketika dipangku malah mati, dan sebagainya.

Kajian kearifan lokal untuk merevitalisasi teori komunikasi ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan kearifan lokal sebagai sumber nilai yang bersifat sentral (tunggal) dan mengesampingkan sumber-sumber nilai yang lainnya. Kajian ini lebih menekankan pada bagaimana menjadikan kearifan lokal mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan generasi muda, serta bagaimana menjadikan teori komunikasi sebagai filter untuk menjaga perilaku komunikasi sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya. Untuk itu diperlukan kajian komprehensif dalam bentuk langkah-langkah analisis potensi kearifan lokal dan menjadikannya sebagai basis penyusunan konsep revitalisasi teori komunikasi.

Daftar Pustaka

- Chu, Godwin. (1985). In Search of Asian Perspective of Communication Theory, in
AMIC–Thammasat University Symposium on Mass Communication Theory: the Asian Perspective, Bangkok.
- Dissanayake, Wimal. (2003). Asian Approach to Human Communication: Retrospect and Prospect, Intercultural Communication Studies, XII-4
- S. Djuarsa Sendjaja. (2012). *Teori Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Utari, Prahastiwi dan Arifin, Hamid and Hermawati, Tanti (2012) *Pengembangan Kajian Teori Komunikasi Berperspektif Keindonesiaan*. <https://eprints.uns.ac.id/12427/>

8

INDIGENEOUSISASI ILMU SEJARAH

Danu Eko Agustinova¹

Wacana indigeneousisasi ilmu dalam rumpun ilmu sosial-humaniora akhir-akhir ini semakin menguat. Hal ini dikarenakan hegemoni ilmu sosial-humaniora dari barat yang membanjiri dari berbagai aspek keilmuan di Indonesia telah mengkerdikan pemikiran-pemikiran *genuine* Indonesia². Kuatnya hegemoni karena globalisasi dan liberalisasi keilmuan menjadikan bangsa Indonesia cenderung tidak pernah berdaulat atas ilmu di negeri sendiri yang notabene kaya dengan nilai-nilai *local wisdom* (*locak geneuin*) tetapi mandek di tengah jalan.

Ilmu Sosial Indonesia memiliki warisan yang bercampur-aduk dan identitas yang beragam pula. Dewasa ini berkembang apa yang disebut Indigeneousisasi ilmu-ilmu sosial Indonesia. Sejarah ilmu sosial di Indonesia dapat dilacak ke dalam tiga fase perkembangan yang berbeda yaitu: (1) Ilmu sosial kolonial (Indologi); (2) Ilmu sosial *developmentalism*; dan (3) ilmu sosial kontemporer.

¹ Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Pegiat di Majelis Studi Ilmu-Ilmu Sosial ke-Indonesiaan (MASISKA) FIS UNY.

² Pendapat Helly Prayitno Sutjipto Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni, Fakultas psikologi UGM. Disampaikan Rabu (18/1/2012) pada pertemuan ilmuwan memandang kegelisahan Klaster Sosial-Humaniora.

Ilmu sosial sebagai corpus pengetahuan yang terlembaga pada mulanya berasal dari kajian indologie, yakni suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kolonial di Leiden pada tahun 1848 untuk menyiapkan bekal pengetahuan tentang masyarakat negeri jajahan bagi calon administrator yang akan dikirim ke Indonesia. *Zeitgest* (iklim intelektual) yang melatarbelakangi gagasan ini ialah proses pasifikasi daerah jajahan di Indonesia. Ciri umumnya ialah rejim kolonial membawa perangkat birokrasi kolonial dan ilmu pengetahuan memiliki paradigma "*knowledge is power*" yang identik dengan ilmu negara, terdiri dari para sarjana Belanda yang melahirkan sejumlah teori sosial yang sampai hari ini masih berpengaruh.

Sejak tahun 1950-1960-an Indonesia bergeser kiblatnya kepada ilmu sosial yang berkembang di Amerika Serikat. Cirinya ialah adanya ketergantungan dari negara penjajahan dengan tuan mereka yang baru, kawasan non-barat memiliki watak ideologi yang sama dengan kawasan barat, pengadopsian teori-teori modernisasi sebagai mainstream, kajiannya pembangunan dengan pendekatan budaya dan metode komparatif, dan melahirkan Indonesianist (pakar asing ahli Indonesia).

Satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah eksistensi ilmu sosial (Barat) di Indonesia tidak sama dengan keber-Ada-an ilmu sosial di Indonesia. Dengan kata lain, (1) ilmu sosial yang eksis di Indonesia tidak sama dengan (2) ilmu sosial yang Ada di Indonesia. Poin (1) adalah sebetuk perpanjangan tangan ilmu sosial di luar sana yang, dalam bentuk dan level apapun, dipaksakan untuk diterapkan di Indonesia.

Di level perguruan tinggi di Indonesia masih minim mengembangkan ilmu-ilmu berbasis keindonesiaan. Akibatnya, perguruan tinggi tak berdaya dan tak mampu menawarkan

solusi berbagai permasalahan bangsa saat ini. Perguruan tinggi di Indonesia hanya menjadi konsumen dari ilmu dan metodologi yang dikembangkan Barat. Ilmu sosial yang diajarkan di perguruan tinggi sekarang ini sifatnya sangat instan. Tidak berangkat dari kondisi riil di Indonesia.

Minimnya pengembangan ilmu berbasis keindonesiaan ini, membuat Indonesia mengalami stagnasi ilmu sosial. Solusi-solusi sosial yang ditawarkan perguruan tinggi tak relevan karena tak sesuai kehidupan nyata. Hal itu membuat perguruan tinggi Indonesia hanya menjadi pasar dan konsumen dari produk pendidikan dari luar negeri. Akibatnya, perguruan tinggi Indonesia tertinggal dari perguruan tinggi asing yang telah lama mengembangkan ilmu tersebut.

Padahal, tak semua ilmu dan metodologi yang dikembangkan Barat bisa digunakan untuk melihat kondisi Indonesia. Misalnya, kandidat kepala daerah dalam teori Barat tak memasukkan ikatan primordialisme. Di Indonesia, ikatan primordial masih sangat menentukan seseorang menjadi kepala daerah³.

Masalah-masalah politik uang, kemiskinan, dan berbagai permasalahan sosial lainnya di Indonesia pun tak bisa hanya dipandang dari kacamata ilmu dan metodologi Barat. Menurut Sunyoto, sejarah pembentukan Indonesia sangat berbeda dari negara-negara tempat ilmu-ilmu sosial berkembang. Indonesia terbentuk dari beragam etnis yang kemudian sepakat menjadi satu negara. Kondisi sosial dan politik di Indonesia pun menjadi

³ Pendapat dari Sunyoto Usman Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Dimuat di laman Kompas.com (Sabtu, 22 Januari 2011)

sangat berbeda dari negara-negara Barat yang tak memiliki sejarah tersebut.

Indegeneousisasi Ilmu Sejarah

Setiap ilmu mempunyai metode. Dalam kaidah ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja atau prosedur untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode sejarah merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa pada masa lampau melalui empat tahapan kerja, yaitu : heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber terdiri atas kritik eksternal (bahan) dan kritik internal (isi), interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan kisah sejarah)⁴. Fase terakhir dalam metode sejarah adalah penulisan sejarah atau disebut dengan historiografi.

Historiografi adalah penulisan hasil penelitian. Historiografi adalah rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses⁵. Penulisan laporan disusun berdasarkan serialisasi (kronologis, kausasi dan imajinasi). Penulisan sejarah sedapat mungkin disusun berdasarkan kronologis ini sangat penting agar peristiwa sejarah tidak menjadi kacau. Aspek kronologi dalam penulisan sejarah sangatlah penting, dalam ilmu-ilmu sosial mungkin aspek tahun tidak terlalu penting, dalam ilmu sosial kecuali sejarah orang berpikir tentang sistematika tidak tentang kronologi. Dalam ilmu sosial perubahan akan dikerjakan dengan sistematika seperti perubahan ekonomi, perubahan

⁴ Nurhayati. *Penulisan Sejarah (Historiografi): Mewujudkan Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal Menuju Abad 21*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Tanggal 2 Juni 2016, FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang.

⁵ Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah* (terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia Press.

masyarakat, perubahan politik dan perubahan kebudayaan. Dalam ilmu sejarah perubahan sosial itu akan diurutkan kronologinya⁶.

Perkembangan keilmuan Sejarah Indonesia mengalami proses yang dinamis. Dimulai dengan pengaruh tokoh Leovold von Ranke (1795-1886), seorang sejarawan dari Universitas Berlin yang berhasil menyusun suatu metode ilmiah untuk sejarah pada tahun 1824 yang kemudian digunakan pula di berbagai universitas di Eropa dan Amerika Serikat, serta pihak kolonial di Indonesia, Ranke inilah yang dianggap bapak historiografi modern. Menurutnya tugas Ilmu Sejarah adalah menunjukkan apa yang benar-benar telah terjadi.

Penulisan Sejarah yang dikembangkan Ranke sangat terkait pada peristiwa kebesaran Sejarah nasional. Sekalipun Ranke mengawali pemunculannya dengan sejarah yang berjangkauan luas seperti orang-orang Roman dan Jerman yang tersebar di Eropa barat. Akan tetapi dalam karir berikutnya tulisan Ranke lebih banyak pada sejarah bangsa tertentu di Eropa. Oleh sebab itu tidak mengherankan bagi Ranke, sejarah adalah sejarah nasional dan menyangkut peristiwa yang terkait dengan orang-orang besar, para negarawan, para jenderal, rohaniawan. Penulisan sejarah seperti ini dikembangkan juga oleh pihak kolonial di Indonesia yang kemudian diteruskan oleh penulis sejarah di tanah air. Terutama sejarah politik yang menyangkut perilaku para penguasa.

Setelah kemerdekaan Indonesia, mulai disadari kebutuhan akan penulisan buku sejarah oleh anak bangsa.

⁶ Kuntowijaya. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Penulisan sejarah oleh orang Belanda berfokus pada masyarakat Belanda di negara koloni atau di Eropa. Sekiranya terdapat pembahasan tentang bumiputera tentunya dari perspektif Barat (Van Leur, misalnya). Oleh karena itu, muncul pemikiran untuk menulis sejarah oleh orang Indonesia sendiri sebagai *history from within*. Terjadi dekolonisasi sejarah, dengan motivasi menggantikan buku teks Belanda. Penulisan sejarah ini dilakukan melalui penyaduran dengan membalikkan posisi pelaku sejarah. Model historiografi Indonesia tahun 1957 bergeser dari Nederlandosentris/Belandasentris menjadi Indonesiasentris. Label “pemberontak” bagi Belanda seperti Diponegoro misalnya, berganti menjadi “pahlawan” bagi bangsa Indonesia.

Karya Sartono kartodirdjo yang berjudul pemberontakan petani di Banten tahun 1888, telah mematahkan sejarah kolonial yang memandang rakyat Indonesia tidak memainkan peranan yang aktif, pemberontakan ini merupakan gerakan sosial yang melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Secara metodologi penjelasan sejarah yang tidak menjelaskan peran rakyat Indonesia ini berarti uraian yang berat sebelah, tentunya para pembaca ada yang menduga ketidakjelasan peran pribumi disebabkan keterbatasan sumber, namun mungkin juga suatu kesengajaan penulis menyembunyikan fakta yang ada. Selain itu, kesalahan masa lalu penulisan sejarah nasional yang difokuskan pada Jawa sentris ingin diubah menjadi sentris yang lain seperti Bugis sentris atau Minang Sentris⁷.

Fase berikutnya perkembangan ilmu sejarah Indonesia dipengaruhi dari Prancis, yaitu sejarawan Annales. Karya ini

⁷ Purwanto, Bambang. 1997. Nusa Jawa: *Tantangan Bagi Historiografi Indonesia Sentris*. Dalam Lembaran Sejarah. Vol 1.No.1.1997, hlm. 105.

termasuk sumbangan pembaharuan dalam penulisan sejarah sejak paska perang dunia II, selain itu eksperimen metodologis dari sejarawan profesional Perancis bisa dinikmati oleh para sarjana di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Kelompok Annales berupaya mendekatkan sejarah dengan disiplin ilmu-ilmu sosial, yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, sejarawan sangat terpaku pada sejarah naratif yang konvensional, yang lebih mengutamakan bercerita secara kronologis tentang kejadian-kejadian politik dramatis. Penulisan sejarah tipe ini dapat ditemukan di semua negara. Sebaliknya sedikit sekali perhatian pada isu-isu sosial dan kemungkinan untuk menggunakan teori dan metodologi ilmu sosial⁸.

Tahap penting perkembangan Ilmu Sejarah Indonesia terjadi ketika diselenggarakannya Seminar Sejarah Nasional I. Seminar Sejarah Nasional diselenggarakan di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, 14-18 Desember 1957. Seminar sejarah yang pertama ini boleh dikatakan sebuah panorama dari keragaman visi kesejarahan nasionalistis yang tidak terlupakan. Berbagai pandangan tentang makna kebangsaan, beragam visi kesejarahan dan bahkan kecenderungan ideologis disampaikan para peserta yang terdiri atas ilmuwan, cendekiawan, pendidik, bahkan juga politisi dari berbagai partai politik, di samping para guru dan dosen sejarah dan ahli arkeologi. Tetapi dalam keriuhan wacana yang penuh antusiasme ini sebuah fakta sederhana tidak bisa terlupakan—kesadaran akan pentingnya sejarah nasional dengan visi

⁸ Mestika Zed. 2001. Menggugat Tirani Sejarah Nasional Suatu Telaah Pendahuluan Tentang Wacana Sejarah Nasional Dalam Perspektif Perbandingan. Makalah. Disampaikan Dalam Konfrensi Nasional Sejarah Indonesia VII. Jakarta. 28-31 Oktober 2001, hlm. 3.

kesejarahan nasional yang jernih adalah suatu kemestian yang tidak bisa dianggap enteng⁹.

Makna dari keragaman sikap ini bertambah berarti juga karena sejak awal 1950-an berbagai karya kesejarahan tentang Indonesia tulisan ilmuwan asing telah semakin banyak memasuki pasaran Indonesia— Kahin, van Niel, Wertheim, van Leur, Schrieke, Gongrijp dan lain- lain. Tulisan-tulisan mereka bukan saja semakin membuka pintu pengetahuan tentang struktur dan dinamika masa lalu Indonesia, tetapi juga menggugah kesadaran akan keharusan sejarah Tanah Air ditulis oleh anak bangsa sendiri¹⁰.

Sejak saat itu perkembangan historiografi sejarah Indonesia secara umum dipengaruhi dua konsep besar yaitu “Indonesia sentris” dan “pendekatan multidimensional” terobosan ini bertujuan untuk mencari jalan menulis kembali sejarah Indonesia untuk kepentingan Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Umum, sehingga bisa menggantikan buku-buku sejarah kolonial. Dalam kesempatan itulah muncul suatu patokan yang dinamakan “sejarah Indonesia sentris”¹¹. Namun patut disayangkan upaya itu tidak bisa segera terwujud karena suasana politik. Baru pada tahun 1971 Depdikbud mencoba meluncurkan buku sejarah yang lebih baik (Sejarah Nasional Indonesia 6 jilid). Secara metodologis rumusan tersebut

⁹ Pendapat dari Taufik Abdullah, mantan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kini Ketua Komisi Bidang Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (API). Disampaikan dalam ceramah Historiografi Indonesia dalam Perspektif Sejarah di Teater Salihara, Selasa, 26 Januari 2016.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Leirissa. 2001. *Sejarah dan Demokrasi*. Makalah Disampaikan Dalam Konferensi Nasional Sejarah Indonesia VII. Jakarta. 28-31 Oktober 2001.

mengandung implikasi bahwa sejarah Indonesia yang diinginkan adalah sejarah yang berwawasan kebangsaan. Penulisan sejarah untuk kepentingan pendidikan (sejarah paedagogis) yang muncul sejak itu sampai sekarang memang berpatokan pada kaidah ini.

Di kalangan “sejarawan akademik” Sartono Kartodirdjolah yang bisa disebut sebagai pelopor dalam sejarah sosial Indonesia. Nampaknya pengaruh seminar sejarah pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta tahun 1957, yang dikenal dengan semboyan “sejarah Indonesia sentris” sangat membekas padanya. Ketika menghadiri seminar, ia baru tamat dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan menjadi satu-satunya sejarawan profesional Indonesia yang berperan dalam seminar itu. Kemudian ia mengajar di Universitas Gajah Mada. Setelah meneruskan sekolah di Amsterdam dengan Desertasi Pemberontakan Petani Banten tahun 1888, merupakan karya pelopor, bukan saja dalam historiografi Indonesia, tetapi dalam historiografi akademik pada umumnya¹².

Sebuah contoh dalam karya sejarah yang sangat menarik dan enak dibaca adalah pemberontakan petani Banten tahun 1888. Penggunaan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial telah digunakan Sartono Kartodirdjo dalam menyoroti pemberontakan petani di Banten pada tahun 1888 secara efisien dan produktif. Konsep-konsep yang digunakan misalnya, kelompok sosial, struktur sosial, stratifikasi sosial, mesianisme, nativisme, kebudayaan dan lain-lain. Dengan menggabungkan metode penelitian sejarah dengan berbagai konsep sosiologis dan antropologis, Sartono memunculkan “petani” bukan saja sebagai aktor sejarah tetapi juga sebagai faktor sejarah dalam

¹² *Ibid.*

masyarakat kolonial abad ke- 19. Ini adalah perbaikan, tidak saja terhadap historiografi kolonial, tetapi juga terhadap historiografi Indonesia. Pendekatan sejarah sosial yang kemudian lebih dikenal sebagai pendekatan *multi-interpretability* atau pendekatan multidimensional¹³.

Historiografi neerlandosentris merupakan penulisan sejarah di Indonesia dengan menggunakan sudut pandang Belanda. Penulisan ini melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi didasarkan pada hasil tulisan para ahli Belanda dengan penggunaan sumber Belanda. Orientasi dari historiografi ini adalah orang Belanda sebagai penggerak sejarah di Indonesia.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri historiografi neerlandosentris merupakan kekayaan intelektual dalam sejarah yang menjadi salah satu bagian dari historiografi kolonial di Indonesia. Historiografi kolonial yang meliputi penulisan sejarah pada jaman penjajahan Belanda, Inggris dan Jepang memberikan sumbangan yang sangat besar untuk kekayaan sejarah Indonesia. Hasil karya dari gaya penulisan tersebut menjadi sebuah tesis dalam dinamika perkembangan penulisan sejarah di Indonesia dan merupakan cambuk terhadap intelektual-intelektual Indonesia pada zamannya bahkan sampai sekarang untuk menghasilkan sebuah karya yang bisa menempatkan posisi orang Indonesia secara wajar yang menjadi anti tesis dari historiografi kolonial.

Karakteristik historiografi neerlandosentris¹⁴, diantaranya:

¹³ Kartodirdjo, Sartono. 1983. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

¹⁴ Pendapat Cecep Lukmanul Hakim diblog pribadinya.

1. Peristiwa-peristiwa penting bagi Belanda atau aktifitas bangsa Belanda di Indonesia.
2. Kejadian masa lalu ditafsirkan atau dijelaskan menurut sudut pandang Belanda.
3. Sejarah konvensional, analisis menggunakan salah satu faktor.
4. Bercorak deskriptif-naratif hanya mengungkap apa, siapa, dimana, dan bagaimana tanpa mengungkap mengapa.
5. Sumber yang digunakan adalah sumber Belanda, diantaranya buku-buku harian kapal, arsip-arsip pemerintahan, karya-karya perorangan dan laporan pemerintah kolonial dan mengabaikan sumber lokal.

Historiografi kolonial merupakan penulisan sejarah yang membahas masalah penjajahan Belanda atas Bangsa Indonesia. Penulisan tersebut dilakukan oleh orang-orang Belanda dan banyak di antara penulisnya yang tidak pernah melihat Indonesia. Sumber-sumber yang dipergunakan berasal dari arsip negara di negeri Belanda dan di Jakarta (Batavia); pada umumnya tidak menggunakan atau mengabaikan sumber-sumber Indonesia. Sesuai dengan namanya, yaitu historiografi kolonial, maka sebenarnya kuranglah tepat bila disebut penulisan sejarah Indonesia. Lebih tepat disebut sejarah Bangsa Belanda di Hindia Belanda (Indonesia). Mengapa demikian? Hal ini tidaklah mengherankan, sebab fokus pembicaraan adalah Bangsa Belanda, bukanlah kehidupan rakyat atau kiprah Bangsa Indonesia di masa penjajahan Belanda. Itulah sebabnya, sifat pokok dari historiografi kolonial ialah Eropa sentris atau Belanda sentris. Yang diuraikan atau dibentangkan secara panjang lebar adalah aktivitas Bangsa Belanda, pemerintahan kolonial, aktivitas para pegawai kompeni (orang-orang kulit putih), seluk beluk kegiatan para gubernur jenderal dalam

menjalankan tugasnya di tanah jajahan, yakni Indonesia. Aktivitas rakyat tanah jajahan (rakyat Indonesia) diabaikan sama sekali. Contoh historiografi kolonial, antara lain sebagai berikut.

1. Indonesian Trade and Society karangan Y.C. Van Leur.
2. Indonesian Sociological Studies karangan Schrieke.
3. Indonesian Society in Transition karangan Wertheim.

Historiografi Indonesiasentris adalah penulisan sejarah yang bersudut pandang Indonesia, mudahnya karya sejarah yang ditulis oleh bangsa Indonesia sendiri dengan sudut pandang bangsa Indonesia sendiri. Historiografi Indonesiasentris merupakan antithesis dari historiografi kolonialsentris.

Artinya historiografi Indonesiasentris seharusnya menulis apa yang tidak ditulis dalam historiografi kolonialsentris. Rakyat Indonesia sebagai pelaku sejarahlah yang tidak pernah ditulis dalam historiografi kolonialsentris. Penggunaan sumbernya bisa perpaduan sumber Belanda dengan ditunjang oleh sumber lokal seperti babad, wawacan, hikayat dan lainnya. Karakteristik historiografi Indonesiasentris, diantaranya:

1. Peristiwa-peristiwa penting bagi Indonesia.
2. Mengingat adanya *character and nation-building*.
3. Kejadian masa lalu ditafsirkan atau dijelaskan menurut sesuai dengan pandangan hidup Bangsa Indonesia.
4. Sejarah kritis analitis mengungkap apa, siapa, dimana, bagaimana dan mengapa.
5. Sumber yang digunakan adalah kombinasi antara sumber Belanda dengan sumber lokal.

6. Disusun oleh orang-orang atau penulis-penulis Indonesia sendiri, mereka yang memahami dan menjiwai, dengan tidak meninggalkan syarat-syarat ilmiah.

Buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) adalah salah satu karya Sejarah yang bercorak ke-Indonesiaan. Walaupun buku ini banyak dikritik oleh beberapa pihak tetapi apabila dicermati sebenarnya SNI mampu menghadirkan secara konseptual prinsip keindonesiaan yang dilandasi oleh kaidah keilmuan. Periodisasi dan kerangka berpikir teoretik konseptual yang dirumuskan secara jelas oleh editor utama yang dimotori oleh Sartono Kartodirdjo, menunjukkan kematangan intelektual daripada sekadar emosional, terlepas dari persoalan yang ada, terutama pada jilid 6 dan keberadaan jilid 7 yang terkesan malu-malu.

Penutup

Komitmen para peneliti terhadap ilmu sosial yang Ada di Indonesia harus berpihak pada realitas keindonesiaan, kemudian melakukan teoritisasi yang berdasar pada realitas tersebut. Realitas yang dimaksud adalah kelima hal yang menjadi dasar kenegaraan dan kebangsaan. Inilah yang dalam hemat saya menjadi status ontologi ilmu sosial yang Ada di Indonesia. Buku klasik Pancasila secara Ilmiah Populer misalnya, sudah memberikan pijakan awal bagi upaya pengembangan ilmu yang harus selalu melibatkan realitas keindonesiaan.

Notonegoro dalam membuktikan Adanya Tuhan, selain menggunakan argumen mengenai *causa prima*, juga mengaitkannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada abad 19 dan 20. Pada abad 19 partikel terkecil di alam semesta ialah atom yang bersifat bendawi, sedangkan perkembangan pada abad 20 membuktikan bahwa atom masih terbagi lagi

menjadi proton, elektron dan netron. Ketiga unsur penyusun atom tersebut, menurut Profesor Notonegoro, “bukan benda, bukan materi yang padat dan keras dan dapat diraba” (Pancasila secara Ilmiah Populer, halaman 78). Perkembangan terbaru mengenai quark harus direspon secara kritis oleh setiap fisikawan Indonesia. Apabila sifat quark berbanding terbalik dengan proton, elektron, dan netron yang tidak dapat diraba, maka, implikasinya jauh. Para fisikawan Indonesia harus melakukan upaya penelitian yang serius, bahkan lintas disiplin keilmuan, untuk menimbang efek negatif yang mungkin dihasilkannya¹⁵.

Upaya menjadikan realitas keindonesiaan sebagai masalah utama ilmu sosial yang Ada di Indonesia tidak dapat dilangsungkan dalam waktu singkat, namun membutuhkan beberapa dekade dan melibatkan ilmuwan sosial lintas generasi. Di sinilah pentingnya membangun semacam tradisi *peer-review* atas gagasan para pendahulu. Sangat ironis apabila para sosiolog Indonesia lebih fasih mendiskusikan gagasan Anthony Giddens ketimbang Arief Budiman misalnya, atau para psikolog Indonesia lebih akrab dengan gagasan Sigmund Freud ketimbang Sutrisno Hadi. Dalam Ilmu Sejarah bangsa ini tidak kehabisan putra-putra terbaiknya. Dari mulai Sartono Kartodirjo dengan gagasan “*historiografi Indonesiasentris*”, Kuntowijoyo dengan “*paradigma profetik*”, masih ada Nugroho Notosusanto, dan di era sekarang ada nama Bambang Purwanto.

Tradisi *peer-review* tersebut akan menunjukkan potensi besar sejarah keilmuan sosial yang pernah eksis dan Ada di Indonesia, yang dapat ditransformasikan menjadi modal utama

¹⁵ Disampaikan Qusthan Abqary, Alumnus Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (8/07/2008)

bagi proyek Pencerahan khas Indonesia, layaknya yang terjadi di Eropa beberapa abad yang lalu. Alergi, jika tidak ingin disebut inferior, terhadap gagasan pemikir Indonesia harus segera diakhiri jika ingin dikatakan telah merdeka dari mental terjajah secara akademik¹⁶.

Daftar Pustaka

- AB Yass, Marzuki. (2004). *Metodologi Sejarah dan Historiografi*. Diktat. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya.
- Alian. (2004). *Masalah Historiografi Sejarah Indonesia*. Pidato Ilmiah Pada Pelantikan Sarjana Baru FKIP Unsri 24 September 2004.
- Alian. (2004). *Laporan Kegiatan Seminar dan Lokakarya Penyusunan Silabus Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Sejarah*. FKIP Unsri.
- Gottschalk, Louis. (1986). *Mengerti Sejarah* (terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kartodirdjo, Sartono. (1983). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, Sartono. (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Kuntowijaya. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

¹⁶ *Ibid.*

- Leirissa. (2001). *Sejarah dan Demokrasi*. Makalah Disampaikan Dalam Konfrensi Nasional Sejarah Indonesia VII. Jakarta. 28-31 Oktober 2001.
- Nurhayati. *Penulisan Sejarah (Historiografi): Mewujudkan Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal Menuju Abad 21*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Tanggal 2 Juni 2016, FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Purwanto, Bambang. (1997). *Nusa Jawa: Tantangan Bagi Historiografi Indonesia Sentris*. Dalam Lembaran Sejarah. Vol 1.No.1.1997.
- Renier, G.J. *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suswanti. (2003). *Ada Apa Dengan Sejarah*. Dalam VISI. Tahun IV.No.1 (januari-Juni).
- Zed, Mestika. (2001). *Menggugat Tirani Sejarah Nasional Suatu Telaah Pendahuluan Tentang Wacana Sejarah Nasional Dalam Perspektif Perbandingan*. Makalah. Disampaikan Dalam Konfrensi Nasional Sejarah Indonesia VII. Jakarta. 28-31 Oktober 2001.
- Zed, Mestika. (2005). *Beberapa Catatan Tentang Petunjuk Praktis Seputar Metode Riset Sejarah*.

9

Merdeka dari Ilmu Sosial Barat

Benni Setiawan¹

Ilmu sosial bukanlah dominasi Barat. Ilmu sosial juga banyak ditelorkan oleh tokoh nasional. Konsep ilmu sosial bisa digali dari rahim Nusantara. Karena kita punya banyak tokoh yang bisa dirujuk. Sehingga tidak perlu gagap dengan tokoh dan temuan dari Barat.

Tokoh nasional Indonesia punya gagasan *genuine* (unik) dan dapat dijadikan alternatif pemikiran dan menggerakkan revolusi sosial. Revolusi sosial senantiasa dimulai dan diinisiasi oleh masyarakat lokal. Masyarakat lokal menjadi itu menjadi penanda bahwa mereka mempunyai “kekuatan” untuk membumikan ilmu sosial ala Indonesia yang mereka pahami.

Penggalan dan pembumian ilmu sosial ala Indonesia pun akan memutus rantai *borrow* (pinjam) masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak selalu “membebek” Barat. Indonesia punya kekhasan sehingga akar budaya bangsa terus melekat dalam jiwa masyarakat. Kita punya keunggulan dalam hal pemikiran. Kita kadang kurang pede mengutip dan menyebut tokoh-tokoh nasional. Ini yang perlu diubah dalam *spectrum* ilmuan Indonesia.

¹ Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi dan P-MKU Universitas Negeri Yogyakarta.

Ilmu sosial memang bukan dominasi Barat. Indonesia mempunyai segudang tokoh yang layak untuk dikutip. Sebut saja. Selo Sumarjan, Kuntowijoyo, Mansur Faqih, Soedjatmoko, Nurcholish Madjid, Ahmad Syafii Maarif, dan lain-lain. Mereka adalah tokoh nasional yang layak mendapat “rujukan” dari kalangan akademik Indonesia. Jangan sampai silau dengan pemikiran Barat, sehingga menenggelamkan kemilau percik pemikiran hebat ala ilmuwan Indonesia.

Nurcholish Madjid

Tulisan ini akan memfokuskan diri pada pembahasan pemikiran keindonesiaan ala Nurcholish Madjid dengan rangkaian contoh kasus dalam bingkai khazanah Nusantara. Dua belas tahun lalu, 29 Agustus 2005, bangsa ini kehilangan seorang tokoh. Tokoh yang senantiasa memperjuangkan sinergi keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Ia adalah Nurcholish Madjid. Cak Nur, begitu ia disapa, senantiasa ingin menjadikan keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan dalam satu tarikan nafas.

Keindonesiaan menjadi nafas pengkajian menarik akhir-akhir ini. Pasalnya, kajian keilmuan Barat seakan menemukan titik jenuh. Di mana ahli ilmu sosial kemudian ingin mengembalikan spirit keindonesiaan yang lama hilang. Padahal, spirit keindonesian telah lama dirintis oleh ahli ilmu sosial, sebut saja Nurcholish Madjid.

Cak Nur, dalam tulisan “Modernisasi Ialah Rasionalisasi bukan Westernisasi” (1987) dengan jelas menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan tidak lain ialah hasil pemahaman manusia terhadap hukum-hukum obyektif yang menguasai alam, ideal, dan material, sehingga alam ini berjalan menurut kepastian

tertentu dan harmonis. Orang yang bertindak menurut ilmu pengetahuan (ilmiah), berarti ia bertindak menurut hukum alam yang berlaku. Oleh karena ia tidak melawan hukum alam, malahan menggunakan hukum alam itu sendiri, maka ia memperoleh daya-guna yang tinggi. Jadi, sesuatu dapat disebut modern, kalau ia bersifat rasional, ilmiah, dan bersesuaian dengan hukum-hukum yang berlaku dalam alam.

Gagasan Cak Nur itu seakan mengingatkan ilmuwan sosial untuk menoleh khasanah kebudayaan nasional. Cak Nur tidak ingin bangsa ini terseok dalam kubangan westernisasi, yang pada gilirannya kurang sesuai dengan budaya Nusantara.

Dalam hal pendidikan misalnya. Bangsa ini memiliki khazanah keilmuan yang luar biasa. Salah satunya adalah bagaimana para pendiri bangsa sudah menancapkan model pendidikan dengan tri pusat (keluar, sekolah, dan masyarakat).

Wacana itu kini diterjemahkan dengan baik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui penguatan pendidikan karakter. Penguatan itu pun ditempuh dengan jalan sekolah sehari penuh. Wacana itu pernah riuh di Nusantara. Keriuhan itu seakan mencerminkan masyarakat Indonesia masih sering kaget dengan “wacana baru”. Padahal, jika mau sedikit merenung, persoalan sekolah sehari penuh bukanlah hal baru di Indonesia. Bahkan, sekolah sehari penuh menjadi cirri khas bangsa. Hal itu setidaknya tercermin dari pendidikan ala pesantren yang sudah ada sejak abad ke-18.

Pendidikan ala pesantren menjadi model sekolah sehari penuh. Toh masyarakat tidak ada yang complain dan riuh membincangnya di media sosial. Bahkan, jelang tahun baru lalu,

hashtag #AyoMondok menduduki *trending topic* (TT) perbincangan di Twitter.

Perbincangan sekolah sehari penuh yang kini muncul pun lebih pada sentimen terhadap pribadi seseorang—untuk tidak menyebut golongan. Masyarakat seakan kehilangan akal waras untuk membincang wacana ini. Hilangnya akal waras itu tercermin dari hujatan—bukan membincang diskursus tentang ketidaksetujuan. Namun, sekadar menyerang person dan membandingkannya dengan orang lain.

Diskursus

Jika masyarakat jujur dan mendayagunakan apa yang dimiliki sekolah sehari penuh perlu ditempatkan sebagai diskursus. Diskursus menempatkan ranah epistemologi dalam perbincangan, tanpa harus kehilangan nalar kritis.

Penolakan sekolah sehari penuh seringkali didasarkan pada kurangnya kasih sayang orang tua kepada anak. Orang tua kehilangan kehangatan untuk memeluk dan mendekap anak saat mereka harus pulang hingga sore hari.

Padahal jika menilik sistem pesantren, mereka belajar full 24 jam di bawah pengasuhan seorang pengasuh dan atau Kiai. Orang tua telah menyerahkan sepenuhnya pengasuhan kepada sistem pesantren. Orang tua hanya setahun sekali dapat bertemu dengan putra-putrinya. Namun, ana-anak pesantren merasa tidak kehilangan kehangatan orang tua. Pasalnya, mereka diasuh oleh orang tua yang kini belajar bersama di lingkungan pesantren.

Alumnus pesantren pun kemudian mampu berkarya saat mereka lulus. Keberhasilan mengenyam pendidikan full day pun muncul dalam TT dengan hastag #SayaProdukFullDaySchool.

Tanggung Jawab Mendidik

Lebih lanjut, dalam konteks yang lebih sederhana, sekolah sehari penuh menurut saya adalah upaya menghidupkan peran orang tua dalam proses pemanusiaan manusia muda. Dibentuknya Direktorat Pendidikan Keluarga oleh Mendikbud Anies Baswedan ingin diteruskan di era sekarang dengan pelibatan orang tua di dalamnya.

Bentuknya adalah anak tetap belajar di sekolah selama jam yang ditetapkan, setelah pulang orang tua mempunyai tanggung jawab sebagai guru bagi anaknya. Sekolah sehari penuh dalam pandangan saya adalah upaya mengembalikan spirit keguruan orang tua dan masyarakat. Guru bukanlah mereka yang selalu datang dan mengajar di kelas. Namun, setiap warga masyarakat. Sebagaimana petuah Ki Hajar Dewantara, jadikanlah semua orang guru, dan semua tempat sekolah.

Sekolah sehari penuh menemukan titik singgung dengan petuah bijak di atas. Pak Muhadjir ingin mengembalikan spirit kependidikan sebagai usaha sadar terencana dan dilakukan secara bersama. Selama ini kita menemui bahwa pendidikan hanya dalam bentuk gedung sekolah dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Padahal alam raya ini adalah sekolah yang nyata bagi mereka yang ingin mengetahui hakikat kehidupan.

Jadi sekolah sehari penuh tidak hanya berupa memperpanjang waktu anak untuk berada di lingkungan sekolah

hingga sore hari. Namun, proses pelibatan dan peran serta aktif seluruh warga bangsa untuk menjadi pendidik. Pendidik yang tidak tersekat oleh pagar dan tembok sekolah. Pendidik yang terus menginspirasi anak-anak untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki; mendorong mereka untuk berani bertindak berdasarkan kesadaran sebagai wujud syukur kepada Tuhan dan kebermanfaat bagi sesama hidup.

Dengan demikian, sekolah sehari penuh seakan mengingatkan bahwa kita memiliki kewajiban untuk mendidik. Tidak hanya mendidik anak dan lingkungan terkecil dalam rumah tangga. Namun, mendidik masyarakat agar mereka mempunyai kesadaran, kepekaan, keberanian, ketangguhan, dan kasih sayang yang memungkinkan seseorang terjaring dalam sebuah komunitas beradab (*bonnum commune*).

Semoga setiap wacana yang muncul tidak menjadikan masyarakat latah. Meminjam filosofi Jawa *ojo kagetan, ojo gumunan* (Jangan latah, jangan mudah tertegun dengan hal baru). Tidak ada yang baru di bawah kolong langit.

Hukum Alam

Cak Nur dengan tegas menyebut bahwa keilmiahannya sebuah ilmu selayaknya tidak bertentangan dengan hukum alam. Hukum alam di mana ilmu sosial itu ditetapkan di sebuah wilayah. Saat heterogenitas wilayah kemudian diubah dalam kerangka berpikir yang tunggal (homogen) ala Barat, maka “nilai jual” kealaman Indonesia akan lenyap. Indonesia akan terus menjadi konsumen ilmu pengetahuan. Padahal, anugerah Tuhan untuk bumi Indonesia sungguh luar biasa. Bangsa ini dapat menjadi produsen ilmu pengetahuan, asal ada niat, kemauan, dan rasa percaya diri serta menampilkan itu ke dunia internasional.

Dalam perbincangan ilmu sosial misalnya, di tengah banyak negara menutup jurusan dan atau fakultas ilmu sosial, inilah saatnya Indonesia menjadi pioner dalam mengembangkan keilmuan yang khas. Keilmuan yang tergal, terilhami, dan terbangun dari rahim Republik.

Ilmu sosial saat ini ditandai oleh dominasi kekuatan ilmu sosial publik dan kebijakan. Dominasi ini cenderung berkembang pesat melintasi perkembangan ilmu sosial profesional dan ilmu sosial kritis. Ketidakseimbangan perkembangan ini mengakibatkan terjadinya ketergantungan akademis, keadaan di mana ahli ilmu sosial Indonesia cenderung mengkonsumsi konsep dan teori ilmu sosial Barat tanpa mempersoalkannya. Mereka enggan mempertanyakan ataupun berdialog dengan teori atau konsep ilmu sosial Barat yang mereka gunakan ketika melakukan pengamatan dan penelitian sosial (Rochman Achwan, dalam Widyajanti Mulyono Santoso, ed, 2016).

Penelitian sosial saat ini selayaknya mengarah pada proses dan dinamika berpikir ala Indonesia. Artinya, ahli ilmu sosial Indonesia selayaknya mengembangkan dan menggali keilmuan, yang dalam bahasa Cak Nur sebagai proses rasionalisasi. Rasionalisasi inilah yang mencegah ahli ilmu sosial taqlid buta terhadap kajian Barat.

Dalam hal kepemimpinan misalnya, khasanah budaya Nusantara memiliki risalah agung tentang hal itu. Salah satu risalah itu dapat kita baca dari spirit *cah angon*. Angon merupakan pekerjaan yang menggembirakan. Namun, tak pernah lalai dalam tugas utamanya, yaitu angon. Mengembala ternak merupakan pekerjaan yang mudah. Namun, butuh *feeling* atau rasa. Artinya, mengembala ternak di ladang yang dekat dengan sawah, tanaman padi, butuh pengawasan ekstra

dibandingkan dengan di tanah lapang. Pasalnya, jika kambing memakan tanaman padi milik petani, itu adalah kesalahan bagi seorang penggembala.

Dalam konteks kepemimpinan, cah angon adalah pemimpin senantiasa menggebirakan anak buahnya. Ia senantiasa kreatif untuk mencari cara dan kegiatan agar anak buahnya betah berlama-lama dalam naungan organisasi. Kegiatan itu bukan berasal dari keinginan "mutlak" seorang pemimpin. Namun, berdasarkan rembug. Dalam rembug inilah akan mendapatkan seperangkat aturan main yang disekati. Artinya, semua orang berperan serta di dalamnya.

Spirit cah angon selanjutnya adalah kehati-hatian. Hati-hati bukan berarti takut. Namun, bertanggungjawab atas pilihan. Jika, satu kerja sudah tercapai kesepakatan, maka ia berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan dengan sepenuh hati. Ia berkewajiban memastikan semua anggota ikut dalam rombongan kerja dan kegiatan. Jika ada yang tidak ikut rombongan maka kewajiban penanggungjawab kegiatan untuk mencari sampai ketemu dan memastikan bahwa ia turut serta dalam kegiatan itu.

Inilah yang kemudian dalam pepatah Islam disebut sebagai *imamul-qaumi khadimuhum*. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Pelayan adalah "babu". Babu dalam khasanah budaya Jawa, adalah sosok yang *sendiko dawuh*. Ia adalah pelayan yang baik bagi sang majikan. Apa saja yang diinginkan oleh majikan, ia akan dengan segera memenuhinya. Sebuah potret kerja ikhlas. Kerja ikhlas merupakan puncak dari kerja keras dan kerja cerdas.

Cah angon pada akhirnya merupakan upaya seseorang menjadi pengasuh bagi semua. *Ngemong* bukan sekadar menggendong atau memastikan seluruh kambing pulang dengan selamat. Namun, memastikan semuanya dalam keadaan baik dan kenyang.

Dalam hal kepemimpinan, seorang pemimpin harus memastikan bahwa anggotanya nyaman dan mendapat sesuatu yang berharga, yang tak ia dapatkan di tempat lain. Saat pemimpin belum mampu mewujudkan hal itu, berarti spirit cah angon belum merasuk pada dirinya. Itulah fungsi *ngemong* yang perlu dimengeri oleh seorang pemimpin. Setelah memahami hal itu tugas selanjutnya adalah menjadi pamong praja (pemimpin peradaban, gembala).

Gembala dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi III adalah penjaga keselamatan orang banyak. Keselamatan dalam bahasa al-Qur'an adalah *salah, islah*. Berbuat islah, kebaikan dan keselamatan bagi orang lain merupakan amanat kemanusiaan manusia. Keselamatan bukan hanya dalam bentuk fisik (sehat). Namun juga kondisi psikis yang memungkinkan seseorang senantiasa bersemangat menapaki hari.

Semangat yang akan memunculkan dan menguatkan rasa cinta. Cintalah yang akan menyelamatkan dan menjadi pendulum keselamatan bagi seluruh makhluk. Cinta yang menghadirkan rasa kepemilikan satu sama lain. Cintalah yang menguatkan satu sama lain. Cintalah yang mengeratkan yang renggang, menguatkan yang telah eras, menumbuhkan yang kering, dan menyuburkan yang layu.

Cinta juga yang akan menggerakkan keingintahuan akan banyak hal. Karena kecintaan yang mendalam kita dapat

menangkap keinginan Tuhan dalam proses penciptaan semester. Kecintaanlah yang mengantarkan manusia pada rasa kedekaan kepada Sang Khaliq dan segala hasil karya-Nya.

Dalam proses kepemimpinan, cinta menjadi hal utama dalam membangun sebuah harapan. Cintalah yang akan menggerakkan seluruh potensi menjadi kekuatan. Kekuatan inilah yang akan menyuburkan inspirasi. Sedangkan inspirasi inilah yang akan menjadikan sebuah bangsa semakin dinamis. Inilah manifestasi gembala dalam proses kreatif kepemimpinan.

Dalam hal ekonomi juga tidak kalah hebat. Bangsa Indonesia melalui lingkungan sosial pasar mengajarkan kearifan yang sulit ditemui dalam kamus ekonomi kapitalistik dan liberal. Pasar tradisional yang kini semakin tersisih mewariskan spirit keindonesiaan yang luar biasa.

Jatung Kehidupan

Pasar menjadi jatung kehidupan masyarakat. Di sinilah semua karakter bertemu dalam transaksi bisnis. Tak hanya sekadar bisnis, dalam pasar mengajarkan arti persahabatan sejati.

Misalnya, dalam bahasa pasar tersua, “rugi sithik, bathi sathak” (rugi sedikit, mendapatkan untung keluarga). Inilah ungkapan luar biasa masyarakat Jawa. Di pasar—khususnya tradisional—tidak hanya sekadar mengajar keuntungan semata. Bahkan, tak jarang, para pedagang merugi dalam menjual dagangannya. Namun, mereka mendapat keuntungan luar biasa, yaitu tambah saudara. Kerugian uang dengan demikian akan tertutupi oleh berkah bertambahnya *pareduluran*.

Dalam kajian Islam, prinsip itu sama dengan hikmah silaturrahmi. Semakin banyak sahabat, teman, rekan, maka akan mendatangkan banyak rizki yang tak pernah disangka.

Maka tidak aneh jika peradaban Islam juga terbangun dari puing pasar. Misalnya, di Mekkah, syiar Islam juga tumbuh dalam peradaban Pasar Ukaz. Pasar Ukaz menjadi sentra pertemuan para pedagang dari penjuru daerah. Pertemuan inilah yang kemudian membiakkan Islam. Tradisi dalam Pasar Ukaz pun menjadi pertemuan Islam dengan budaya lokal Arab kala itu.

Dalam proses kesejarahan Islam Nusantara pun demikian. Para Wali membangun masjid juga dekat pasar. Setiap masjid gede pasti berdekatan dengan pasar di dalamnya. Misalnya masjid Agung di Solo, berhimpitan dengan Pasar Klewer; Masjid Agung Yogyakarta berdekatan dengan Pasar Beringinharjo. Dengan demikian, entitas dakwah dan perdagangan sangatlah dekat. Pasalnya, dalam sejarah, seorang dai (penyeru), adalah pedagang. Seperti Ki Bagus Hadikusumo. Tokoh Muhammadiyah itu seringkali diperintah oleh Kiai Dahlan untuk berdakwah di Solo, sembari membawa kain batik untuk dijual di Pasar Klewer.

Jagat Alit-Jagat Ageng

Di sinilah hebatnya pasar. Pasar dalam proses budaya Jawa telah mengajarkan keuntungan bukan hanya sekadar uang. Tentu ini mendekonstruksi pemahaman kapitalis. Bahwa, uang adalah segalanya. Namun, dalam masyarakat Jawa, keuntungan uang bukanlah hal utama. Yang utama adalah proses *paseduluran* yang akan terus berlanjut tidak hanya di dalam pasar, namun juga kehidupan (jagat alit dan jagat ageng).

Pasar adalah entitas kehidupan umat manusia. Di sinilah kita dapat belajar, bagaimana masyarakat Jawa menghargai keberadaan pasar dengan segala pernik-perniknya.

Saat pasar ilang kumandange, pada dasarnya, kehidupan juga telah musnah. Kehidupan akan berdenyut saat nilai-nilai kebajikan di dalam pasar terus terjaga. Menjaga ruh ini tidaklah mudah di tengah semakin pragmatisnya pemerintah dan menggejalanya pasar modern.

Oleh karena itu, pasar haruslah tetap hidup. Pasar tidak boleh kobong—untuk tidak menyebut sengaja dibakar oleh oknum. Pembakar pasar adalah manusia culas yang sengaja mematikan jagat alit. Saat jagat alit mati, maka jagat ageng pun akan kehilangan harmoninya. Inilah petaka dalam hidup.

Pasar Johar, Pasar Klewer, dan pasar-pasar tradisional lain perlu terus diuri-uri. Pasalnya, dari sinilah kehidupan manusia digantungkan. Dari pasar itulah kita belajar bagaimana uang bukanlah segalanya dalam hidup. Yang hidup adalah persahabatan (*paseduluran*).

Selain itu, khazanah keindonesiaan mewariskan spirit kearifan lokal dalam menjaga alam. Salah satunya dengan tembung Jawa kuno terkait dengan gunung Kelud di Jawa Timur. Kata itu hidup dalam ingatan saya. “Kelud jik bakalan umek, nek awune urung nutupi Jowo. Kediri dadi kali. Blitar dadi latar. Tulungagung dadi kedung” (Kelud akan terus erupsi, sebelum abunya menutupi seluruh wilayah Jawa. Kediri menjadi sungai. Blitar menjadi halaman. Tulungagung menjadi penampungan air”.

Ujaran orangtua Jawa itu tentu bukan untuk menakut-nakuti. Namun, sebagai pengingat dan pelajaran bagi generasi terkini. Tembung di atas pun merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) yang perlu terus dimaknai. Pasalnya, kearifan lokal tersebut seringkali dianggap negatif—dianggap mitos. Mitos seringkali lenyap dari kehidupan masyarakat karena adanya gesekan dengan ideologi/ajaran agama. Padahal, selayaknya mereka bersinergi untuk memecahkan persoalan masyarakat.

Meminjam istilah Roland Barthes, mitos menjadi sesuatu yang penting di tengah modernitas. Mitos merupakan simbol atau ungkapan ragam kehidupan dalam bahasa sederhana. Mitos membahaskan diri dalam pemaknaan yang sederhana sehingga mudah dicerna oleh masyarakat. Bahasa mitos bukanlah ungkapan intelektual kampus. Namun, bahasa keseharian rakyat penuh makna.

Transenden dan Imanen

Dalam penaknaan kebencanaan, penghormatan manusia terhadap alam bukan karena ia bagian tak terpisahkan dari yang transenden. Berposisi lebih tinggi daripada manusia. Melainkan karena sesungguhnya manusia dan alam ada kaitan *interdependence* yang menuntut kesetaraan keduanya. Sehingga terjadilah “dialog” antara yang transenden dan imanen untuk kehidupan di dunia yang lebih sejahtera.

Cerita rakyat yang selama ini seolah mengutamakan kedudukan spiritual lebih dari segalanya ternyata dapat dimaknai ulang untuk dapat dipahami secara lebih pragmatis. Spiritualitas tidak terletak di awing-awang dengan memisahkan yang transenden dari yang imanen sebagai atas dan bawah, melainkan menjadikan yang transenden bersanding dengan yang

imanan untuk menciptakan harmoni kehidupan manusia dengan alam. Ketika cara panang relasi manusia—alam dipahami sebagai mata rantai yang saling terkait, maka manusia tidak akan memperlakukan alam sebagai komoditas untuk menyenangkan kepentingan pribadi.

Dengan demikian, manusia pun dapat memaknai bencana yang tak terhindarkan karena merupakan peristiwa alam sebagai suatu entitas yang perlu diberi ruang supaya alam dan manusia tidak saling merugikan dan mengganggu (Purwanti Kusumaningtyas, 2007).

Akal Budi

Inilah yang kemudian disebut oleh Mudji Sutirno (2009) sebagai ruang-ruang kebudayaan. Ruang-ruang kebudayaan adalah ruang tempat mengacu nilai untuk hidup sehari-hari. Kebudayaan adalah potensi yang ada di tiap orang mulai dari kemampuan kognitif yaitu potensi untuk merangkum pengetahuan tentang realitas secara akal budi.

Akal budi akan menuntun manusia menuju pada pemaknaan realitas diri dan lingkungannya. Ia akan mampu membaca alam dengan penuh kesadaran jiwa. Ia pun tidak akan mudah menyalahkannya. Karena ia menyadari bahwa ia adalah pemimpin di muka bumi (*khalifah fil ardhi*).

Sebagai seorang pemimpin, manusia senantiasa melakukan kebajikan (*shalih*) dalam memelihara alam. Ia pun ragu dan malu jika melakukan pengrusakan (*fasad/ifsad*).

Ujaran “Jawa Kuno” di atas menegaskan konsepsi itu. Kelud adalah penanda alam. Ia senantiasa menyapa manusia

dengan ragam kebisuan yang nyata. Kelud bukan untuk ditakuti. Namun, perlu langkah sigap ketika ia erupsi.

Saat Kelud memuntahkan lava pijar, debu, dan bahan material vulkanik lainnya, maka, selayaknya masyarakat menyadari kekeliruan. Kekeliruan itu selayaknya dibaca dalam pertaubatan. Segera menyingkir dari tiga daerah itu merupakan bentuk pertaubatan yang pertama.

Setelah itu, membaca tembung di atas, pemerintah selayaknya membuat aliran sungai yang cukup besar di daerah Kediri. Sungai-sungai itu untuk menambung material vulkanik yang senantiasa mengiringi saat Kelud erupsi. Wilayah Blitar selayaknya dibangun lapangan luas dengan penuh tanaman. Latar (halaman) yang luas penuh dengan tetumbuhan akan menjadikan rumah semakin asri dan menjauhkan dari marabahaya. Sedangkan daerah Tulungagung perlu membuat penampungan (kedung) aliran sungai dari Kediri.

Inilah pemaknaan positif dari ujaran Jawa Kuno tersebut. Melalui akal budi, manusia dapat “berdialog” dengan alam. Melalui “dialog” itu, manusia akan semakin aman dan nyaman dalam pelukan alam.

Membumikan Ilmu

Dalam proses kreatif itu, fakultas ilmu sosial dan pengkajian ilmu sosial selayaknya merasa terpanggil untuk mengawangi proses pembumian ini. Muaranya agar ilmu sosial mempunyai pijakan yang jelas. Yaitu proses berpikir kreatif yang bersumber dari nilai-nilai kendonesiaan.

Nilai keindonesiaan ini penting guna mewujudkan rasionalisasi, yang tidak sekadar rasionalisme. Mewujudkan

liberasi yang melampauai tradisi liberalisme, dan humanisasi yang bukan humanisme.

Kerangka acuan itu pernah dilontarkan oleh Cak Nur yang kemudian dikembangkan oleh Kuntowijoyo dengan ilmu sosial profetik. Kini kajian ilmu sosial profetik ala Pak Kunto dilanjutkan oleh “penemuan” *Paradigma Profetik* ala Profesor Heddy Shri Ahimsa-Putra. Paradigma profetik ini seakan membawa jalan baru bagi ilmu sosial Indonesia. Dimana ilmu sosial Indonesia terus bergerak dalam bingkai keilmuan yang lebih “mbumi”. Artinya, ilmu sosial Indonesia selayaknya mempunyai ciri khas yang tidak hanya sekedar berbeda dengan ilmu kajian Barat. Namun menawarkan sebuah temuan sebagai respon positif terhadap *local wisdom* (locak geneuin) dan khasanah kekayaan Nusantara.

Ilmu sosial keindonesiaan telah lama dirintis oleh Cak Nur, kini saatnya generasi muda mengembangkan dan menutupi bolong-bolong kajian itu. Putra bangsa kelahiran Jombang, Jawa Timur itu telah memantik cara berpikir *out of the box* atau melampaui zamannya. Kini disaat ilmu sosial Barat yang terus merangsek masuk ke jantung kajian ilmu sosial Indonesia, saatnya keberanian keluar dari zona nyaman perlu terus digelorakan.

Cak Nur telah mewariskan spirit pelacakan ilmu sosial keindonesiaan. Kini saatnya generasi muda mampu merdeka dari tekanan—untuk tidak menyebut penjajahan—ilmu sosial Barat.

Rujukan Dunia

Ilmu sosial keindonesiaan perlu dirawat dengan cara mengutip dan bangga dengan tokoh lokal. Tokoh lokal Indonesia tidak kalah dalam proses pemikiran dan amal saleh—meminjam istilah Kiai Dahlan. Pemikiran mereka telah melintas dan melampaui zaman. Mereka telah ber-ijtihad dalam mengembalikan wibawa keilmuan Indonesia.

Oleh karena itu, meniti jalan mereka dalam proses mengembalikan muruah ilmu sosial keindonesiaan tampaknya menjadi sebuah keniscayaan. Meneladani dengan mengutip pendapat mereka seakan mengembalikan secercah harapan bahwa ilmu sosial keindonesiaan mempunyai senyawa. Senyawa itulah yang akan menghidupkan spirit bahwa ilmu sosial bukan hanya milik Barat. Indonesia dengan segala kelebihan yang dimiliki layak menjadi rujukan ilmu sosial masyarakat dunia. *Wallahu a'lam.*

Sumber Tulisan

Benni Setiawan, “Kearifan Lokal Kelud”, *Koran Sindo*, 16 Februari 2014.

Benni Setiawan, “Merdeka dari Ilmu Sosial Barat”, *Jawa Pos*, 29 Agustus 2016

Benni Setiawan, “Sekolah Sehari Penuh”, *Koran Sindo*, 14 Agustus 2016.

Benni Setiawan, “Cah Angon”, *Koran Sindo*, 22 Maret 2015.

Benni Setiawan, “Pasar Ilang Kumandhange”, *Suara Merdeka*, 31 Mei 2015.

10

Konstruksi Sosial dalam Administrasi Publik di Indonesia

Pandhu Yuanjaya¹

Berbagai studi yang menyatakan bahwa kinerja administrasi publik di Indonesia merupakan salah satu yang terburuk, sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Belum lagi bila membahas mengenai tingginya angka kemiskinan, angka partisipasi sekolah, kesehatan masyarakat, pengangguran dan banyak lagi masalah khususnya berkaitan dengan kesejahteraan belum tuntas terselesaikan. Amanat konstitusi terhadap terselenggaranya pelayanan dan kebijakan publik yang baik seakan tidak dapat ditemui dalam praktiknya. Padahal, sebagai negara yang juga terpapar dampak modernisasi dan globalisasi, Indonesia belum mampu menyamai atau setidaknya mengejar laju kemajuan negara-negara yang selama ini diadopsinya. Lantas, yang menjadi pertanyaan mengemuka tentu saja, “apabila paradigma dan praktik administrasi publik di Indonesia berkembang seiring dengan apa yang terjadi di negara maju, kenapa hasilnya bisa berbeda?”.

Pada dasarnya, perkembangan paradigma dan praktik administrasi publik perlu disesuaikan dengan konstruksi sosial suatu negara yang akan menggunakan (Jun, 2006). Kompleksitas

¹ Dosen pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNY.

kondisi sosial akan mempengaruhi internal dan eksternal administrasi publik. Hal ini penting mengingat selama ini proses adopsi yang digunakan sering melupakan konteks. Setidaknya hal ini dapat dilihat dalam tiga faktor penting, yaitu: lingkungan umum, lingkungan khusus, faktor struktur dan kultur birokrasi, (Hoadley, 2006).

Faktor pertama adalah faktor lingkungan umum, yaitu lingkungan yang mempengaruhi secara tidak langsung seperti keadaan geografis, demografis dan sosiologis. Aspek ini merefleksikan kondisi Indonesia yang secara geografis memiliki lebih dari 17.000 pulau. Secara demografis, masyarakat Indonesia memiliki penduduk terbesar keempat dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa. Lebih lanjut, secara sosiologis terdiri dari 250 kelompok etnik, dan berbicara dalam berbagai Bahasa ibu yang berbeda. Hal ini belum ditambah bila konstelasi politik sedang memanas, sentiman promordialisme dan keagamaan semakin menguat. Belum lagi bila di tambah dengan kajian sosio-historis yang akan membuat tantangan berat para pakar administrasi publik. Oleh karenanya, penyelenggaraan pelayanan publik sebagai salah satu ukuran kinerja administrasi publik, bukanlah pekerjaan yang gampang di Indonesia.

Faktor kedua adalah faktor lingkungan khusus yaitu faktor yang mempengaruhi secara langsung seperti sistem politik dan hukum. Faktor ini menentukan karena sistem politik dimana administrasi publik berakar, dan sistem hukum (konstitusi dan sistem perundang-undangan) yang merupakan acuan normative dan jaminan kepastian hukum atas implementasi kebijakan dan sistem administrasi publik dijalankan. Dilihat dari dua sisi ini, sistem politik Indonesia masih relatif muda untuk sebuah negara dan masih sangat rentan. Bahkan, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi fondasi pendirian negara, masih

banyak diperdebatkan tidak hanya dikalangan akademisi, politisi, bahkan sampai masyarakat. Banyak kelompok, yang biasa disebut “kanan dan kiri” atau yang terbaru kelompok yang menginginkan perubahan ideologi negara, bahkan terdapat gerakan separatis yang mengangkat senjata yang menginginkan daerah mereka lepas dari Indonesia dengan berbagai alasannya. Dilihat dari sisi hukum dan perundang-undangan, sistem hukum di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang tentu saja banyak yang tidak relevan dengan perkembangan Indonesia di era modern kemerdekaan.

Faktor ketiga adalah struktur dan kultur birokrasi yang sentralistik dan pelanggengan kekuasaan daripada pelayanan. Setelah lama menjadi negara jajahan belanda, dan hidup dalam stratifikasi sosial yang cukup ketat, termasuk dalam masa kerajaan atau doktrin kegamaan dan kultural tertentu, masyarakat Indonesia masih menjalankan karakter yang sama. Struktur birokrasi taat pada garis komando yang ketat, bahkan setelah era desentralisasi, dengan berbagai menafsiran masing-masing pemimpin. Struktur birokrasi lebih mendukung pelestarian kekuasaan rezim ketimbang diabdikan pada penyelenggaraan pelayanan publik. Demikian pula dilihat dari segi kultur organisasi, administrasi publik Indonesia masih sangat diwarnai kultur kekuasaan ketimbang kultur pelayanan, baik yang tersirat dalam asumsi-asumsi dasar dan nilai yang dianut, maupun yang terungkap dalam berbagai ritual dan symbol-simbol dan perilaku pejabat publik dari pengambil keputusan sampai birokrat jalanan (*street level bureaucracy*) yang menjadi ujung tombak pelayanan. Tentu saja, beberapa tambahan seperti ketiadaan figure yang bisa dijadikan role-model dan proses manajemen dalam organisasi yang masih tradisional, *project oriented*, *reward oriented*, dan sering *ego sectoral*.

Identifikasi atas konstruksi sosial yang membentuk, mempengaruhi, dan menghasilkan administrasi publik yang demikian seperti yang digambarkan sebelumnya mutlak diperlukan. Walaupun tentu saja tidak bisa secara mendalam digambarkan dalam tulisan singkat ini, setidaknya mengantarkan pembaca dan penelitian selanjutnya pada upaya untuk pergi kearah mengenal kembali masyarakat Indonesia, dan menjawab apakah adopsi atau bahkan proses meniru dari ilmuan Barat baik teorisisasi dan praktik yang bermasalah, atau memang tidak cocok bagi bangsa Indonesia, serta menelaah lebih jauh potensi Indonesia.

Tantangan Menuju Indonesia-sentris

Perubahan institusi seringkali dilakukan melalui proses modifikasi, bukan diperoleh dari inovasi (Harris dan Kinney, 2003). Kondisi ini juga terjadi dikawasan Asia Tenggara dimana nilai filsafat-filasafatnya atau ide-ide lokal kurang memberi suplai pemikiran yang praktikal (Hoadley, 2006). Kelangkaan pemikiran demikian menyebabkan negara menyaring ide-ide asing/manca-negara untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai lokal, dan diklam sebagai *genuine*. Hal ini seperti yang terjadi pada klaim beberapa hasil budaya seperti candi-candi atau peninggalan lainnya yang sebenarnya secara makro nilai-nilainya diambil dari India, namun semua orang menganggapnya suatu keunikan dari Indonesia. Terutama, agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, yang eksistensinya diakui luas di Indonesia, mengalami proses serupa. Dalam arti lain, apakah metode administrasi atau ilmu sosial yang “diimpor” selama ini juga dapat diklam menjadi Indonesia-sentris?. Jika jawabannya tidak, tentu Indonesia menghadapi bencana karena menjalankan tiruan buram dari prinsip Eropa/Amerika sampai pada akhirnya masyarakat

Indonesia ter-Barat-kan. Usaha yang selama ini belum mengalami keberhasilan yang diinginkan.

Impian tentang satu administrasi Indonesia-sentris, diaplikasikan pada baik isu tentang manajemen *territorial*, misalkan antara sentralistis *versus* desentralistis, selain juga atas konsep-konsep dasar seperti *rule of law*. Perlu usaha mengkombinasikan antara unsur administrasi Indonesia yang asli –adat yang lebih relevan dalam bidang administrasi dibandingkan dalam aspek hukum sebagai unsur utama membangun administrasi asli, atau Indonesia-sentris. Bagaimanapun juga, ide seperti desentraslisasi tadi baik, menjadi tujuan proses untuk membawa pemerintahan menjadi lebih dekat dengan rakyat melalui pelayanan publik lebih baik.

Secara implisit, konsep-konsep seperti pelayanan publik lebih sesuai dengan adat istiadat dan norma-norma masyarakat di indonesia akan dikedepankan. Sebuah birokrasi ala soviet misalnya, bagaimanapun mereka efektif dan efisiennya, tidak akan dapat memperbaiki fungsi pelayanan dan kebijakan publik dalam ruang lingkup administasi di indonesia. Dengan logika yang sama, seperti bahwa sistem ala Amerika atau Eropa tidak otomatis menawarkan sebuah alternatif sistem yang lebih baik. Dengan sedikit membayangkan saja, orang dapat melihat penerapan metode administasi dari asing kedalam lingkungan indonesia akan menjadi tidak efisien dan tidak efektif meskipun berhasil ditempat yang lain. Fukuyama (2005) menunjukkan unsur-unsur yang dapat dipindahkan atau diadopsi, sebagai berikut:

Tabel. 1 Unsur-unsur Pengetahuan yang Dipindahkan

No	Unsur	Bidang Disiplin	Sifat dapat Dipindahkan
1	Bentuk dan manajemen organisasi	Administrasi Publik dan Manajemen	Tinggi
2	Bentuk kelembagaan	Ilmu politik, ekonomi, hukum	Menengah
3	Basis legitimasi	Ilmu politik	Mengengah, rendah
4	Sosial	Sosiologi dan antropologi	Rendah

Tabel tersebut sebelumnya menunjukkan bahwa dalam administrasi publik dan bentuk dan manajemen organisasi individu, pada tataran mikro ini, organisasi dapat diubah, dihancurkan, diciptakan awal, atau dikelola lebih baik atau lebih buruk dalam suatu cara yang terkait dengan pengalaman sejarah dari berbagai negara. Sampai pada tingkat dimana teori administrasi publik dapat diformalkan, ia dapat dipindahkan.

Dalam unsur kedua dan ketiga, menurut Fukuyama (2005) bentuk kelembagaan pada tataran sistem dan terutama untuk sistemokratis atau politik yang kuat. Pengetahuan pada unsur 2 dan 3 jarang dilakukan, namun sejak perang dingin, terjadi banyak perang, krisis ekonomi, revolusi atau reformasi yang memungkinkan adanya perubahan besar atau reformasi kelembagaan besar. Unsur keempat dari sisi pasokan, norma-norma dan nilai-nilai sosial dapat dimanipulasi oleh kebijakan publik. Nilai-nilai tersebut diperoleh dibentuk dari pendidikan, kepemimpinan, dan hubungan dengan masyarakat-masyarakat

yang lain. Menyerap nilai-nilai professional dalam ahal transparansi dan pertanggungjawaban misalnya, mempunyai dampak yang luas di beberapa negara berkembang, namun membutuhkan waktu perubahan sleuruh masyarakat dalam waktu yang lama. Perubahan sosial atas nilai-nilai tersebut hanya akan cepat secara mikro.

Tantangan lain masih bisa di tambahkan lagi, yaitu menjadi amat tidak mudah terkait hadirnya lembaga supra-pemerintah yang merampas hak prerogatif dari pemerintah pusat. Kepentingan IGGI, ICG (paris club), IMF, Bank Dunia, IDB, serta para kreditor indonesia lainnya, memberikan intervensi terhadap praktik administrasi bahkan intervensi terhadap solusi hukum, khususnya yang dianggap tidak dapat diterima kalangan negara kreditor/lembaga donor tersebut. Keberadaan ASEAN nantinya juga akan menambah beban seurupa, membatasi proses administrasi yang dianggap tidak sesuai atau melanggar kesepakatan bersama.

Jadi, apakah nantinya sistem administasi negara Indonesia ini harus menjadi eropa –sepertinya tidak mungkin selama masyarakat indonesia tetaplah Indonesia. Bahkan, bila tetap menggunakan model yang diturunkan dari teori Weber, New Public Managemen, New Public Service, atau model apapun juga, semua ini harus diadaptasikan dengan lingkungan lokal melalui satu proses yang disebut lokalisasi atau *local genius*.

Local Genius

Sebenarnya satu solusi paling sederhana bagi dilemma administrasi publik di Indonesia, yaitu dengan meningkatkan sampai ke level yang sama tingginya dengan tindakan peniruan.

Sistem ini harus ditingkatkan sampai tingkat standar minimal administrasi publik yang diterima secara universal. Pejabat administrator seharusnya menjadi seperti yang ada di suatu negara Barat (Eropa atau Amerika). Tapi tentu, kondisi sosial harus ikut menyesuaikan dengan cepat, dan bila mengingat Tabel 1, maka upaya tersebut akan berjalan sangat lambat, apabila tidak dikatakan sia-sia.

Banyak perubahan dengan tujuan buram yang diperoleh dari pabrik-pabrik metode administrasi yang diimpor ke Indonesia. Tanpa proses lokalisme, atau disesuaikan dengan lingkungan lokal, tujuan yang seharusnya baik sering tidak tercapai. Walaupun hal tersebut ada pada tataran akademis, dimana sebagian besar metode administrasi tersebut diimpor, namun harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia secara teoritis maupun praktikal, agar tidak hanya menjadi retorika saja. Nilai-nilai administrasi lokal bisa saja dirumuskan dan menjadi visi pelayanan mencapai tujuan nasional *modern* seperti menyangkut demokratisasi, pembangunan dan desentralisasi, merupakan sebuah pendekatan yang sangat mungkin dalam mencapai administrasi publik yang lebih baik.

Contoh-contoh yang menunjukkan hal ini amat banyak. Berdasarkan atas perspektif sejarah, administrasi publik di Indonesia secara praktis merujuk pada administrasi di Jawa, yaitu konsep Jawa Agung, satu unit administrasi yang diaplikasikan mulai dari semenanjung Barat Sumatra seperti Lampung, hingga sampai kawasan timur seperti Pulau Lombok. Sistem ini diaplikasikan dengan jangkauan 70% total penduduk Indonesia, sementara itu pengaruhnya dapat dikatakan menjangkau populasi yang lebih banyak lagi. Dalam konteks internasional, administrasi Jawa/Indonesia di masa *kerajaan-kerajaan berdaulat*, terminologi yang lebih berorientasi Asia dibanding

terminologi *deterministic* “era pra-kolonial” –sesuai dengan pola umum kawasan Asia Tenggara, yaitu menggunakan ide manca-negara kemudian mengadopsinya sesuai kondisi lokal. Fenomena ini bermuara pada terminologi yang disebut dengan *local genius*. Upaya akademis untuk menggambarkan satu proses meng-Asia Tenggara-kan konsep, serta memilih untuk tidak menggunakan dikotomi antara Timur dan Barat ini lah, yang oleh O.W Walters (1982), kemudian secara konseptual disebut sebagai proses lokalisasi.

Contoh lain yang dapat ditemukan pada pasangan terminologis seperti konsentrasi kekuasaan *versus* desentralisasi, undang-undang asing dan adat istiadat, manusia pembuat aturan dengan manusia penjaga nilai, negara sebagai bagian administrasi kolonial dengan pandangan lokal tentang kedaulatan dan lain-lain. Faktor geografis serta faktor sejarah telah menempatkan pengalaman Indonesia sebagai contoh *ideal*, untuk yang merebut kemerdekaan dari dominasi kolonialisme pada masa pasca perang dunia kedua. Akses dan pemahaman yang lebih besar terhadap konstruksi sosial, dapat memberikan pemahaman perkembangan administrasi publik di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Fukuyama, F. (2005). *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Jakarta: Gramedia
- Hoadley, M. C. (2006). *Quo vadis Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Jun, J. S. (2006). *Social Construction of Public Administration*. Albany: State University of New York